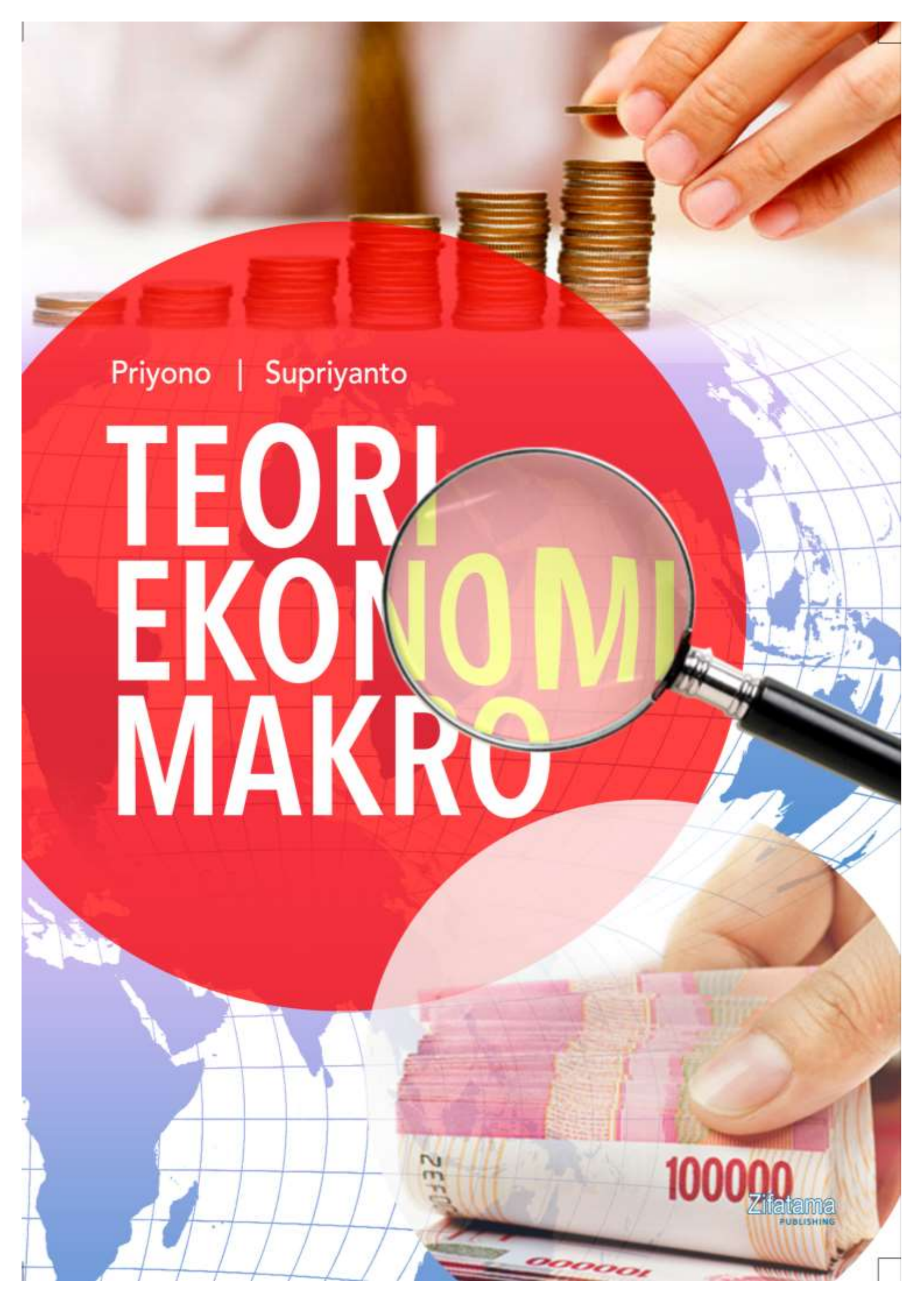




Priyono | Supriyanto

TEORI EKONOMI MAKRO

Zifatama
PUBLISHING

TEORI EKONOMI MAKRO

Priyono
Supriyanto



TEORI EKONOMI MAKRO

Penulis : PRIYONO
SUPRIYANTO
Editor: TEDDY CHANDRA

© 2016

Diterbitkan Oleh:

 ZIFATAMA PUBLISHING
Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo
Telp/fax : 031-7871090
Email : zifatama@gmail.com

Anggota IKAPI No. 149/JTI/2014
Cetakan Pertama, 2016
Ukuran: 18,5x27 cm
Jumlah Hal: x+166 hal

ISBN : 978-602-6930-29-3

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun dengan suatu harapan agar mahasiswa dapat mengikuti jalannya kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan baik. Buku ini disusun terdiri atas dua bagian penting, yaitu : *bagian pertama* terdiri atas konsep dan teori ekonomi makro yang terdiri atas tujuh bab. Sedangkan *bagian kedua* terdiri atas soal-soal dan tugas yang terangkum dalam Lembar Kerja Mahasiswa (LKM).

Ide awal penyusunan buku ini dapat direalisasikan oleh Supriyanto (Alm), dan Priyono yang saat itu masih bersama-sama menempuh study di Universitas Negeri Malang., Selamat jalan sahabatku, semoga amal yang berwujud buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Buku ini masih jauh dari sempurna oleh sebab itu berbagai saran dan kritik demi penyempurnaan amat kami harapkan. Terima kasih kami ucapkan pada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku sederhana ini dapat membantu proses perkuliahan mahasiswa, sesuai dengan harapan penulis.

Surabaya Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
SILABI DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN	vi

BAB I

PENDAHULUAN

• Analisa Ekonomi Mikro dan Makro	1
• Permasalahan Ekonomi Makro	4
• Macam-macam Model Kegiatan Ekonomi Dalam Masyarakat	11

BAB II

PENDAPATAN NASIONAL

• Pengertian Dan Arti Penting Pendapatan Nasional	21
• Jenis-Jenis Pendapatan Nasional	23
• Cara Perhitungan Pendapatan Nasional	26
• Hubungan Antara Konsep-Konsep Pendapatan	29
• Pembagian Pendapatan Nasional	32

BAB III

TEORI KONSUMSI

• Perilaku Konsumsi Masyarakat	37
• Pola Konsumsi Masyarakat	39
• Macam-Macam Teori Konsumsi	42

BAB IV

TEORI INVESTASI

• Teori-Teori Investasi	51
• Investasi dan Kapasitas Produksi	55
• Pelaksanaan-Pelaksanaan Investasi	59

BAB V

ANALISA PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP SEDERHANA

• Hakekat Perekonomian Tertutup Sederhana	62
• Fungsi Konsumsi, MPC dan APC	64
• Fungsi Saving MPS dan APS	67
• Hubungan MPC, MPS, APC dan APS	67
• Pendapatan Nasional Ekuilibrium	70
• Pengertian Dan Proses Bekerja Multiplier	73
• Inflationary Gap (IG) dan Deflationary Gap (DG)	76

BAB VI

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP

• Masalah Kebijakan Fiskal	79
• Analisis Kebijakan Dalam Sistem Perpajakan Yang Sederhana	83
• Pendapatan Nasional Ekuilibrium	86
• Macam-macam Angka Pengganda	89

BAB VII

ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA

• Hubungan Ekonomi Internasional	99
• Analisis Pendapatan Nasional Dalam Perekonomian Terbuka	101

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)	106
---	------------

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	
2.1.	Contoh Cara Menghitung Nilai Tambah	26
2.2.	Pertumbuhan GNP Dalam Dua Negara	31
3.1.	Alokasi Penggunaan PDB Pada Tahun 1970-1993	39
3.2.	Pengeluaran Rata-rata Per Bulan Pada Tahun 1984-1993	40
3.3.	Struktur Konsumsi Rumah Tangga Beberapa Negara	41
4.1.	Hubungan Y, C, S, APC, APS, MPC dan MPS	69
4.2.	Proses Multiplier Secara Angka-Angka	75

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	
1.1.	Pembagian Ilmu Ekonomi	2
1.2.	Bagan Alur Model Perekonomian Dua Sektor	12
1.3.	Bagan Alur Model Perekonomian Dua Sektor dengan Adanya Tabungan dan Investasi	13
1.4.	Bagan Alur Model Perekonomian Tiga Sektor	14
1.5.	Bagan Alur Model Perekonomian Terbuka	15
1.6.	Hubungan Antar Variabel Ekonomi Makro	17
1.7.	Proses Multiplier Secara Grafis	19
1.8.	Bagan Proses Multiplier	19
2.1.	Arus Pendapatan Nasional	29
2.2.	Kurva Lorenz	33
2.3.	Derajat pemerataan/Ketidakmerataan Kurva Lorenz	34
2.4.	Perkiraan Koefisien Gini	35
3.1.	Perbedaan Pola Konsumsi Negara Maju dan Negara sedang Berkembang	38
3.2.	Kurva Pengeluaran Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup ..	43
3.3.	Kurva Pengeluaran Konsumsi Dengan Hipotesis Pendapatan Relatif	47
3.4.	Marginal Efficiency of Investment	54
3.5.	Bentuk Kurva Autonomous Investment	59
3.6.	Bentuk Kurva Induced Investment	60
5.1.	Menemukan Persamaan Fungsi Konsumsi	65
5.2.	Kurva Konsumsi dan saving	69
5.3.	Keadaan Ekuilibrium	72
5.4.	Proses Multiplier Secara Grafis	75
5.5.	Proses Terjadinya IG dan DG	78
6.1.	Fungsi Konsumsi dan Saving Setelah Kebijakan Fiskal	86

SILABI DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN

A. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Nama Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi Makro
2. Sandi : -
3. Sks : 3 Sks
4. Jurusan/Program : S-1 Manajemen
5. Prasyarat : -

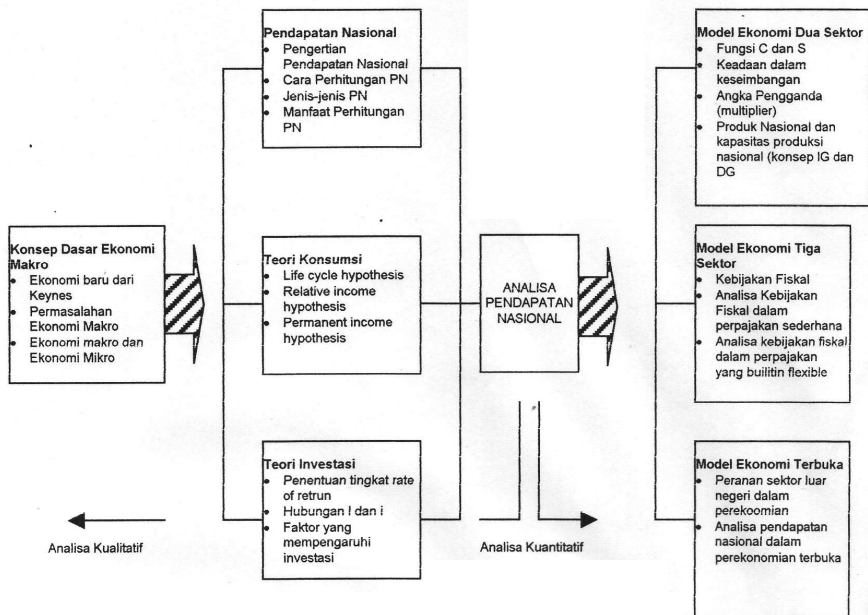
B. TUJUAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan permasalahan serta hubungan antar variabel ekonomi mikro, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif.

C. DISKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengetahuan dan ketrampilan dasar tentang konsep prinsip dasar ekonomi makro, variabel-variabel ekonomi makro dan analisa pendapatan nasional, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

D. KETERKAITAN ANTAR TOPIK DAN SUB TOPIK



E. SUMBER RUJUKAN

1. Rujukan Utama

- 1.1. Dembrug, F Thomas. 1992 **Makro Ekonomi : Konsep, Teori dan Kebijakan**, Jakarta : Erlangga (Edisi Terjemahan).
- 1.2. Sukirno, S. 1995. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. Jakarta : Rajawali Pers.
- 1.3. Mangkusubroto, G. 1992. **Teori Ekonomi Makro**. Yogyakarta : Bagian Penerbit STIE.
- 1.4. Soediyono, 1995. **Ekonomi Makro : Pengantar Analisa Pendapatan Nasional**. Yogyakarta : Liberty

2. Rujukan Pengayaan

- 2.1. Sobri, 1992. **Ekonomi Makro**. Yogyakarta ; BPFE-UII
- 2.2. Kelana, S. 1996. **Teori Ekonomi Makro**. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- 2.3. Wiratmo, M. 1994. **Sinopsis Pengantar Ekonomi Makro**. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- 2.4. Samuelson dan William, 1992. **Ekonomi**. Jakarta : Erlangga (Edisi Terjemahan)

F. GARIS BESAR RENCANA SAJIAN

Minggu Ke	Topik/Sub Topik Sajian	Tujuan Khusus Pembelajaran (TPK)	Sumber
1	Pendahuluan - Ekonomi Baru JM Keynes - Permasalahan Ekonomi Makro - Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro	Mahasiswa dapat memahami prinsip dasar ekonomi makro	E.2.1. E.1.2.
2 dan 3	Pendapatan Nasional - Pengertian Pendapatan Nasional - Metode Perhitungan Pendapatan Nasional - Jenis-jenis Pendapatan Nasional - Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional	Mahasiswa dapat memahami persoalan pendapatan nasional khususnya tinjauan dari aspek kualitatif	E.1.1 E.1.2 E.1.3
4 dan 5	Teori Konsumsi - Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup - Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif - Teori Konsumsi Dengan Pendapatan Permanen	Mahasiswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan teori konsumsi.	E.1.3

Minggu Ke	Topik/Sub Topik Sajian	Tujuan Khusus Pembelajaran (TPK)	Sumber
6	Teori Investasi - Menentukan rate of return - Hubungan investasi dengan bunga dan MEC - Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi - Kurva MEC dan MEI	Mahasiswa dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan teori investasi	E.1.1. E.1.3. E.2.1. E.2.2.
7 dan 8	Analisa Pendapatan Nasional Dalam Ekonomi 2 Sektor (Tertutup Sederhana) - Fungsi konsumsi dan tabungan - Keseimbangan Pendapatan Nasional - Angka Pengganda (Multiplier) - Produk Nasional dan kapasitas produksi nasional (Konsep IG) dan DG)	Mahasiswa dapat memahami dan trampil menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan analisa Pendapatan Nasional dalam Ekonomi 2 Sektor	
10 dan 11	Analisa Pendapatan Nasional dalam Ekonomi 3 Sektor (Tertutup Tidak Sederhana) - Kebijakan fiskal - Analisa fiskal dalam perpajakan yang sederhana - Analisa fiskal dalam sistem perpajakan yang built-in flexible	Mahasiswa dapat memahami dan trampil menyelesaikan soal-soal dalam ekonomi 3 sektor	E.1.2 E.1.1 E.2.1 E.2.2
12 dan 13	Model Perekonomian Terbuka - Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian Antar Bangsa - Analisa Pendapatan Nasional Dalam Perekonomian Terbuka	Mahasiswa dapat memahami peran pemerintah dalam perekonomian antar bangsa	E.1.2 E.1.4

Minggu Ke	Topik/Sub Topik Sajian	Tujuan Khusus Pembelajaran (TPK)	Sumber
14 dan 15	Jam Cadangan dan untuk test tengah semester	•	
16	Acara umpan balik dosen dengan mahasiswa	•	

G. RANCANGAN EVALUASI

No.	Unsur Penilaian	Bobot
1.	Penilaian atas Lembar Kerja Mahasiswa	30%
2.	Test Tengah Semester	20%
3.	Final Test	40%
4.	Lain-lain	10%
	Jumlah	100%

BAB : I

PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan :

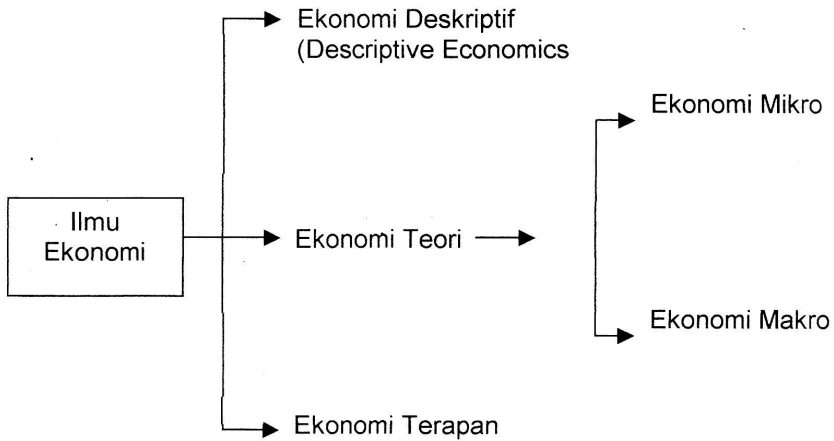
- Perbedaan analisa ekonomi makro dan analisa ekonomi mikro.
 - Berbagai permasalahan ekonomi makro.
 - Macam-macam model kegiatan ekonomi dalam masyarakat
-

ANALISA EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

E

konomi mikro dan makro adalah bagian dari pada teori ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi, variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Guna memahami kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro dalam ilmu ekonomi dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut ini



Gambar 1.1 Pembagian Ilmu Ekonomi

Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu.

Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik teori ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya.

Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari : teori harga, teori produsen dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga

oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan sesuatu barang dan jasa di dalam suatu pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran; hubungan antara harga permintaan dan penawaran; bentuk-bentuk pasar; dan sebagainya. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi; tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja; tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal; dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha.

Teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi Klasik pada abad ke 18 dan 19, seperti Adam Smith, David Ricardo, yang selanjutnya dikembangkan oleh Marshall dan Pigou. Guna menyusun teorinya, ahli-ahli ekonomi Klasik (mikro) mendasarkan pada anggapan-anggapan dasar tertentu, antara lain

- Setiap subyek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional, yakni para konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal dari setiap barang dan jasa yang dikonsumsi, sedangkan produsen selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.
- Setiap subyek ekonomi mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar.
- Tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga para subyek ekonomi dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar.

Berdasarkan anggapan-anggapan tersebut di atas para ahli ekonomi Klasik berkeyakinan bahwa kegiatan ekonomi akan berkembang secara efisien, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, dan akan tercapai kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatan sebaliknya.

Artinya yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya.

Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Teori ekonomi makro ini lahir ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1937 yang ditulis oleh JM Keynes ahli ekonomi Universitas Cambridge Inggris. Buku tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat.

Dalam buku tersebut Keynes menyajikan suatu teori yang menunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Akhirnya banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes, dan kelompok ini disebut *Keynesian Economist* yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktekkan di banyak negara.

PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

Pada dasarnya ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro.

Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian

perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut.

Ada tiga masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah :

Masalah Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh, hampir semua negara. pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena harga adalah indikator penting dari pada inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Dengan demikian kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang (dan bersifat sementara), maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah, karena tiga alasan :

- Inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat.
- Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.
- Inflasi dapat menyebabkan perubahan out-put dan kesempatan kerja dalam masyarakat.

Masalah Pengangguran

Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada, kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Tidak semua penduduk termasuk angkatan kerja adalah penduduk dalam

usia anak dan usia tua. Penduduk dalam usia kerja / angkatan kerja adalah penduduk dalam usia antara 15 tahun sampai 59 tahun. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) atau tidak. Secara teoritis perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan dalam praktek yang dimaksud dengan tingkat kesempatan kerja penuh mengandung arti yang sedikit berbeda. Guna menentukan apakah perekonomian telah mencapai *full employment* atau belum yang menjadi ukuran bukanlah penggunaan tenaga kerja 100%, tetapi penggunaan tenaga kerja yang sedikit lebih rendah dari itu. Di Amerika Serikat, misalnya *full employment* telah dianggap tercapai bila tingkat pengangguran paling banyak sekitar 4%. Di negara kita upayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi.

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah *kekurangan pengeluaran agregat*. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Kekurangan permintaan agregat adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran. Di samping itu faktor lain yang menimbulkan

pengangguran adalah : (1) menganggur karena ingin mencari kerja lain; (2) pengusaha menggunakan peralatan modern; (3) ketidak sesuaian antara ketrampilan pekerja yang sebenarnya dengan ketrampilan yang diperlukan dalam industri yang ada.

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan kondisi ini tentu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai.

Edwards membedakan lima bentuk pengangguran, yaitu :

- *Pengangguran terbuka*

Yang termasuk dalam pengangguran terbuka ini baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik maupun terpaksa secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).

- *Setengah menganggur (under employment)*

Yang termasuk dalam pengangguran ini adalah mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan.

- *Mereka yang tidak digolongkan pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.* Yang termasuk dalam pengangguran ini adalah :

- * Pengangguran tidak kentara (*disquised unemployment*). Misalnya petani yang bekerja di lading selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.

- * Pensiun lebih awal; fenomena ini dilakukan guna memberi peluang pada mereka yang muda dan belum bekerja.

- *Tenaga kerja yang lemah*

Yaitu mereka yang mungkin bekerja full-time, tetapi intensinya lemah karena kurang gizi atau penyakitan.

- *Tenaga kerja yang tidak produktif*

Yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, tetapi karena sumber daya-sumber daya penolong kurang memadai. Dalam kondisi semacam itu mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Dalam realisasinya terdapat hubungan yang erat sekali antara *tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata*. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja part-time selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin, dan terpinggirkan. Dalam proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan mestinya mereka itulah yang perlu diberdayakan untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik.

Namun demikian adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah kemiskinan, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Masalah kaya dan miskin berkaitan dengan banyak faktor yang mempengaruhi dan tergantung juga diri manusianya itu sendiri.

Masalah Ketimpangan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa, dalam bentuk ekspor maupun impor, transaksi dinancil seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negeri dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri, selisihnya dapat berupa surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan merupakan masalah

apabila ketidakseimbangan tersebut cukup besar. Kalau kenyataan itu terjadi, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya.

Pada tingkat mikro ekonomis, neraca pembayaran dipergunakan untuk menganalisa peranan dari rekening barang dan jasa individual, mengkuantifikasi variasi dalam sifat dan arah arus kapital, serta mengidentifikasi sumber-sumber dan penggunaan valuta asing, aplikasi mikroekonomis ini melukiskan aktivitas internasional secara individual yang dampak ekonomisnya dapat diimbangi oleh aktivitas yang tercatat di mana saja dalam neraca pembayaran.

Pada tingkat makro ekonomi neraca pembayaran berhubungan dengan aktifitas internasional agregat serta memberikan petunjuk apakah dalam ekonomi terdapat keseimbangan atau apakah sebaliknya.

Meskipun neraca pembayaran harus selalu dalam keadaan keseimbangan secara akutansi, namun tidak selalu harus dalam keadaan keseimbangan secara ekonomis. Hal ini karena jumlah transaksi kredit otonom tidak selalu sama dengan debit otonom.

Transaksi otonom dilaksanakan untuk pos-pos itu sendiri sebagai respon stimuli ekonomis, sosial bahkan politis yang berbeda-beda. Transaksi demikian dilakukan untuk menciptakan pendapatan serta memperbaiki kesejahteraan ekonomi. Pos-pos yang termasuk dalam transaksi otonom adalah ekspor dan import barang dan jasa, investasi asing, bantuan pemerintah, bantuan militer, serta kelompok tertentu arus kapital. Semua ini dicatat dalam rekening neraca pembayaran sebagai kredit atau debit sesuai dengan arus yang dicerminkan.

Transaksi penampungan/pengakomodasian dilaksanakan untuk mengkompensasi transaksi otonom dan secara esensial mencerminkan mitra finansial dari transaksi-transaksi tersebut. Transaksi pengakomodasian ini pada dasarnya terdiri atas arus kapital jangka pendek yang dicatat sebagai kredit atau debit sesuai dengan arus yang dicerminkannya.

Dalam era globalisasi ekonomi yang terjadi pada saat ini, ketergantungan perkembangan ekonomi antara negara yang ada di dunia semakin bertambah besar. Neraca Pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai ekspor dan import, transaksi jasa dan lain-lain.

Setiap negara akan berusaha menjaga stabilitas Neraca Pembayaran yaitu suatu keadaan di mana aliran uang keluar negeri sebagai akibat import barang dan jasa dan aliran. Modal keluar adalah seimbang dengan aliran uang yang masuk dari hasil ekspor barang dan jasa dan aliran masuk modal asing. Keseimbangan dalam neraca pembayaran ini cenderung akan mewujudkan kestabilan dalam krus valuta asing. Disamping menjaga kestabilan neraca pembayaran ini, usaha lain yang biasanya dilakukan setiap negara adalah menggalakkan perkembangan ekspor barang dan jasa dan meningkatkan pengaliran masuk.

Berbagai masalah akan timbul apabila suatu negara tidak dapat menstabilkan dan mengembangkan sektor luar negerinya dan menjaga kurs valuta asingnya. Dalam teori makro ekonomi selalu ditunjukan bahwa apabila suatu negara mengimport secara berlebihan yaitu import selalu lebih tinggi dari ekspor, beberapa masalah akan timbul. Berbagai masalah yang mungkin akan timbul adalah : *pertama*, import yang berlebihan itu cenderung akan menurunkan nilai mata uang domestik. Kondisi ini menyebabkan harga barang import semakin mahal dan inflasi akan menghantui pembelanjaan atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dan keadaan ini dapat mengurangi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga permasalahan ekonomi makro di atas, pada prinsipnya jangka pendek. Masalah ekonomi makro yang bersifat jangka panjang menyangkut *persoalan pertumbuhan ekonomi*. Di setiap periode suatu masyarakat akan menambah kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi yang berlaku. Dalam setiap periode jumlah tenaga kerja akan bertambah

karena ada golongan penduduk yang akan memasuki angkatan kerja. Investasi masa lalu akan menambah barang-barang modal dan kapasitas memproduksi di masa kini. Di samping itu investasi biasanya diikuti oleh perkembangan teknologi alat-alat produksi, dan ini akan mempercepat lagi pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan.

Minimnya anggaran pendidikan dalam suatu negara menjadikan keterbatasan kemampuan negara itu dalam mengembangkan teknologi. Hal ini diperparah lagi dengan keberadaan sumber daya manusia yang masih sangat rendah tingkat pendidikannya. Akibat dari kondisi itu seringkali pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya adalah jauh lebih rendah dari potensi pertumbuhan yang dapat dicapai.

MACAM-MACAM MODEL KEGIATAN EKONOMI DALAM MASYARAKAT

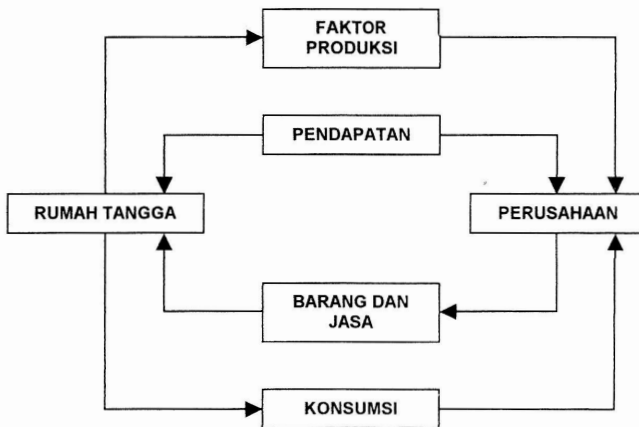
Kegiatan ekonomi dalam masyarakat secara makro dapat dibedakan atas tiga model, yaitu model kegiatan perekonomian tiga sektor, model kegiatan perekonomian tiga sektor, dan model kegiatan perekonomian empat sektor (model perekonomian terbuka). Masing-masing model perekonomian terdiri atas beberapa indikator/besaran ekonomi makro yang saling berhubungan dengan satu sama lain.

Secara lebih terinci model-model kegiatan perekonomian di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Model Perekonomian Dua Sektor

Untuk mempermudah pengamatan mengenai bekerjanya perekonomian secara nasional, masyarakat suatu perekonomian dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu *sektor rumah tangga*, *sektor perusahaan*, *sektor pemerintah*, dan *sektor luar negeri*. Dalam pembahasan yang pertama adalah perekonomian yang sangat sederhana (perekonomian dua sektor). Yang dimaksud dengan perekonomian sederhana (perekonomian dua sektor) adalah suatu perekonomian yang hanya terdiri

dari sektor perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi yang berasal dari sektor rumah tangga, sedangkan sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi (seperti alam/tanah, modal, tenaga dan interpreneur), memerlukan barang-barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Gambaran tentang alur kegiatan perekonomian sederhana (perekonomian dua sektor) dapat dilihat dalam Gambar 1.2. berikut ini :



Gambar 1.2. Bagan Alur Model Perekonomian Dua Sektor

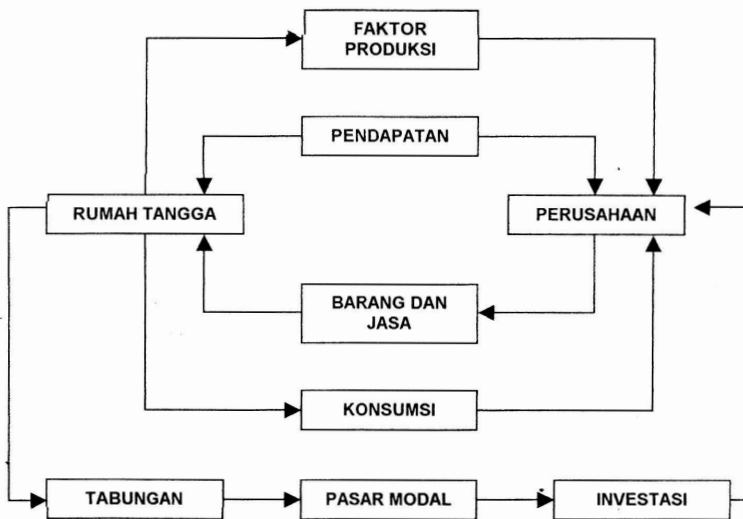
Pada bagian atas gambar 1.2 menunjukkan aliran faktor-faktor produksi (seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan interpreneur) yang berasal dari sektor dari sektor rumah tangga dan digunakan oleh sektor perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian sektor perusahaan memberikan balas jasa/imbalan dalam bentuk uang. Uang inilah sebenarnya yang merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga.

Bagian bawah dari Gambar 1.2 menunjukkan aliran barang-barang dan jasa-jasa dihasilkan oleh sektor perusahaan dan selanjutnya dikonsumsi oleh sektor rumah tangga. Sebagai gantinya sektor rumah tangga memberikan uang kepada sektor perusahaan sebagai pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan.

Apabila seluruh pendapatan yang diperoleh rumah tangga dibelanjakan untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan, maka perekonomian berada dalam keadaan seimbang, karena sisi pendapatan sama dengan sisi pengeluaran.

Terdapat kemungkinan sektor rumah tangga tidak membelanjakan seluruh pendapatannya untuk konsumsi, tetapi sebagian pendapat yang diperoleh di simpan sebagai tabungan (saving). Apabila hal ini yang terjadi, maka keseimbangan perekonomian terganggu, karena adanya bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan akan berakibat barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan yang terjun habis.

Gambar 3.1. berikut ini menunjukkan keseimbangan apabila sektor rumah tangga menyimpan sebagian pendapatan yang diperoleh sebagai tabungan.



Gambar 1.3. Bagan Alur Model Perekonomian Dua Sektor Dengan Adanya Tabungan dan Investasi.

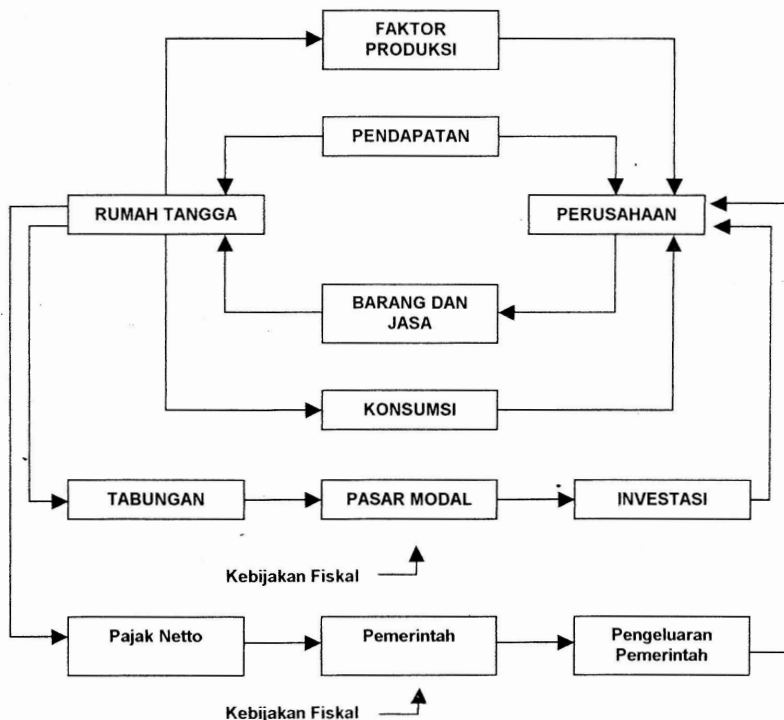
Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh rumah tangga (tabungan) disebut *kebocoran (leakage)*. Agar perekonomian tetap pada

keadaan seimbang, maka bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan (tabungan) tadi harus digunakan dalam perekonomian.

Tabungan rumah tangga biasanya disalurkan kepada sektor perusahaan melalui pasar modal atau sektor perbankan dan oleh perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran investasinya. Investasi sektor perusahaan merupakan penyeimbang dari adanya kebocoran tabungan dalam perekonomian.

Model Kegiatan Perekonomian Tiga Sektor

Yang dimaksud dengan kegiatan perekonomian tiga sektor adalah kegiatan perekonomian yang terdiri atas sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Guna memperoleh gambaran kongkrit tentang model kegiatan perekonomian tiga sektor dapat dilihat dalam gambar 1.4. berikut ini.



Gambar 1.4. : Bagan Alur Model Perekonomian Tiga Sektor

Gambar 1.4. di atas memperlihatkan bagan alur kegiatan perekonomian dengan adanya campur tangan pemerintah adalah pajak (Tx), transfer pemerintah (Tr), dan pengeluaran pemerintah (G). dengan adanya campur tangan pemerintah di dalam bidang ekonomi ini berarti pemerintah turut campur tangan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi, pemerintah melalui instruksi kebijakan ekonomi makro dapat mengurangi terjadinya gangguan tersebut.

Dalam perekonomian tiga sektor I, G dan Tr adalah bocoran dari sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan Tx adalah suntikan. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan *bocoran = suntikan*. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan berikut :

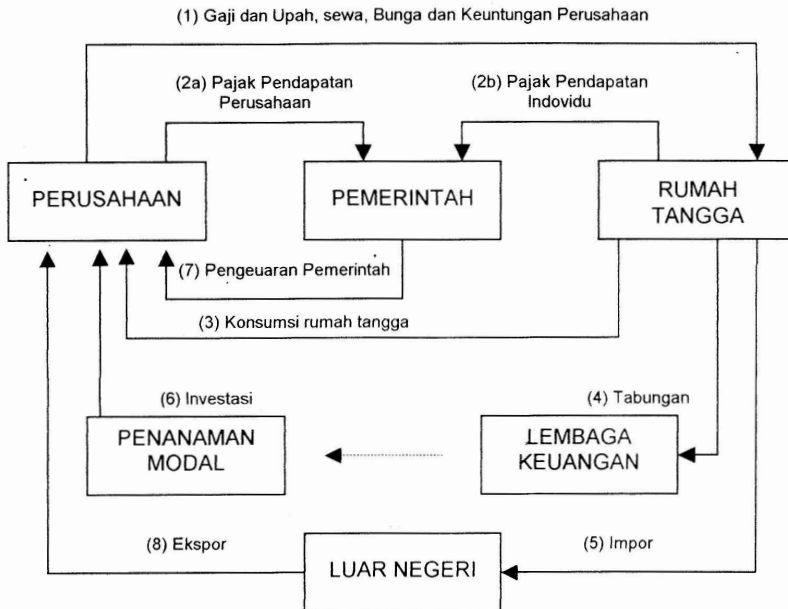
$$I + G + Tr = S + Tx$$

Penerimaan pemerintah, yaitu pajak netto yang dipungut dari sektor rumah tangga, digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan aktivitas pemerintah. Kebijakan mengenai pengelolaan belanja pemerintah disebut kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Model Kegiatan Perekonomian Terbuka

Dalam perekonomian terbuka, kegiatan perekonomian dilakukan oleh empat sektor, yaitu kegiatan perekonomian rumah tangga, kegiatan perekonomian perusahaan, kegiatan perekonomian pemerintah, dan kegiatan perekonomian oleh luar negeri.

Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kegiatan perekonomian terbuka dapat dilihat dalam Gambar 1.5 berikut ini.



Gambar 1.5 : Bagan Alur Model Perekonomian Terbuka

Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga, yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan. Hal ini terlihat dalam aliran 1. Pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan (aliran 2), tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan rumah tang (aliran 3).

Rumah tangga dalam perekonomian akan menggunakan pendapatan mereka untuk transaksi yang berikut :

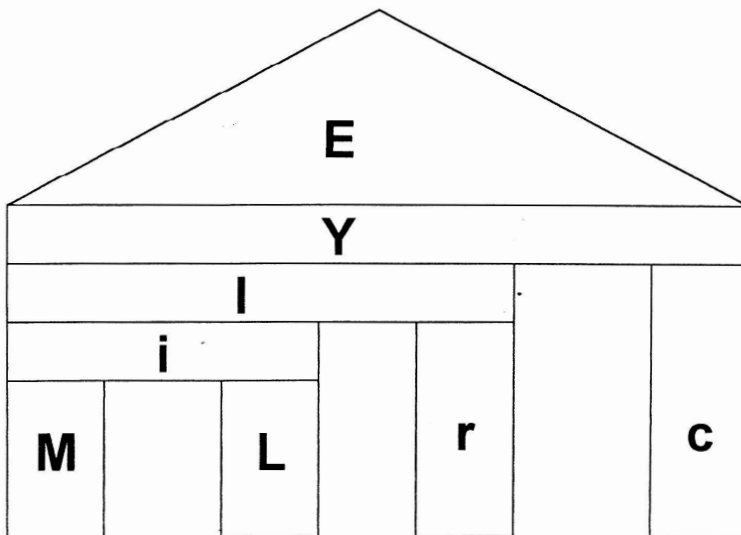
- Membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sektor perusahaan dan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (Aliran 4).
- Membayar pajak pendapatan kepada pemerintah (Aliran 3).
- Mengimport, yaitu membeli barang-barang yang diproduksi negara lain (Aliran 5).

- Menabung siswa pendapatan yang diperoleh ke dalam lembaga keuangan (Aliran 6).

Dalam perekonomian terbuka, disamping adanya aliran uang ke luar untuk membayar import, juga terdapat aliran uang yang masuk yang diperoleh dari negara-negara lain (Aliran 8). Aliran 8 adalah pengeluaran penanamann modal dari sektor perusahaan. Sedangkan aliran 7 adalah pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli barang-barang kebutuhan administrasi pemerintah dan barang modal untuk investasi pemerintah.

Demikianlah secara garis besar kegiatan ekonomi dalam masyarakat ini dilaksanakan mulai dari kegiatan ekonomi yang paling sederhana (ekonomi dua sektor) sampai kegiatan ekonomi yang paling komplek (ekonomi empat sektor). Semua kegiatan ekonomi itu dilaksanakan guna mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran bersama.

Hubungan antara fundamental tentang variabel-variabel ekonomi makro dapat dilihat dalam Gambar 1.6 pada bagian berikut ini.



Gambar 1.6 : Hubungan Antar Variabel-variabel Ekonomi Makro

Keterangan :

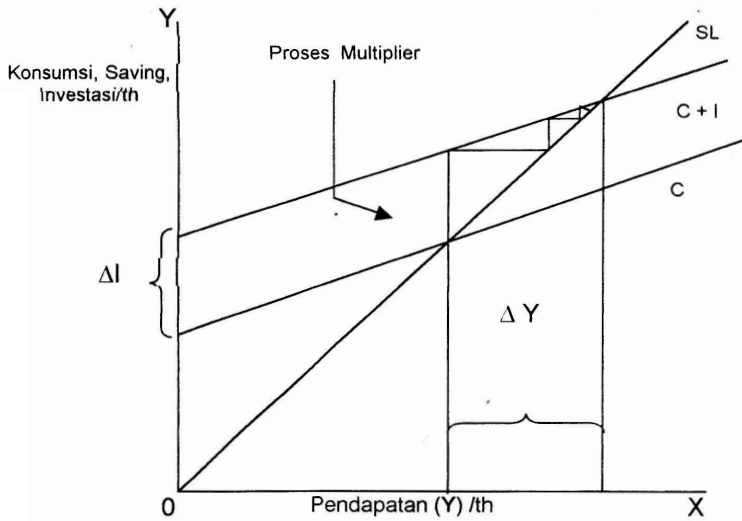
- M : Jumlah uang yang beredar
- L : Liquidity preference
- i : Rate of interest (tingkat bunga)
- r : Marginal Efficiency of Capital
- C : Consumsi
- I : Investasi
- Y : Pendapatan
- E : Kesempatan

Komposisi antara jumlah uang yang beredar (penawaran akan uang) dengan liquidity preference (permintaan akan uang) akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga. Di samping itu tinggi rendahnya tingkat bunga juga ditentukan oleh kebijakan otoritas moneter di dalam suatu negara, dalam hal ini adalah kebijakan bank sentral suatu negara.

Perbandingan antara besarnya tingkat bunga (i) dengan tingkat marginal efficiency of capital (MEC/r) menentukan dilaksanakan atau tidaknya suatu investasi. Apabila $i > r$, investasi tidak akan dilaksanakan. Dalam kondisi semacam itu orang yang mempunyai uang akan lebih suka menabung uangnya daripada berinvestasi yang banyak mengandung resiko. Apabila $i < r$, maka investasi akan dilaksanakan, karena investasi masih menguntungkan bila dibandingkan dengan bunga bank.

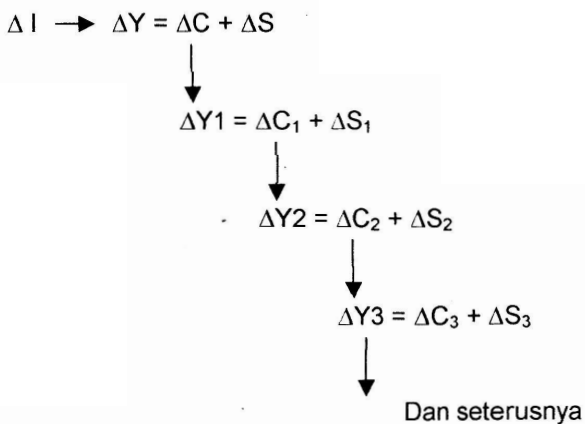
Perubahan pada besarnya tingkat investasi (I), melalui perubahan pada tingkat konsumsi (C) mengakibatkan perubahan pada tingkat pendapatan (Y) secara berganda misalnya apabila terdapat pertambahan investasi, melalui pertambahan pada tingkat konsumsi mengakibatkan pertambahan tingkat pendapatan secara berganda. Proses perubahan pada tingkat investasi melalui perubahan konsumsi yang mengakibatkan perubahan-perubahan secara berganda ini disebut dengan proses multiplier.

Secara lebih jelas proses multiplier itu dapat dilihat dalam Gambar 1.7 berikut ini.



Gambar 1.7 : Proses Perubahan Investasi Melalui Perubahan Konsumsi Mengakibatkan Perubahan Pendapatan Secara Berganda.

Grafik di atas apabila digambarkan dalam bagan akan terlihat dalam Gambar 1.8 berikut ini.



Gambar 1.8 : Bagan Proses Multiplier

Proses multiplier tidak hanya berlaku untuk penambahan investasi, tetapi juga pengurangan investasi. Oleh sebab itu multiplier dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, karena pada satu sisi multiplier bermanfaat bagi kita (bila ada tambahan investasi), sedang pada sisi lain merugikan bagi kita (bila ada pengurangan investasi). Apabila terjadi pengurangan jumlah investasi yang terjadi dalam suatu masyarakat, melalui pengurangan jumlah besarnya konsumsi mengakibatkan berkurangnya pendapatan secara berganda. Pengurangan pendapatan secara berganda berarti memperluas terjadinya jumlah kemiskinan dalam masyarakat. Bila ini yang terjadi akan sama artinya *memperluas terjadinya masalah sosial*, dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan di dalam tingkat pendapatan nasional akan berpengaruh dalam tingkat kesempatan kerja yang ada dalam tingkat masyarakat. Misalnya apabila terjadi peningkatan pendapatan, maka hal itu akan menambah kesempatan kerja dalam masyarakat. Dengan pendapatan yang naik, permintaan (konsumsi) masyarakat akan bertambah merupakan indikator kesempatan kerja juga bertambah.

BAB : II

PENDAPATAN NASIONAL

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan :

- Pengetahuan pendapatan nasional arti penting pendapatan nasional.
 - Jenis-jenis pendapatan nasional.
 - Cara perhitungan pendapatan nasional.
 - Hubungan antara konsep-konsep pendapatan
 - Pembagian pendapatan nasional.
-

PENGERTIAN DAN ARTI PENTING PENDAPATAN NASIONAL

Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro, merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro.

Perubahan di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap variabel yang lain.

Di dalam seluruh teori ekonomi makro, pembahasan yang menyangkut Pendapatan Nasional merupakan bagian yang paling menarik perhatian untuk dibicarakan. Hal tersebut disebabkan pembahasan Pendapatan Nasional dianggap pilar utama penyangga Politik Ekonomi artinya kearah Pendapatan Nasional itulah hampir semua kebijakan di bidang perekonomian difokuskan.

Pengertian tentang Pendapatan Nasional dapat ditinjau dari sudut pandang berikut :

- Dari pengertian Produk Nasional Kotor (Gross National Product)

Keseluruhan dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat di dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Mengenai barang-barang disini meliputi baik barang-barang konsumsi maupun barang-barang investasi. Nilai barang produksi tersebut dinyatakan dengan uang pada harga pasar yang berlaku. Sedangkan barang dan jasa yang dimasukkan untuk menyusun Pendapatan Nasional hanyalah barang-barang yang merupakan final goods. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan rangkap.

- Dari pengertian Pendapatan Nasional Kotor (Gross National Income)

Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat, dalam pengertian main power yang umumnya mempunyai jangka waktu satu tahun. Pendapatan di sini meliputi balas jasa baik terdapat proses produksi secara langsung ikut serta di dalam proses produksi.

- Golongan pendapatan yang diterima oleh orang-orang yang secara langsung ikut serta dalam suatu proses produksi Pemilik tanah akan menerima sewa tanah.

Pemilik tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah/gaji.

Pemilik modal akan memperoleh balas jasa dalam bentuk bunga.

Pengusaha/interpreneur akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.

- Golongan pendapatan yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak langsung terlihat pada proses produksi, yaitu : Orang-orang yang mempunyai pekerjaan secara bebas, seperti dokter, dan pengacara.

Orang-orang yang bekerja di dalam suatu lembaga atau organisasi seperti pegawai negeri, dan ABRI.

Arti Penting Pendapatan Nasional

Pentingnya mengetahui besarnya Pendapatan Nasional antara lain adalah :

- Pendapatan Nasional itu merupakan alat ukur bagi tinggi rendahnya tingkat hidup atau kemakmuran suatu bangsa. Secara kuantitatif tingkat hidup atau kemakmuran suatu bangsa itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah Pendapatan Nasional dengan jumlah penduduknya. Konsep ini biasa kita kenal dengan istilah pendapatan perkapita. Walaupun pendapatan perkapita itu sendiri belum menggambarkan tingkat kemakmuran seluruh masyarakat.
- Pendapatan Nasional berguna untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Hal tersebut bisa dilihat dari sumbangan tiap-tiap sektor kegiatan ekonomi terhadap pembentukan Pendapatan Nasional.
- Pendapatan Nasional berguna untuk menentukan dan kemudian menyusun berbagai kebijakan yang dipandang perlu. Dari sektor pertanian umpamanya, dapat disusun berbagai kebijakan seperti pengadaan pangan, industri pupuk, irigasi dan sebagainya.
- Pendapatan Nasional berguna untuk mengetahui dan membandingkan kegiatan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini kaitannya dengan gerak gelombang kehidupan ekonomi (konjungtur).

JENIS-JENIS PENDAPATAN NASIONAL

Istilah Pendapatan Nasional merupakan pengertian yang agak komplek. Dalam istilah Pendapatan Nasional terkandung lima tingkat pendapatan. Adapun ke lima tingkat pendapatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Produk Nasional Kotor (Gross National Product)

GNP adalah jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam waktu satu tahun berdasarkan harga pasar yang berlaku. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar,

haruslah diperhatikan jangan sampai terjadi perhitungan ganda (double accounting). Dalam konsep GNP ini meliputi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara suatu negara, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri.

Produk Nasional Bersih (Net National Product)

NNP diperoleh dari jumlah GNP setelah dikurangi dengan barang modal untuk penggantian. Tentang penyusutan bagi peralatan produksi yang terpakai dalam proses produksi umumnya berifat taksiran, sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

Pendapatan Nasional Bersih (Net National Income)

Net National Income (NNI) diperoleh dari NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat digeserkan kepada pihak lain. Misalnya penjualan pajak import dan sebagainya.

Personal Income

Personal Income ini dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan :

- Pajak Perseroan, yaitu pajak yang dibayar oleh setiap badan usaha kepada pemerintah.
- Laba yang tidak dibagi, yaitu sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya untuk keperluan perluasan perusahaan.
- Iuran pensiun yaitu iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja.

Untuk personal income ini harus kita tambahkan dengan transfers payment. Yang dimaksud transfers payment adalah pembayaran-pembayaran di negara-negara yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu, dan pembayaran tersebut bukan merupakan balas jasa atas

keikutsertaannya dalam proses produksi tahun sekarang, melainkan sebagai balas jasa untuk tahun-tahun sebelumnya, atau pembayaran pada seseorang yang sebenarnya berasal dari income orang lain.

Adapun contoh-contoh dari transfer payment adalah :

- Pembayaran kepada orang yang sudah pensiun.
- Tunjangan para veteran.
- Dana-dana sosial (pembayaran untuk para penganggur).

Disposable Income

Disposable income adalah sejenis pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan. Disposable income ini diperoleh dari personel income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Yang dimaksud pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain/langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Misalnya pajak pendapatan.

Dari penjelasan yang menyangkut jenis-jenis pendapatan nasional di atas selanjutnya dapat disederhanakan sebagai berikut :

- Gross National Product (GNP) terdiri atas :
 - a. Upah + tunjangan (wages and supplement to employess).
 - b. Penghasilan perusahaan perseorangan (net income of unincorporated enterprise).
 - c. Persewaan rumah, tanah (rent).
 - d. Bunga (interest).
 - e. Devident.
 - f. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan (net corporated profit).
 - g. Pajak perusahaan (indirect business taxes).
 - h. Pajak tidak langsung (indirect taxes).
 - i. Penyusutan (depreciation)
- $GNP (-) depreciation = NNP$
($NNP = a$ sampai dengan h)

- $NNP (-) \text{ indirect taxes} = NNI$
(NNI = a sampai dengan g)
- $\text{Personal Income} = NNI$
(-) net coporated profit
(-) business tax
(-) social security tax contribution
(+) transfers payment
- $\text{Disposable Income} = \text{Personal Income} - \text{Pajak Langsung}$

CARA PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Ada tiga cara yang dipergunakan untuk menghitung besarnya pendapatan nasional. Ketiga cara/metode yang dimaksud secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

Cara/Metode Produksi

Cara yang pertama dilakukan dengan jalan *menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian*. Penggunaan cara itu dalam menghitung pendapatan nasional, disamping untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional, juga sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali yaitu dengan hanya menghitung nilai produk netto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

Mengenai cara dalam menghitung nilai tambah, dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Contoh Cara Menghitung Nilai Tambah

Jenis Kegiatan	Nilai Produksi	(Ribuan Rupiah)	Nilai Tambah
1. Mengambil kayu di hutan.	50		50
2. Menggergaji papan	200		150
3. Membuat perabot	600		400
4. Menjual perabot di toko	800		200
Jumlah nilai tambah			800

Berdasarkan data dalam Tabel 2.1 di atas, besarnya jumlah nilai tambah yang diwujudkan oleh keempat kegiatan itu adalah : (Rp. 50,00 + Rp. 150,00 + Rp. 400,00 + Rp. 200,00) = Rp. 800,00. Dengan demikian besarnya tambah yang diperhitungkan dalam menghitung pendapatan nasional untuk barang tersebut adalah Rp. 800,00.

Cara/Metode Pengeluaran

Perhitungan Pendapatan Nasional dengan cara pengeluaran dilakukan dengan jalan *menjumlahkan nilai barang-barang jadi yang dihasilkan dalam perekonomian*. Dalam menghitung nilai pendapatan nasional menurut cara pengeluaran adalah penting untuk membedakan dengan sebaik-baiknya diantara barang-barang jadi dan barang-barang setengah jadi. Tindakan itu dilakukan, untuk menghindari terjadinya *perhitungan dua kali* atas nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi

- ***Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga***

Nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tidak semua transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga digolongkan sebagai konsumsi (rumah tangga). Pengeluaran untuk membeli rumah digolongkan sebagai *investasi*. Pengeluaran-pengeluaran seperti membayar asuransi dan mengirim uang kepada orang tua (atau anak yang sedang sekolah) tidak digolongkan sebagai konsumsi karena ia tidak merupakan pengeluaran atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.

- ***Pengeluaran Pemerintah***

Berbeda dengan rumah tangga, yang membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah membeli barang terutama untuk kepentingan masyarakat. Yang termasuk dalam pengeluaran ini antara lain pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan juga pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Pembelian

pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan utama, yaitu konsumsi dan investasi pemerintah.

- *Pembentukan Modal Sektor Swasta*

Pembentukan modal sektor swasta akan lebih penting dinyatakan sebagai investasi. Yang dimaksud dalam pembentukan modal sektor swasta adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang.

- *Eksport Neto*

Yang dimaksud dengan eksport neto adalah nilai ekport yang dilakukan suatu negara dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai import dalam periode yang sama. Eksport suatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Oleh sebab itu nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional.

Cara/Metode Pendapatan

Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan ini dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah pendapatan dari seluruh warga negara/masyarakat yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi. Adapun golongan-golongan masyarakat yang mempunyai pendapatan itu adalah :

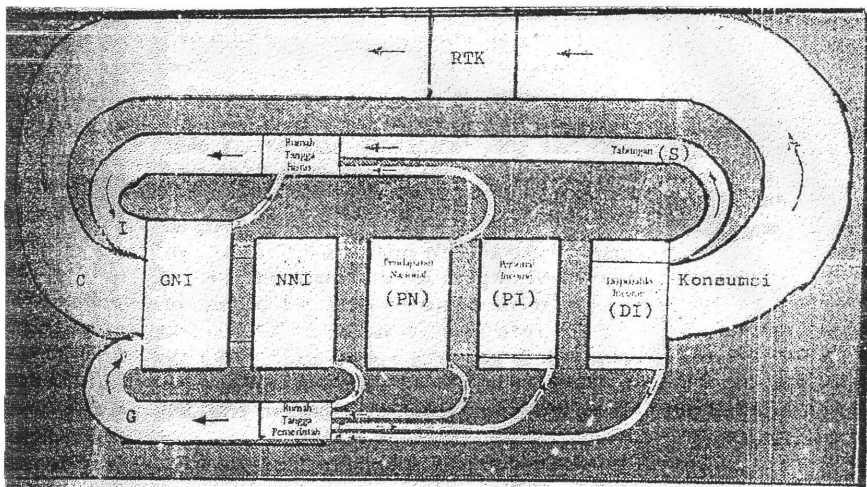
- Pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah.
- Pendapatan dari usaha perseorangan (perusahaan perseorangan).
- Pendapatan dari sewa.
- Bunga Neto, yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga atas pinjaman konsumsi dan bunga pinjaman pemerintah.
- Pendapatan dari keuntungan perusahaan.

Di negara maju, dimana administrasi perpajakannya sudah demikian maju dan tertib, kesadaran tentang pentingnya arti perpajakan sudah demikian tingginya, maka jumlah pendapatan masyarakat dapat diketahui melalui pajak pendapatan. Hal yang demikian tentunya kemungkinan kecil diterapkan di Indonesia. Kesadaran wajib pajak

dinegara kita masih sangat memperhatikan, orang Indonesia lebih cenderung untuk menghindari dari kewajiban pajak, daripada dengan sadar menjadi wajib pajak yang baik.

HUBUNGAN ANTARA KONSEP-KONSEP PENDAPATAN

Berbagai jenis/konsep pendapatan pada prinsipnya terjalin suatu hubungan yang erat satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan di antara jenis/konsep pendapatan dapat dilihat dalam Gambar 2.1 pada bagian berikut ini.



Gambar 2.1. Arus Pendapatan Nasional.

Dalam Gambar 2.1. di atas nampak jelas kedudukan dan peranan tiga sektor yang terlibat dalam pembentukan GNP, yaitu Rumah Tangga Konsumen (RTK), Rumah tangga perusahaan (RTP) dan Rumah tangga Pemerintah (RTP).

Mula-mula sekali terlihat dalam Gambar 2.1. penyusutan dikeluarkan dari bab I. Penyusutan ini adalah uang yang dicadangkan dan masuk ke rumah tangga bisnis, karena memang bisnis itulah yang akan memanfaatkannya untuk mengganti alat-alat modalnya yang telah aus dan susut. Dari NNI selanjutnya dikurangi pajak tak langsung dan pajak tak langsung ini mengalir masuk ke rumah tangga pemerintah. Penerimaan pajak pemerintah dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Dari Nasional Income dikurangi laba tak dibagikan dan pajak laba perusahaan perseorangan, laba tak dibagikan itu mengalir masuk kembali ke rumah tangga bisnis untuk digunakan membiayai hal-hal sebagaimana diterangkan didepan. Sedangkan pajak laba perusahaan perseorangan sudah jelas mengalir ke rumah tangga pemerintah. Tetapi dalam hal ini pemerintah tidak semata-mata menerima pembayaran pajak saja tetapi juga mengeluarkan transfor, yang terlihat dalam gambar menjadi bagian dari personal income.

Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, harus dikurangi dengan pajak perseorangan yang selanjutnya mengalir ke rumah tangga pemerintah. Pendapatan yang siap dibelanjakan ini dimanfaatkan untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup, sedang sisanya ditabung. Tabungan ini mengalir ke rumah tangga bisnis untuk dimanfaatkan.

GNP itu pada hakekatnya sama dengan GNI sebagai GNP, maka produk yang terdapat didalamnya niscaya dibeli orang. Sebagai GNI, pun pendapatan yang ada di dalamnya akan dibelanjakan.

Di dalam GNP, maka produk yang ada di dalamnya itu sendiri dari berbagai macam, semuanya itu akan dibeli orang. Mereka yang membeli seluruh produk yang menjadi unsur GNP terdiri atas empat jenis barang, yaitu :

- Konsumen yang membeli barang-barang konsumsi.
- Investor yang membeli barang-barang investasi.

- Pemerintah (government expenditure) dan
- Pihak luar negeri yang membeli barang-barang ekspor kita.

Di dalam GNI, maka pendapatan yang ada di dalamnya itu dibelanjakan untuk bagai macam kebutuhan. Disini pun di dapat pembelian seperti pada GNP, yaitu :

- Konsumsi
- Investasi
- Pengeluaran pemerintah dan
- Perdagangan luar negeri.

Dengan demikian, baik lihat sebagai GNP maupun, tetaplah didapati adanya empat komponen yang mencerminkan penggunaannya, yakni konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan perdagangan luar negeri.

GNP biasanya dipakai sebagai alat ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu setiap negara akan berusaha untuk mencapai kenaikan jumlah GNP-nya. GNP mempunyai sifat yang lebih menyeluruh di banding dengan indikator yang lain.

Pada Tabel 2.2. berikut ini adalah contoh proses pertumbuhan dua negara dalam rentang waktu yang berbeda.

Tabel 2.2 Pertumbuhan GNP Dalam Dua Negara

Tahun	GNP Negara A (dlm Milyar)	Pertumbuhan (%)	GNP Negara B (dlm milyar)	Pertumbuhan (%)
1992	\$ 1.000	-	\$ 10.000	-
1993	\$ 1.500	50	\$ 12.000	20

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas nampak jelas sekalipun baik di tahun 1992 maupun tahun 1993 negara A lebih miskin dari pada negara B, namun perekonomian negara A maju lebih cepat dari pada B, sebabnya adalah GNP negara A sekalipun lebih kecil, tetapi lebih pesat larinya/pertumbuhannya dari pada GNP negara B.

Pada prinsipnya GNP dapat berubah setiap waktu/periode, baik karena berubahnya jumlah out-put yang dihasilkan, maupun karena perubahan dalam tingkat harga-harga yang terjadi di pasar.

Dalam bagian berikut akan dijelaskan perbedaan antara GNP dan GDP. Pada prinsipnya antara GNP dan GDP tidak ada perbedaan dalam cara menghitung yang berbeda hanyalah apa yang dihitung, yakni apakah hasil produksi orang asing di dalam negeri, demikian juga apakah milik nasional di luar negeri akan dihitung atau tidak. Dalam arti kalau yang dihitung termasuk pendapatan orang kita di luar negeri, tetapi tidak termasuk pendapatan orang asing di dalam negeri maka ini berkaitan dengan GNP. Sedangkan apabila yang dihitung termasuk pendapatan orang asing di dalam negeri, tetapi tidak termasuk pendapatan orang kita di luar negeri maka hal ini berkaitan dengan GDP.

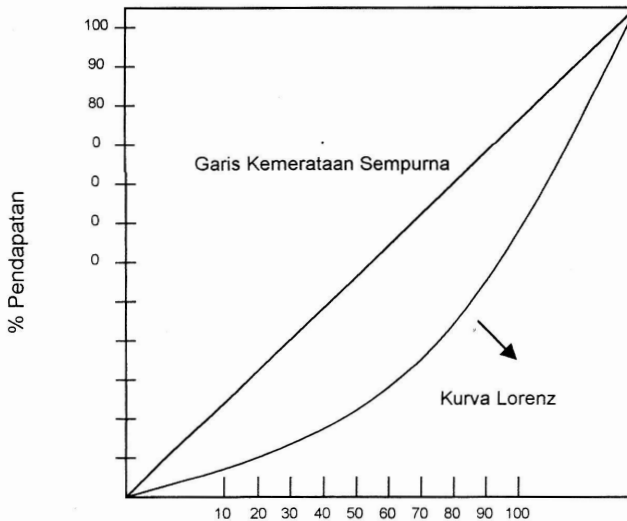
Apabila dalam suatu periode tertentu nilai GDP lebih besar dari pada GNP, maka kenyataan itu menunjukkan kepada kita bahwa dalam negara tersebut cukup banyak modal asing yang beroperasi di dalam negeri. Di samping itu gambaran tersebut kurang mencerminkan adanya upaya memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri. Banyak komponen-komponen dasar itu didatangkan dari luar negeri, sehingga nilai akhir dari produk yang dihasilkan akan kembali ke luar negeri. Prof. Sri Edi Swasono pernah memberikan kesan bahwa perekonomian yang dibangun selama orde baru itu sebagai perekonomian ongkos jahit.

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan semakin bertambahnya kemiskinan adalah inti permasalahan pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan distribusi pendapatan hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidak merataan yang lebih luas di negara sedang berkembang.

Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah membuat kurva yang disebut kurva Lorenz. Dinamakan kurva Lorenz

seorang ahli statistik dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (Share) pendapatan mereka. Bentuk dari kurva Lorenz terlihat dalam Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2. Kurva Lorenz

Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana cara membuat kurva Lorenz. Jumlah penerimaan pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal tidak dalam angka mutlak tetapi dalam persentase kumulatif. Misalnya titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya) dan pada titik 60 menunjukkan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya.

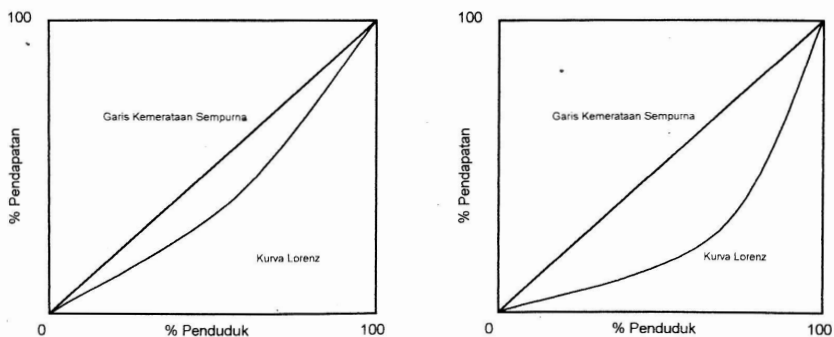
Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membuat bujur sangkar.

Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik margin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang

diterima sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Sebagai contoh titik tengah dari diagonal tersebut betul-betul menunjukkan bahwa 50 persen jumlah penduduk. Demikian juga titik 75 persen atau 25 persen. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan ketidakmerataan sempurna. Oleh sebab itu garis tersebut bisa juga disebut sebagai garis ketidakmerataan sempurna.

Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima, misalnya selama 1 tahun, semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal, semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara akan terletak disebelah kanan kurva diagonal tersebut, semakin tinggi derajat ketidakmerataan, kurva Lorenz itu akan semakin melengkung dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah kanan bawah.

Pada Gambar 2.3 berikut ditunjukkan kurva Lorenz yang disitribusi relatif merata dan distribusi yang relatif tidak merata.

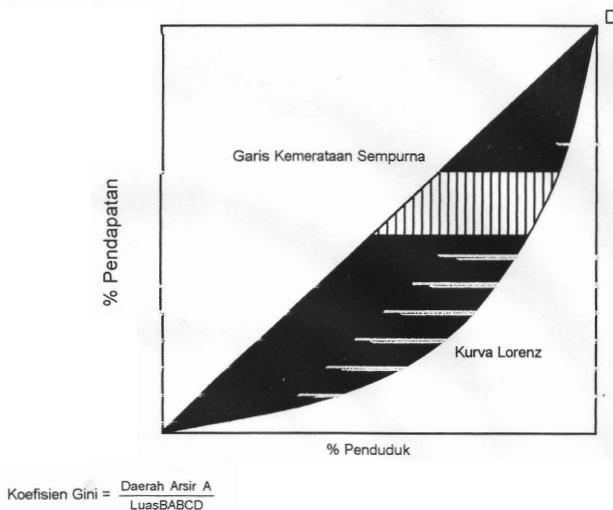


Gambar 2.3 Derajat pemerataan/Ketidakmerataan Menurut Kurva Lorenz

Koefisien Gini

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal/dengan kurva Lorenz disbanding dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut.

Dalam Gambar 2.4 Koefisien Gini itu ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir A dengan luas segitiga BCD.



Gambar 2.4 Perkiraan Koefisien Gini

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Negara-negara yang mengalami *ketidakmerataan tinggi*, koefisien gininya berkisar antara 0,50-0,70 *ketidakmerataan sedang* berkisar antara 0,36-0,49 dan mengalami *ketidakmerataan rendah* berkisar antara 0,20-0,35.

Suatu negara yang menunjukkan ketidakmerataan tinggi akan terlihat adanya kenyataan yang jauh antara kaya dan miskin, kenyataan

itu perlu dibenahi guna tercapainya stabilitas ekonomi negara. Berbagai strategi/kebijakan perlu dilakukan untuk mengatasinya.

Berbagai strategi/kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakmerataan yang tinggi antara lain :

- Pembangunan di bidang pertanian.
- Pembangunan sumberdaya manusia.
- Meningkatkan peran berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

BAB : III

TEORI KONSUMSI

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan :

- Macam-macam teori konsumsi.
 - Perilaku konsumsi masyarakat.
 - Pola konsumsi masyarakat.
-

PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT

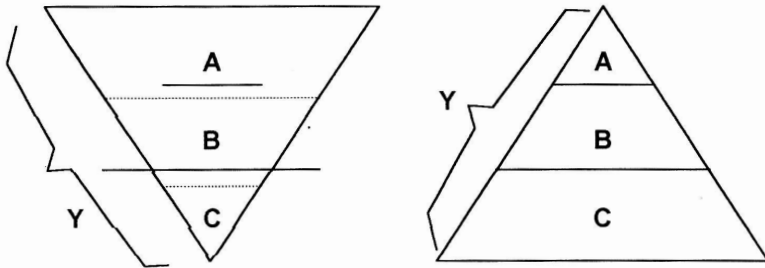
Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makro ekonomi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya.

Hal ini berarti semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perilaku tabungan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Dengan demikian maka, jika pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah.

Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan di sebut hasrat marginal untuk konsumsi atau MPC, sedangkan besarnya tambahan tabungan terhadap pendapatan dinamakan hasrat marginal untuk menabung atau MPS.

Perbedaan antara masyarakat yang sudah maju dengan negara yang sedang berkembang bukan hanya terletak dalam atau dicerminkan oleh perbandingan relatif besar kecilnya angka MPC dan MPS, akan terjadi juga dalam pola konsumsi itu sendiri. Pola konsumsi masyarakat yang sedang berkembang didominasi oleh konsumsi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Sedang pada masyarakat yang sudah maju cenderung lebih banyak teralokasi ke butuhan sekunder atau tersier.

Secara lebih jelas perbedaan pola konsumsi negara sedang berkembang dengan negara maju dalam kaitannya dengan gambar 3.1 berikut ini.



Keterangan :

- Y : Pendapatan
- A : Kebutuhan primer
- B : Kebutuhan sekunder
- C : Kebutuhan tersier

Gambar 3.1. Perbedaan Pola Konsumsi Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang.

Berdasarkan Gambar 3.1. di atas nampak jelas perbedaan pola konsumsi masyarakat negara sedang berkembang dengan negara maju digambarkan dalam piramid yang terbalik. Pada negara yang sedang berkembang sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer, sedang bagian kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier. Pada negara maju sebagian besar pendapatan justru dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier, sedangkan sebagian kecil pendapatan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau tersier.

Dalam pertandingan relatif terhadap pendapatan nasional, proposi pengeluaran konsumsi masyarakat makin lama makin menurun. Pada

tahun 1970, hampir 80 % penggunaan PDB teralokasi untuk pengeluaran konsumsi masyarakat. Sepuluh tahun kemudian proporsi itu berkurang menjadi hanya sekitar 60%. Dan pada awal tahun 90-an proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam penggunaan PDB tinggal berkisar 50%. Penurunan proporsi relatif pengeluaran konsumsi masyarakat mengisyaratkan bahwa alokasi PDB kini semakin terarah kepada penggunaan yang lebih produktif. Kondisi ini memang sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pada Tabel 3.1 berikut ini dipaparkan data proses perkembangan persentase alokasi konsumsi masyarakat Indonesia terhadap PDB.

Tabel 3.1. Alokasi Penggunaan PDB Pada Tahun 1970-1993
(Persentase, Berdasarkan Harga Berlaku)

Sektor Penggunaan	1970	1975	1980	1985	1990	1993
Konsumsi Masyarakat	79,64	69,06	60,52	58,97	53,77	52,43
Pembentukan Modal	14,05	20,34	20,87	28,05	36,49	35,28
Konsumsi Pemerintah	9,05	9,92	10,32	11,23	8,87	9,85
Eksport	13,40	22,92	30,47	22,20	25,89	25,29
Import	16,14	22,24	22,18	20,45	25,03	25,85
Produk Domestik Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS beberapa edisi

Berdasarkan data Tabel 3.1. di atas perubahan alokasi penggunaan untuk konsumsi masyarakat yang tahun 1970 adalah 79,64% dari PDB dan tahun 1993 adalah 52,43 %. Sedangkan untuk tahun 1970 adalah 14,05% dari PDB untuk tahun 1993 menjadi 35,28%. Perubahan alokasi penggunaan dari sektor yang bersifat konsumtif dan mengarah pada sektor yang bersifat produktif adalah sangat positif, karena hal tersebut akan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian yang terjadi dalam masyarakat.

POLA KONSUMSI MASYARAKAT

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis secara garis besar alokasi pengeluaran

konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok penggunaan, yaitu *pengeluaran untuk memakan* dan *pengeluaran untuk bahan makanan*.

Gambaran mengenai pola konsumsi masyarakat berdasarkan jenis pengeluarannya terlihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Pengeluaran Rata-rata per Bulan/Kapita pada Tahun 1984-1993 (Menurut Jenis Pengeluarannya dalam rupiah)

Jenis Pengeluaran	1984	1987	1990	1993
A. Pengeluaran Makanan	9.146 (68,55%)	12.247 (67,21%)	16.379 (67,41%)	21.228 (63,59%)
B. Pengeluaran Bukan Makanan	4.197 (31,45%)	5.926 (32,79%)	7.917 (32,59%)	12.157 (36,41%)
Jumlah	100%	100%	100%	100%

Sumber : Statistik Indonesia, 1994

Berdasarkan data tabel 3.2 di atas terjadi pola pergeseran jenis pengeluaran konsumsi masyarakat seiring dengan proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pola pergeseran itu juga mencerminkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik akan cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan makanan.

Bagaimana pola konsumsi masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat lain ? publikasi Bank Dunia tahun 1993 memaparkan 48% pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia tersita untuk pangan. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga Malaysia yang hanya 23%. Sedangkan rumah tangga di Jepang hanya membelanjakan 17% dari pengeluarannya untuk pangan. Orang Amerika Serikat lebih mapan lagi, mereka hanya membelanjakan 10,5% untuk pangan.

Struktur konsumsi rumah tangga beberapa negara terlihat dalam Tabel 3.3. berikut ini.

*Tabel 3.3 Struktur Konsumsi Rumah Tangga Beberapa Negara
(Dlm Persentase)*

Alokasi Pengeluaran	Indonesia	India	Malasya	USA	Jepang
• Pangan	48	52	23	10	17
• Sandang	7	11	4	6	6
• Macam-macam sewa dan energi	13	10	9	18	17
• Perawatan kesehatan	2	3	9	14	10
• Pendidikan	4	4	5	14	10
• Pengangkutan dan perhubungan	4	4	19	14	9
• Konsumsi lainnya	22	13	33	30	34

Sumber : World Development Report, 1993. Wolrd Bank

Gambaran tentang pola struktur konsumsi rumah tangga seperti ditunjukkan dalam tabel 3.3 di atas dapat dipakai sebagai strategi kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara. Pada negara-negara yang relatif sudah maju kebutuhan akan non pangan, seperti pendidikan, perawatan kesehatan serta pengangkutan dan perhubungan menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu strategi kebijakan pemerintah akan mengikuti pola tersebut. Kondisi akan berbeda dengan negara yang sedang berkembang, dimana prioritas utama pola struktur pengeluaran pada konsumsi kebutuhan akan pangan.

Pola konsumsi masyarakat berbeda untuk lapisan pengeluaran. Terdapat kecenderungan umum bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat, semakin alokasi belanjannya untuk pangan. Di lain pihak, kian tinggi kelas pengeluarannya kian, besar pula proposi belanjannya untuk konsumsi bukan makanan. Semua pola konsumsi itu juga dapat dipakai dasar pertimbangan di dalam strategi pemasaran oleh suatu perusahaan. Bagi Indonesia distribusi penduduk menurut

pengeluaran konsumsi sangat bervariasi dari satu propinsi ke propinsi yang lain.

MACAM-MACAM TEORI KONSUMSI

Teori konsumsi yang telah kita kenal sebelumnya adalah merupakan teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat (konsumsi otomatis) dan pengeluaran konsumsi akan meningkatkan dengan bertambahnya penghasilan.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul pertanyaan bagaimanakah hubungan yang sebenarnya antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan serta faktor-faktor pendapatan ? hubungan yang menyangkut faktor-faktor lain itulah yang akan dibicarakan oleh berbagai teori lain mengenai konsumsi.

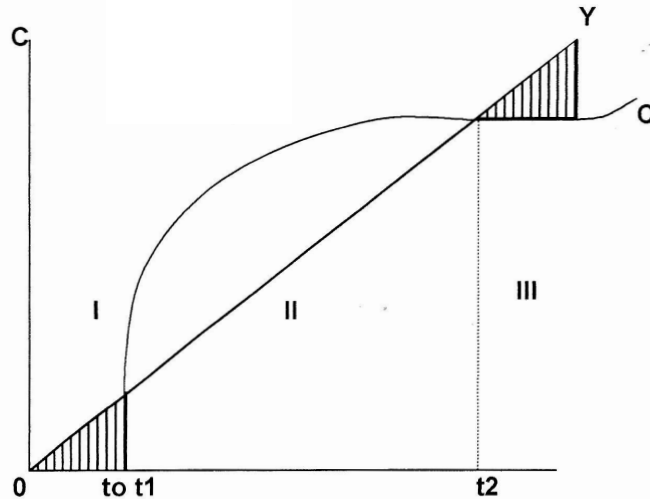
Teori Konsumsi Dengan Hipotesis Siklus Hidup (Life Cycle Hypothesis)

Teori konsumsi dengan hipotesis ini dikemukakan oleh Ando Brimberg dan Modigliani yaitu tiga ekonomi besar yang hidup di abad 18. menurut teori ini *faktor sosial ekonomi seseorang* sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut.

Teori ini membagi pola konsumsi seseorang menjadi 3 bagian berdasarkan umur seseorang. Bagian pertama yaitu dari seseorang berumur 0 tahun hingga berusia tertentu di mana orang tersebut dapat menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia mengalami disaving (ia berkonsumsi tetapi tidak menghasilkan pendapatan). Kemudian pada bagian ke dua dimana seseorang berusia kerja dan dapat menghasilkan pendapatan sendiri yang lebih besar dari pengeluaran konsumsinya. Dan pada bagian ketiga dimana ia berada pada usia tidak bisa bekerja lagi.

Pada bagian dua ini mereka mengalami saving pada bagian tiga mengalami disaving.

Apabila dilihat dalam grafik, pola konsumsi berdasarkan teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup dapat dilihat dalam gambar 3.2 berikut ini.



Gambar 3.2 Kurva Pengeluaran Konsumsi Dengan Hipotesis Siklus Hidup

Pada Gambar 3.2 di atas sumbu vertikal menunjukkan tingkat konsumsi seseorang dan sumbu horizontal menunjukkan waktu (umur) orang tersebut. Pada bagian I, yaitu 0 sampai dengan t_0 seseorang mengalami dissaving. Hal ini terjadi karena orang tersebut belum menghasilkan pendapatan sedangkan ia perlu konsumsi. Pada umur t_0 orang tersebut mulai menghasilkan pendapatan. Akan tetapi hingga umur sebelum t_1 masih melakukan dissaving, karena pengeluaran konsumsi lebih besar dari pada pendapatan yang dihasilkan. Kemudian pada bagian II, yaitu umur t_1 sampai t_2 seseorang mengalami saving. Pada keadaan ini sudah menghasilkan pendapatan lebih besar dari pengeluaran konsumsi. Pada bagian III, yaitu pada umur lebih dari t_2 orang tersebut kembali melakukan disaving. Karena pada umur t_2 , ia tidak sanggup lagi

menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran konsumsinya.

AMB menggunakan bentuk fungsi konsumsi sebagai berikut :

$$C = a W$$

Yang menyatakan, bahwa a adalah MPC berbeda dengan Keynes yang menyatakan bahwa MPC merupakan suatu bilangan static AMB menyatakan bahwa a bukanlah bilangan static, tetapi nilainya tergantung dari umur, selera dan tingkat bunga.

W adalah nilai sekarang (present value) dari kekayaan yang terdiri dari tiga faktor yaitu :

- Present value dari penghasilan dari kekayaan seperti misalnya bunga, sewa dan sebagainya.
- Present value dari penghasilan sebagai balas jasa kerja, misalnya upah, gaji.
- Present value dari upah yang diharapkan akan diterima selama hidup.

Secara spesifik bentuk persamaan konsumsi yang dikemukakan oleh AMB adalah sebagai berikut :

$$C = a A_t + a Y_1^L + a(T-1) Y_1^{LE}$$

Keterangan :

C : Pengeluaran konsumsi

a : MPC

A : Kekayaan

Y^L : Penghasilan dari kerja

Y^{LE} : Penghasilan yang diharapkan semuru hidup sejak tahun ini.

T : Sisa umur seseorang dihitung pada saat ini

Pemasalahan yang sering timbul dalam upaya menghitung persamaan di atas adalah mengestimasi penghasilan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Salah satu cara yang digunakan oleh AMB adalah dengan membuat asumsi bahwa :

$$Y_t^{LE} = bY_t^L, \text{ dan } 0 > b < 1$$

Asumsi ini menyatakan bahwa penghasilan yang diharapkan mengalami peningkatan sebesar b . dengan demikian maka persamaan konsumsi dapat disubstitusikan menjadi :

$$C = a A_t + a[Y_t^{LE} + b(T - 1) Y_t^{LE}]$$

$$C = a A_t + a[1 + b(T - 1)] Y_t^L$$

Pada konsumsi jangka pendek $a A_t$ menjadi intersep yang secara empirik fungsi konsumsi menurut AMB adalah sebagai berikut :

$$C_t = 0.06 A_t + 0.07 Y_t^L$$

Teori Konsumsi Dengan Hipotesis Pendapatan Relatif (Relatif Income Hypotesis)

Teori konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan relatif ini dikemukakan oleh James Duesenberry. Dalam teorinya Duesenberry membuat dua asumsi, yaitu :

- Selera semua rumah tangga atas barang konsumsi adalah idenpendent yaitu terpengaruh atas pengeluaran yang dilakukan oleh tetangganya.
- Pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluaran pada saat penghasilan naik, berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan.

Duesenberry menyatakan bahwa teori konsumsi atas dasar penghasilan absolut sebagaimana dikemukakan oleh Keynes tidak mempertimbangkan aspek ekologi konsumen. Duesenberry menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga *sangat tergantung pada* posisi rumah tangga tersebut pada masyarakat sekelilingnya. Apabila konsumen senantiasa melihat pola konsumsi tetangganya yang lebih kaya, maka ada efek demonstrasi (demonstrasi effect). Akan tetapi

peniruan pola konsumsi tetangga harus dianalisis dengan melihat kedudukan relatif rumah tangga tersebut pada masyarakat sekelilingnya.

Sebagai misal, sebuah rumah tangga yang berpenghasilan Rp. 3 juta per bulan dan tinggal di daerah yang rata-rata penghasilan masyarakatnya sebesar Rp. 500.000,- akan cenderung untuk menabung lebih banyak dan konsumsi lebih sedikit sebab penghasilannya relatif lebih tinggi dari masyarakat sekitarnya. Sebaliknya apabila rumah tangga tersebut tinggal di daerah yang rata-rata penghasilan masyarakat sebesar Rp. 5 juta, maka rumah tangga dengan penghasilan Rp. 3 juta cenderung akan mempunyai pengeluaran konsumsi yang lebih besar dan tabungan yang lebih sedikit, sebab penghasilannya relatif lebih rendah dari penghasilan masyarakat sekitarnya.

Apabila dari tahu ke tahu terdapat kenaikan penghasilan bagi seluruh masyarakat, maka distribusi penghasilan seluruh masyarakat tidak mengalami perubahan, kenaikan penghasilan absolut menyebabkan pengeluaran konsumsi juga akan naik, begitu juga jumlah tabungan akan naik dalam proporsi yang sama. Ini berarti $APC + C/Y$ tidak mengalami perubahan dan ini berarti pula $APC = MPC$ yang merupakan fungsi konsumsi jangka panjang sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.3.

Dari fungsi konsumsi jangka panjang tersebut Duesenberry memperoleh fungsi konsumsi jangka pendek yang didasarkan pada asumsi kedua. Besarnya pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh *besarnya pendapatan tertinggi yang pernah dicapai*. Apabila terjadi kenaikan pendapatan maka pengeluaran konsumsi akan cenderung meningkat dengan proporsi tertentu. Sedangkan apabila pendapatan turun, maka pengeluaran konsumsi juga turun akan tetapi proporsi lebih kecil dari pada proporsi tidak sebanding dengan turunya pendapatan. Hal ini disebabkan suatu pola konsumsi yang terjadi dalam jumlah tertentu (pendapatan tertinggi yang pernah dicapai) akan sulit untuk dikurangi kalau pendapatan turun, apalagi turunya pendapatan cukup drastis.

Konsep dasar pemikiran teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif inilah yang menjadi dasar landasan sulitnya upaya pemberantasan KKN dikalangan aparatur birokrasi kita di era reformasi ini. Para aparatur birokrasi yang korup dengan penghasilan sepuluh kali lipat dari gaji resminya, mungkinkah mereka dapat mengurangi konsumsinya dengan hanya menerima gaji resminya (1/10), sedangkan pola konsumsinya sudah terlanjur sangat tinggi (pendapatan dari hasil korup).

Bentuk fungsi konsumsi menurut Duesenberry adalah sebagai berikut :

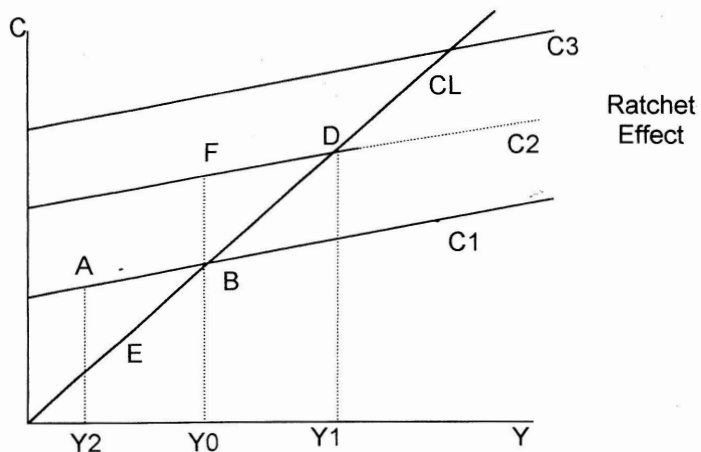
$$\frac{C}{Y} = f\left(\frac{y}{y^*}\right)$$

Dimana :

Y : adalah pendapatan pada tahun tertentu

Y* : adalah pendapatan tertinggi pada masa lalu

Masalah yang berkaitan dengan kurva pengeluaran konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif dapat dilihat dalam Gambar 3.3 berikut ini.



Gambar 3.3 Kurva Pengeluaran Konsumsi Dengan Hipotesis pendapatan Relatif.

CL dalam Gambar 3.3 di atas menunjukkan fungsi konsumsi jangka panjang. Apabila pendapatan sebesar Oy_0 besarnya pengeluaran konsumsi sebesar By_0 . Apabila pendapatan rumah tangga tersebut mengalami penurunan dari Oy_0 menjadi Oy_2 , maka konsumsi tidak akan turun ke titik E sepanjang kurva konsumsi jangka panjang, tetapi ke titik A pada fungsi konsumsi jangka pendek C_1 . Ini disebabkan karena saat terjadinya penurunan pendapatan, pola konsumsi tidak mudah untuk turun secara drastis. Penurunan pendapatan akan menyebabkan pengeluaran konsumsi turun perlahan-lahan, dan rumah tangga tersebut mengurangi tabungannya untuk menunjang pola konsumsi yang lama. Apabila pendapatan kemudian naik lagi dari Oy_2 ke Oy_0 pengeluaran konsumsi juga akan tidak naik secara drastis akan tetapi naik perlahan-lahan. Ini disebabkan karena rumah tangga tersebut ingin mengembalikan tabungan yang berkurang saat pendapatan turun sudah mencapai tingkat mula-mula. Setelah pendapatan Y_0 tercapai, tabungan sudah mencapai tingkat mula-mula, sehingga apabila terjadi kenaikan pendapatan dari Oy_0 menjadi Oy_1 , maka pengeluaran konsumsi akan naik secara drastis dari B ke titik D. apabila pendapatan turun kembali ke y_0 maka pengeluaran konsumsi tidak kembali ke titik B akan tetapi ke titik F, yaitu pada fungsi konsumsi jangka pendek C_2 yang lebih tinggi dari kurva konsumsi jangka pendek C_1 .

Ini adalah apa yang disebut *Ratchet effect* oleh karena itu penurunan ekonomi akan menyebabkan pengeluaran konsumsi turun sepanjang kurva konsumsi jangka pendek dan tidak pada fungsi konsumsi jangka panjang.

Teori Konsumsi Dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Permanet Income Hypothesis)

teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen ini dikemukakan oleh M. Friedman berdasarkan teori ini pendapatan yang diterima masyarakat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : (1)

pendapatan permanen (permanent income) dan (2) pendapatan sementara (transitor income).

Adapun yang dimaksud dengan pendapatan permanen adalah :

- Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu, misalnya pendapatan dari upah.
- Hasil dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan). Kekayaan sebuah rumah tangga terdiri dari 2 kategori, yaitu kekayaan non manusia dan kekayaan manusia. Kekayaan non manusia misalnya kekayaan fisik (barang konsumsi tahan lama, gedung ,,dan sebagainya) dan kekayaan finansial (saham, sumbangan berharga). Sedangkan kekayaan manusia adalah kekayaan yang melekat pada diri manusia.

Dengan demikian kekayaan (W) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$W = Y_p/i, \text{ sehingga } Y_p = i W$$

Dimana :

- W : Kekayaan
Y_p : Pendapatan Permanen
i : Tingkat Bunga

Yang dimaksudkan pendapatan sementara adalah pendapatan yang baik dapat dihasilkan terlebih dahulu dan nilainya dapat positif apabila nasibnya baik, atau negatif apabila mendapat nasib buruk. Seseorang yang mendapatkan pendapatan transitory positif, sedangkan seorang petani yang panennya gagal karena iklim/cuaca buruk dikatakan mendapatkan pendapatan transitory yang negatif.

Jadi pendapatan terukur seseorang dipengaruhi oleh pendapatan permanen dan pendapatan transitory dengan persamaan sebagai berikut ;

$$Y = Y_p + Y_t$$

Dimana :

- Y : Pendapatan terukur
- Y_P : Pendapatan permanen
- Y_t : Pendapatan transitori

Selanjutnya dalam teorinya Friedman membuat dua buah asumsi mengenai hubungan antara pendapatan permanen dan pendapatan transitory.

- Tidak ada korelasi Y_P Y_t atau dengan kata lain pendapatan transitory yang diterima semata-mata merupakan suatu faktor kebetulan saja.
- Pendapatan transitory tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi yang berarti apabila ditabung. Sebaliknya apabila pendapatan seseorang mengalami pendapatan transitory negatif maka reaksinya adalah dengan mengurangi tabungan serta tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi.

Menurut pendapatan Friedman pengeluaran konsumsi juga dibagi dua kategori. Yaitu konsumsi permanen (C_P) dan konsumsi transitory (C_t). pengeluaran konsumsi permanen adalah konsumsi yang direncanakan sedangkan konsumsi transitory merupakan pengeluaran konsumsi yang tidak direncanakan. Hubungan antara pendapatan terukur (Y) dan konsumsi terukur (C) akan tetapi hubungan antara pendapatan permanen dan konsumsi permanen.

BAB : IV

TEORI INVESTASI

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan :

- Teori-teori tentang investasi.
 - Investasi dan kapasitas produksi.
 - Pelaksana-pelaksana investasi
-

TEORI-TEORI INVESTASI

Investasi merupakan salah satu indikator penting di dalam kaitannya dengan pendapatan nasional. Hubungan antara investasi dan pendapatan nasional itu sedemikian pentingnya, sehingga dapatlah dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro investasi di bahas dalam bagian tersendiri.

Berbagai kegoncangan dalam investasi (melalui proses multiplier) akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan yang lebih hebat dalam output nasional. Multiplier adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya perubahan pendapatan nasional sebagai akibat berubahnya investasi, perubahan investasilah yang sering menyebabkan mengapa tingkat pendapatan nasional turun dibawah kapasitas produksi potensial, dan sering pula menyebabkan mengapa pendapatan nasional pada suatu waktu meningkat jauh diatas kapasitas potensial dalam masyarakat, sehingga menimbulkan gejala-gejala investasi.

Investasi adalah suatu masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya pengharapan akan pendapatan (prospected of yield) dari barang modal di masa depan. Pengharapan akan pendapatan di masa depan inilah faktor yang penting untuk penentuan besarnya

investasi. Mengenai persoalan kapan atau dalam keadaan bagaimana seorang pengusaha akan melakukan investasi, ada dua teori yang membahasnya, yaitu *teori konvensional (klasik)* dan *teori dari Keynes*.

Teori Konvensional (Klasik)

Teori konvensional (klasik) tentang investasi pada pokoknya didasarkan atas teori produktivitas batas (marginal productive) dari faktor produksi modal (kapital). Berdasarkan teori ini besarnya modal yang akan di investasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat bunga, sehingga investasi itu akan terus dilakukan bilamana produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi dari pada tingkat bunga yang akan diterima.

Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekayaan itu memberikan hasil yang berbeda-beda, dan juga mengandung resiko yang tidak sama, maka haruslah dipilih cara manakah yang paling baik, yang paling menguntungkan dan memberikan kepuasan secara maksimal bagi seseorang yang memiliki kekayaan. Pemilik kekayaan harus memilih dan menentukan putusan tentang manakah yang lebih menguntungkan antara membeli saham, obligasi jangka panjang, obligasi jangka pendek ataukah diinvestasikan dalam perusahaan.

Berdasarkan teori produktivitas batas, maka soal investasi oleh ahli-ahli ekonomi klasik dipecah atas prinsip-prinsip maksimisasi laba dari perusahaan-perusahaan individual. Sebab suatu perusahaan akan memaksimisir labanya dalam situasi persaingan sempurna, bila mana perusahaan itu menggunakan modalnya sampai pada jumlah yang produk marginal dari modal itu sama dengan harga modal, yaitu suku bunga.

Adapun secara garis besar teori klasik tentang investasi adalah sebagai berikut :

- Investasi akan dijalankan bilamana pendapatan dari investasi itu (prospected yield) lebih besar dari tingkat bunga. Bila hendak membandingkan antara pendapatan dari investasi dengan suku bunga maka tidak boleh dilupakan bahwa barang-barang modal umumnya

mempunyai penggunaan yang panjang dan tidak hanya sekali pakai, sehingga pendapatan dari investasi (yang akan dibandingkan dengan bunga) adalah terdiri dari jumlah-jumlah pendapatan yang akan diterima setiap akhir tahun, selama penggunaan barang modal itu dalam produksi (umur ekonomis), jumlah pendapatan tiap-tiap tahun selanjutnya dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku sekarang.

- Investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan bilamana biaya (ongkos) plus bunga lebih kecil dari hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi itu. Dengan demikian unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penentuan investasi adalah : (1) tingkat ongkos (biaya atas barang modal; (2) tingkat bunga; dan (3) tingginya hasil pendapatan yang diterima. Berubahnya salah satu dari ketiga faktor di atas, akan mengakibatkan berubahnya perhitungan profitabilitas.

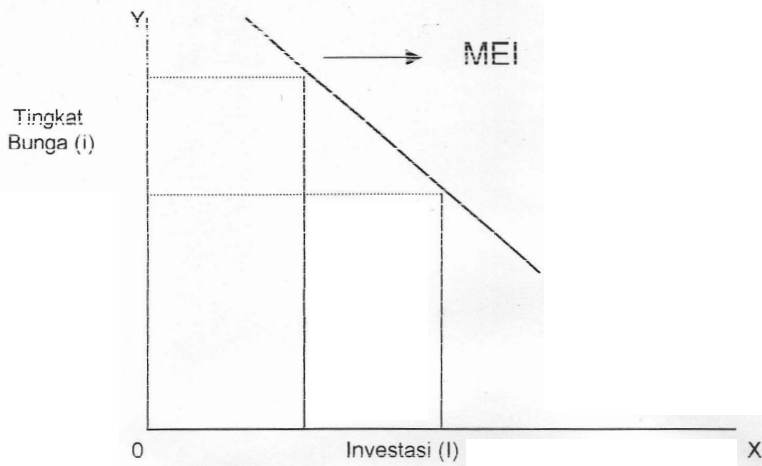
Teori Dari JM. Keynes :

Menurut pandangan dari JM. Keynes, masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*. Dengan mendasarkan atas konsep pemikiran tersebut investasi akan dilaksanakan apabila MEI masih lebih tinggi daripada tingkat bunga.

Secara grafis MEI itu digambarkan sebagai suatu skedul yang menurun, skedul ini menggambarkan jumlah investasi yang akan terlaksana pada setiap tingkat bunga. Menurunnya tingkat skedul MEI ini antara lain disebabkan oleh dua hal, yaitu :

- Bahwa semakin banyak jumlah investasi yang terlaksana dalam masyarakat, makin rendah Efisiensi Marginal Investasi itu.
- Semakin banyak investasi dilakukan, maka ongkos dan barang modal (asset) menjadi lebih tinggi.

Pada bagian berikut menunjukkan skedul MEI pada Gambar 3.4. berikut ini.



Gambar 3.4 Marginal Efficiency of Investment (MEI)

Menurut teori Keynes tentang investasi, pertimbangan pokok untuk terlaksananya investasi adalah faktor efisiensi marginal dari investasi itu sendiri. Efisiensi marginal dari investasi ini sangat tergantung pada perkiraan-perkiraan dan perhitungan pengusaha terhadap perkembangan situasi ekonomi masa depan. Oleh sebab itu tingkat MEI tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Pandangan ke hari depan bagi pengusaha dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor-faktor ekonomi maupun faktor-faktor psikologis. Menghubungkan antara pengusaha dengan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan investasi, perlulah diketahui tentang apa yang disebut entrepreneur. Entrepreneur merupakan sejenis pengusaha yang memiliki kelakuan dan bakat-bakat khusus yang tidak didapati pada pengusaha-pengusaha lainnya. Golongan entrepreneur ini mempunyai peranan yang sangat penting artinya dalam sejarah perkembangan ekonomi di dunia barat.

Entrepreneur adalah seorang innovator, yaitu orang yang mengusahakan kombinasi-kombinasi dari dalam proses produksi guna menciptakan kemajuan-kemajuan baru dan kenaikan-kenaikan hasil produksi. Para entrepreneur inilah yang mampu mempergunakan kesempatan investasi yang potensial sehingga kemungkinan keberhasilan sangat besar.

INVESTASI DAN KAPASITAS PRODUKSI NASIONAL

(Masalah COR dan ICOR)

masalah Capital Output Ratio (COR) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan suatu alat yang banyak dipergunakan dalam teori tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu bertujuan utama untuk menaikkan kemakmuran dan tingkat hidup masyarakat. Sampai berapa jauh, tingginya kemakmuran dan tingkat hidup ini dicerminkan oleh pendapatan nasional yang dicapai oleh kegiatan ekonomi dari masyarakat itu sendiri.

Investasi adalah aktivitas ekonomi baik yang berupa penambahan faktor produksi maupun yang berupa peningkatan-peningkatan kualitas faktor produksi. Investasi ini jadinya akan memperbesar pengeluaran masyarakat yang kemudian diperkuat oleh efek multiplier yang akhirnya akan memperbesar pendapatan nasional.

Agar supaya produksi nasional tidak berkurang maka penyusutan atau penurunan produktivitas haruslah diimbangi dengan investasi itu akan terjadi bila investasi baru lebih besar dari penyusutannya.

Dalam konsep multiplier, pendapatan nasional akan berubah bilamana besarnya investasi mengalami perubahan. Sehubungan dengan hal itu, timbul persoalan berapakah jumlah investasi harus ditanamkan ke dalam masyarakat, agar supaya pendapatan dapat dinaikkan dengan jumlah tertentu. Hal ini dilakukan dan tergantung pada COR, yaitu angka yang menyatakan perbandingan (ratio) antara besarnya investasi dengan besarnya hasil produksi nasional.

Jadi bilamana COR itu 4, sedangkan kenaikan pendapatan nasional yang diinginkan ma adalah 5, maka besarnya investasi yang harus ditanamkan adalah $4 \times 5 = 20$

Perhitungan COR dapat dirumuskan

$$\text{COP} = \frac{K}{Q}$$

Dimana :

K : Jumlah investasi yang diperlukan.

Q : Besarnya hasil produksi nasional yang ingin dicapai dengan investasi tersebut

Apabila yang diperbandingkan itu adalah tambahan investasi dengan tambahan pendapatan, maka diperoleh ICOR.

$$\text{ICOR} = \frac{\Delta K}{\Delta Q}$$

Oleh karena itu maka :

- Untuk menghitung besarnya kapasitas produksi nasional digunakan COR.

$$\text{ICOR} = \frac{\Delta K}{\Delta Q}$$

$$Q = \frac{K}{\text{COR}}$$

- Untuk menghitung besarnya pertambahan kapasitas produksi nasional digunakan ICOR.

$$\text{ICOR} = \frac{\Delta K}{\Delta Q}$$

$$\Delta Q = \frac{\Delta K}{\text{ICOR}}$$

- Masalah besarnya penyusutan

Besarnya penyusutan dinyatakan dengan presentase (D). bilamana besarnya kapasitas produksi nasional pada suatu tahun adalah K,

maka besarnya penyusutan kapasitas produksi pada suatu tahun adalah DK. Pada akhir tahun itu juga kapasitas produksi nasional masyarakat yang baru adalah :

$$K - DK = (1 - D)K$$

Kapasitas produksi masyarakat itu pada tahun berikutnya bilamana tidak ada investasi baru dengan sendirinya adalah tetap, yakni $(1-D)K$. Jumlah hasil produksi dalam tahun berikutnya ini adalah Q dan

$$Q = \frac{(1-D)K}{COR}$$

Pada kelanjutannya bilamana dalam tahun berikutnya tadi terjadi penambahan investasi baru, maka penambahan kapasitas produksinya adalah $\Delta Q = \frac{\Delta K}{ICOR}$ dan jumlah kapasitas dalam dua tahun tersebut adalah :

$$Q1 = \frac{(1-D)K}{COR} + \frac{\Delta K}{ICOR}$$

Contoh :

Diketahui :

Dalam suatu perekonomian terdapat data sebagai berikut :

- 1) Pada awal tahun 1980 dalam perekonomian tersebut mempunyai peralatan kapital yang mampu menghasilkan output seharga Rp. 8.000 milyar.
- 2) Besarnya COR dan ICOR masing-masing 6 dan 5.
- 3) Dalam tahun 1970 itu terjadi gross investment Rp. 3.000 milyar.
- 4) Besarnya penyusutan ditapsir 10%.

Ditanyakan :

- 1) Besarnya kapasitas produksi nasional perekonomian tersebut, untuk tahun 1981 !
- 2) Besarnya penyusutan tahun 1981 !

Penyelesaian

- 1) Besarnya kapasitas produksi tahu 1981 :

$$Q_{81} = \frac{(1-D)K_0}{COR} + \frac{\Delta K}{ICOR}$$

$$K_0 = K \text{ tahun 1980}$$

$$Q_{80} = \frac{K}{COR}$$

$$8000 = \frac{K}{6}$$

$$\begin{aligned} K &= 6 \times \text{Rp. 8.000 milyar} \\ &= \text{Rp. 48.000 milyar} \end{aligned}$$

Jadi Kapasitas produksi nasional tahun 1981 :

$$\begin{aligned} Q_{81} &= \frac{(1-D)K_0}{COR} + \frac{\Delta K}{ICOR} \\ &= \frac{(1-10\%) 48000}{6} + \frac{3000}{5} \\ &= \text{Rp. 7.800 milyar} \end{aligned}$$

Besarnya penyusutan tahun 1981 :

$$\begin{aligned} K_{81} &= (1 - D) K_0 + \Delta K \\ &= (1 - 10\%) \text{Rp. 48.000} + \text{Rp. 3.000} . \\ &= \text{Rp. 46.200 milyar} \end{aligned}$$

Maka besarnya penyusutan tahun 1981

$$10\% \times \text{Rp. 46.200} = \text{Rp. 4.620 milyar}$$

$$COR \text{ tahun 1981} = \frac{46.200}{7.800} = 5,9$$

PELAKSANA-PELAKSANA INVESTASI

Apabila di lihat sisi siapa yang akan melaksanakan investasi, dapat dibedakan atas : (1) investasi pemerintah (2) investasi swasta dan (3) investasi pemerintah dan swasta. Ketiga unsur pelaksana investasi tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

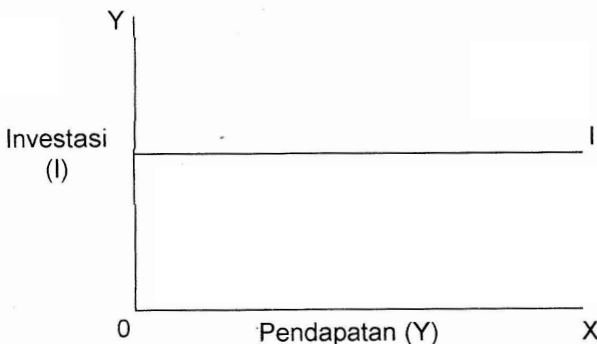
Investasi Pemerintah (Public Investment)

Investasi pemerintah ini umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan bendungan dan lain-lain. Investasi-investasi itu sering disebut Social Overhead Capital (SOC).

Keuntungan bagi investasi-investasi ini baru terasa bilamana timbula pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif, juga menaikkan pendapatan.

Public investment ini sering juga disebut sebagai investasi yang otonom, yaitu investasi yang timbul bukan karenanya adanya tambahan pendapatan. Investasi ini tidak menarik bagi swasta, karena investasi ini memerlukan biaya yang sangat besar, dan investasi ini tidak memberikan keuntungan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam beberapa tahun.

Adapun bentuk kurva autonomous investment terlihat dalam Gambar 3.5 berikut ini.



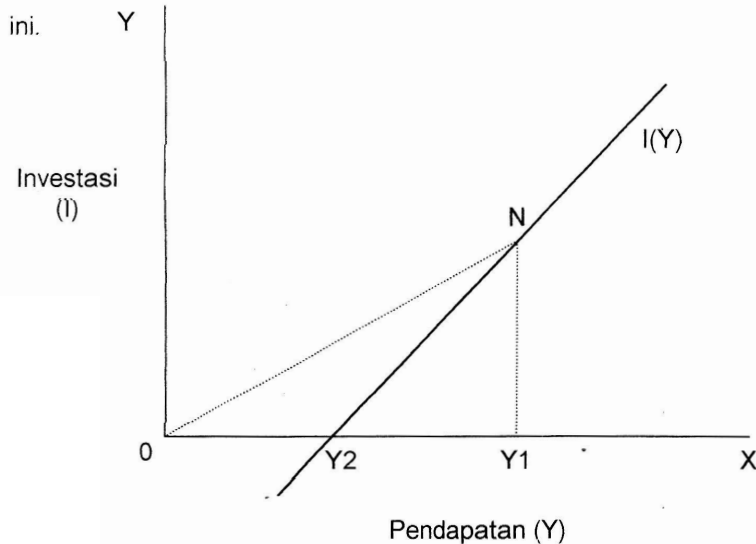
Gambar 3.5 Bentuk Kurva Autonomous Investment

Berdasarkan Gambar 3.5, besar kecilnya investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi dapat berubah oleh karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. sekalipun investasi ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi akibat dari tingkat pendapatan dalam masyarakat.

Investasi Swasta (*private investment*)

Private investment adalah jenis investasi yang dilakukan swasta dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan dan diring oleh karena adanya pertambahan pendapatan. Oleh sebab itu apabila pendapatan bertambah konsumsi bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi swasta ini juga disebut induced investment. Induced investment adalah suatu investasi yang ditimbulkan oleh sebab bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan.

Adapun bentuk kurva induced investment terlihat Gambar 3.6 berit



Gambar 3.6 Bentuk Kurva Induced Investment

Berdasarkan Gambar 3.6 di atas investasi diletakkan pada sumbu tegak, sedang sumbu datar untuk menyatakan pendapatan. Fungsi

investasi adalah $I(Y)$, dimana fungsi ini menyatakan tingginya tingkat investasi terimbas pada berbagai tingkat pendapatan.

Fungsi investasi ini naik dari kiri ke bawah ke kanan atas, dan mulai dari suatu tingkat pendapatan tertentu. Fungsi investasi $I(Y)$, itu juga dilukiskan sedemikian rupa, sehingga memotong sumbu Y dari bawah, hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa terdapat investasi negatif. Pada suatu tingkat pendapatan yang rendah. Dengan perkataan lain rendah tingkat pendapatan nasional (kurang atau sama dengan OY_2) justru akan membawa bencana bagi kehidupan mereka di masa depan.

Investasi Pemerintah Dan Swasta

Jenis investasi yang dilakukan oleh publik dan swasta adalah investasi luar negeri (foreign investment). Foreign investment terjadi dari selisih antara export di atas import. Induced investment dalam hal ini adalah disebabkan oleh perkembangan ekonomi di luar negeri. Jadi sifat induced investment adalah suatu investasi karena adanya pertambahan pendapatan.

Investasi dalam jenis ini sangat memungkinkan dikembangkan dalam era globalisasi ekonomi di mana batas-batas wilayah ekonomi suatu negara menjadi tidak jelas. Masalahnya sekarang adalah bagaimana tiap-tiap negara dapat memberi rangsangan agar investasi asing masuk.

BAB : V

ANALISA PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP SEDERHANA

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan :

- Hakekat perekonomian tertutup sederhana.
 - Fungsi konsumsi, APC dan MPC.
 - Fungsi saving, APS dan MPS.
 - Hubungan antara MPC, MPS, APC dan APS
 - Pendapatan Nasional ekuilibrium
 - Arti dan Proses bekerjanya angka pengganda (multiplier).
 - Inflationary Gap (IG) dan Deflationary Gap (DG)
-

HAKEKAT TENTANG PERKEMBANGAN TERTUTUP SEDERHANA

Yang dimaksud dengan *perekonomian tertutup* adalah suatu perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain.

Dalam perekonomian semacam ini kita tidak akan menjumpai persoalan-persoalan yang timbul dari adanya transaksi-transaksi ekonomi luar negeri, seperti ekspor dan import.

Sedangkan istilah *sederhana* disini kita gunakan sekedar untuk menunjukkan bahwa perekonomian yang diberi predikat sederhana tersebut tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian bentuk perekonomian yang akan kita bahas adalah perekonomian tanpa hubungan ekonomi dengan negara lain dan tanpa adanya transaksi ekonomi oleh pemerintah.

Di dalam perekonomian tertutup sederhana ini pengeluaran masyarakat pada tiap tahunnya, atau pada tiap satuan waktunya, akan terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi. Pengeluaran total dari masyarakat tersebut, sekaligus merupakan pendapatan masyarakat itu juga. Dengan cara lebih singkat, pernyataan tersebut dapat ditulis :

$$Y = C + I$$

Dimana :

Y : Menunjukkan besarnya pendapatan nasional per tahunnya

C : Menunjukkan besarnya konsumsi rumah tangga per tahun.

I : Besarnya investasi per tahun.

Dalam analisis sederhana tentang pendapatan nasional ini, investasi kita pandang sebagai suatu variabel yang eksogen. Yang dimaksud dengan variabel yang tidak diuraikan oleh model yang kita gunakan, melainkan merupakan variabel-variabel yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar modal yang digunakan. Jadi dengan kata lain, semua nilai dan pada variabel yang eksogen kita anggap sebagai datum, atau sebagai suatu variabel yang nilainya tidak kita cari asalnya.

FUNGSI KONSUMSI APC DAN MPC

Dalam bentuknya yang umum, fungsi konsumsi yang merupakan garis lurus (liner) mempunyai persamaan sebagai berikut :

$$C = a + cY$$

Dimana :

- a : Menunjukkan besarnya konsumsi pada pendapatan nasional sebesar nol.
- c : Menunjukkan besarnya Marginal Propensity to Consume. Sedangkan MPC adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional.

Adapun MPC tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$c = MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

Dimana :

- c : MPC
- ΔC : Besarnya perubahan konsumsi
- ΔY : Besarnya perubahan pendapatan

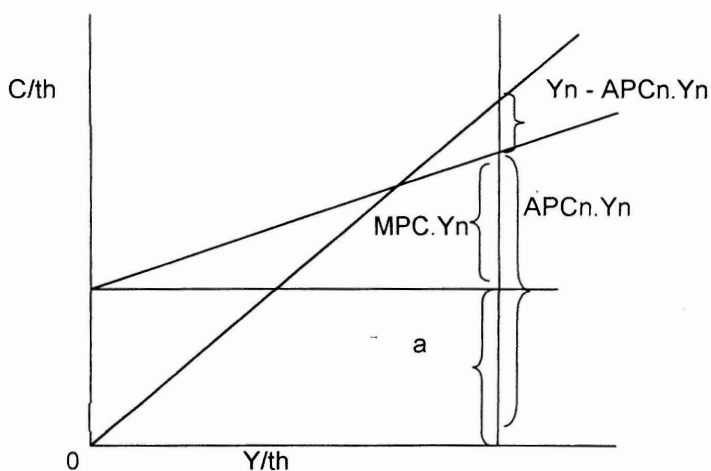
Besarnya angka MPC itu umumnya lebih kecil dari satu, akan tetapi lebih besar dari setengah. Dan yang lebih pasti angka MPC itu mempunyai tanda positif. Positifnya PMC mengandung arti bahwa bertambahnya pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya konsumsi. Angka MPC yang lebih kecil dari satu, menunjukkan bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seluruhnya dipergunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian disisihkan untuk ditabung. Angka MPC yang lebih besar dari setengah menunjukkan bahwa penggunaan tambahan pendapatan sebagai besar digunakan untuk menambah besarnya konsumsi, sedangkan sisanya, yaitu yang jumlahnya lebih kecil, akan merupakan tambahan sebagai berikut :

$$C = (APC_n - MPC)Y_n + MPC.Y$$

APC_n menunjukkan besarnya APC pada tingkat pendapatan nasional n . yang di maksud dengan APC adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya pendapatan nasional itu sendiri. Apabila dirumuskan akan terlihat dalam formula berikut :

$$APC_n = \frac{C_n}{Y_n}$$

Adapun pembuktian perumusan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 5.1 Menemukan Persamaan Fungsi Konsumsi

Berdasarkan Gambar 4.1. di atas maka :

$$\begin{aligned} a &= Y_n - MPC \cdot Y_n - (Y_n - APC_n \cdot Y_n) \\ &= Y_n - MPC \cdot Y_n - Y_n + APC_n \cdot Y_n \\ &= APC_n Y_n - MPC \cdot Y_n \\ a &= (APC_n - MPC) \cdot Y_n \end{aligned}$$

Dengan demikian, maka :

$$C = (APC - MPC) Y_n + MPC \cdot Y$$

Contoh Soal :

Diketahui :

Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar Rp. 100 milyar besarnya konsumsi sebesar Rp. 95 milyar pertahun.

Pada tingkat pendapatan nasional sebesar Rp. 120 milyar per tahun, besarnya konsumsi per tahunnya Rp. 110 milyar per tahun.

Ditanyakan :

- Cari fungsi konsumsinya !
- Break-even point tercapai pada tingkat pendapatan nasional berapa ?

Penyelesaian :

$$a. APC_{100} = \frac{C_{100}}{Y_{100}} = \frac{95}{100} = 0,95$$

$$APC_{120} = \frac{C_{120}}{Y_{120}} = \frac{110}{120}$$

Besarnya MPC

$$\begin{aligned} C &= (APC_n - MPC) \cdot Y_n + MPC \cdot Y \\ &= (0,95 - 0,75) \cdot 100 + 0,75 \\ &= 0,20 \cdot 100 + 0,75 Y \\ C &= 20 + 0,75 Y \end{aligned}$$

- Tingkat break even dicapai pada :

$$Y = C$$

$$Y = 20 + 0,75 Y$$

$$Y = 0,75 Y = 20$$

$$0,25 Y = 20$$

$$\Delta Y = 80$$

Kesimpulan :

- a. Persamaan fungsi konsumsinya adalah :

$$C = 0,75Y + 20 \text{ milyar rp}$$

- b. Tingkat pendapatan break-even :

80 milyar rp

FUNGSI SAVING, APS DAN MPS

Saving adalah bagian dari pada pendapatan nasional per tahunnya yang tidak dikonsumsi.

$$S = Y - C$$

$$C = a + cY$$

Maka :

$$S = Y - (a + cY)$$

$$= Y - a - cY$$

$$S = (1 - c)Y - a$$

Yang dimaksud dengan Marginal Propensity to Save (MPS) adalah perbandingan antara bertambahnya saving dengan bertambahnya pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya saving di maksud, sedang penerusnya adalah :

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

Yang dimaksud dengan Average Propensity to Save (APS) adalah perbandingan antara besarnya saving pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya pendapatan nasional bersangkutan. Sedang perumusannya adalah sebagai berikut :

$$APS_n = \frac{S_n}{Y_n}$$

HUBUNGAN ANTARA MPC, MPS, APC DAN APS

Hubungan antara MPC dan MPS dapat kita nyatakan sebagai berikut :

$$MPC + MPS = 1$$

Pembuktian dari rumus di atas :

$$Y = C + S$$

Maka :

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta S$$

Kalau ruas kanan dan kiri kita bagi ΔY , maka :

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C + \Delta S}{\Delta Y}$$

$$1 = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

$$1 = MPC + MPS \text{ (terbukti)}$$

Sedangkan hubungan antara APC dan APS adalah :

$$APC + APS = 1$$

Pembuktian dari rumus di atas :

$$y = C + S$$

Ini berarti $Y_n = C_n + S_n$

Kalau ruas dari kiri masing-masing dibagi Y_n , maka :

$$\frac{Y_n}{Y_n} = \frac{C_n + S_n}{Y_n}$$

$$1 = \frac{C_n}{Y_n} + \frac{S_n}{Y_n}$$

$$1 = APC_n + APS_n$$

$$1 = APC + APS \text{ (terbukti)}$$

Penerapannya Dalam Contoh Soal :

Diketahui :

Fungsi konsumsi suatu masyarakat merupakan persamaan :

$$C = 0,75Y + 20 \text{ milyar rp}$$

Ditanyakan :

Hitung besarnya C, S, MPC, APS, MPC dan MPS untuk pendapatan-pendapatan sebagai berikut :

20, 40, 60, 80, 100, 120 dan 140 dalam milyar rp

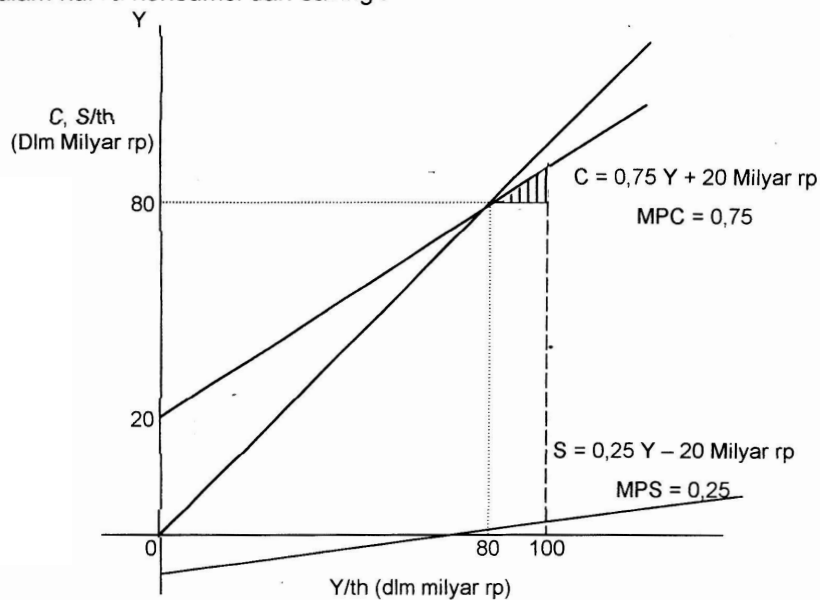
Penyelesaian

Tabel 4.1. Hubungan Y, C, S, APC, APS, MPC dan MPS

Pendapatan (Y)	Konsumsi (C)	Saving (S)	APC (C/Y)	APS (S/Y)	MPC	MPS
0	20	-20	-	-	0.75	0.25
20	35	-15	1.75	-0.75	0.75	0.25
40	50	-10	1.25	-0.25	0.75	0.25
60	65	-5	1 1/12	-1/12	0.75	0.25
80	80	0	1	0	0.75	0.25
100	95	5	0.95	0.05	0.75	0.25
120	110	10	11/12	1/12	0.75	0.25
140	125	15	25/28	3/28	0.75	0.25

Angka-angka dalam milyar rp

Dari jawaban contoh di atas juga dapat digambarkan bentuknya dalam kurva konsumsi dan saving :



Gambar 5.2 Kurva Konsumsi dan Saving

PENDAPATAN NASIONAL EKUILIBRIUM

Apabila dilihat dari sisi sumbernya, pendapatan nasional terdiri dari konsumsi dan investasi. Jadi $C + I = Y$. Sedangkan apabila dilihat dari sisi penggunaannya, pendapatan nasional sebagian dipergunakan untuk pengeluaran konsumsi, sedangkan selebihnya adalah merupakan saving, sehingga $Y = C + S$.

Apabila pendapatan dalam periode 0 digunakan dalam periode 1, pendapatan nasional pada periode 0 digunakan untuk periode 1, pendapatan periode 1 digunakan untuk periode 2, demikian seterusnya, maka hubungan konsumsi, investasi, saving dan pendapatan nasional dapat dilukiskan sebagai berikut :

$$C_0 + I_0 = Y_0$$

$$Y_0 = C_1 = S_1$$

$$C_1 + I_1 = Y_1$$

$$Y_1 = C_2 + S_2$$

$$C_2 + I_2 = Y_2$$

$$Y_2 = C_3 + S_3$$

$$C_3 + I_3 = Y_3$$

Yang dimaksud dengan pendapatan nasional ekuilibrium adalah tingkat pendapatan nasional di mana tidak ada kekuatan ekonomi yang mempunyai tendensi untuk mengubahnya. Pendapatan nasional dalam kesimbangan akan tercapai apabila dipenuhi syarat :

$$S = I$$

Terdapat tiga buah cara untuk menemukan formula untuk menghitung tingkat pendapatan nasional ekuilibrium.

Kedua cara itu adalah sebagai berikut :

Cara ke I :

$$Y = C + I$$

$$C = a + cY$$

Maka $Y = a + cY + I$

$$Y - cY = a + I$$

$$(1 - c) Y = a + I$$

$$Y = \frac{1}{1 - c} (a + I)$$

Cara ke II :

$$S = I$$

$$Y - C = I$$

$$Y - (a + cY) = I$$

$$Y - a - cY = a + I$$

$$(1 - c)Y = a + I$$

$$Y = \frac{1}{1 - c} (a + I)$$

Dengan demikian formula (rumus) untuk mencari pendapatan nasional keseimbangan adalah :

$$Y = \frac{1}{1 - c} (a + I)$$

Contoh soal

Diketahui :

Fungsi konsumsi per tahun :

$$C = 0,75 Y + 20 \text{ milyar rp}$$

Besarnya investasi per tahun

$$I = 40 \text{ milyar rp}$$

Ditanyakan :

- a. Hitung besarnya Y, C dan S dalam keseimbangan !
- b. Gambarkan !

Penyelesaian :

- a. Besarnya Y dalam keseimbangan :

$$Y = \frac{1}{1 - c} (a + I)$$
$$= \frac{1}{1 - 0,75} (20 + 40)$$

$$Y = 4 (60) = 240 \text{ milyar rp}$$

Besarnya konsumsi keseimbangan :

$$C = 0,75 Y + 20$$
$$= 0,75 (240) + 20$$

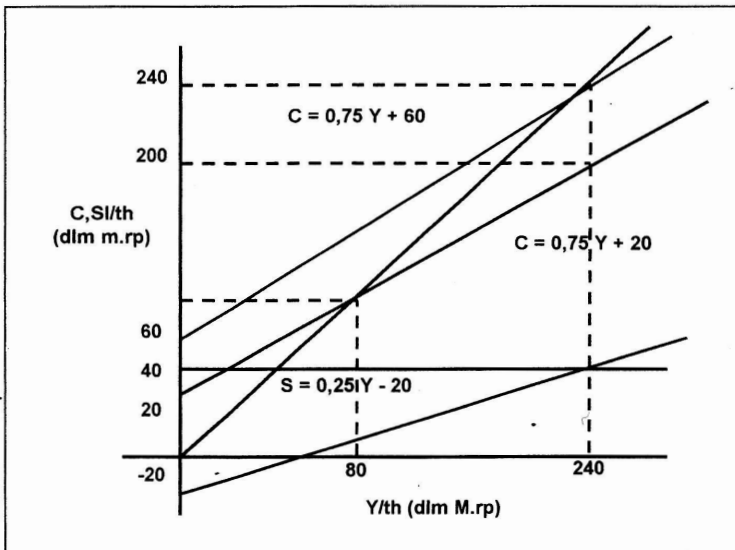
$$C = 200 \text{ milyar rp}$$

Besar saving keseimbangan :

$$S = Y - C$$
$$= 240 - 200$$

$$S = 40 \text{ milyar rp}$$

b. Gambarnya adalah :



Gambar 5.3 Keadaan Ekuilibrium

PENGERTIAN DAN PROSES BEKERJANYA MULTIPLIER

Apabila pada suatu ketika besarnya investasi tidak sama dengan besarnya saving, maka akan terjadilah ketidakseimbangan dalam perekonomian pendapatan nasional, pengeluaran konsumsi dan besarnya saving berada dalam keadaan disequilibrium. Pendapatan nasional besarnya akan terus berubah, sehingga tingkat pendapatan nasional ekuilibrium yang baru akan tercapai, yaitu pendapatan nasional di mana besarnya sama dengan besarnya investasi. Demikian juga dalam halnya dengan pengeluaran konsumsi dan saving. Hubungan antara perubahan investasi dan perubahan pendapatan nasional ekuilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi tersebut, diterangkan dalam konsep multiplier.

Multiplier adalah angka atau formula yang menunjukkan berapa kali lipat pendapatan nasional akan berubah sebagai akibat adanya perubahan investasi. Pendapatan lain mengatakan multiplier adalah bilangan dengan mana investasi harus kita kalikan, apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional ekuilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi tersebut.

Jadi kalau k menunjukkan besarnya multiplier, maka :

$$\Delta Y = k \cdot \Delta I$$

Dan besarnya multiplier :

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$$

Kalau misalnya tambahan investasi (ΔI), mengakibatkan pendapatan nasional berubah dari Y menjadi $Y + \Delta Y$, maka :

$$Y + \Delta Y = \frac{1}{1 - c} (a + I + \Delta I)$$

$$Y + \Delta Y = \frac{1}{1 - c} (a + I) + \frac{1}{1 - c} \Delta I$$

Kalau persamaan di atas ruas kanan dan kiri kita kurangi dengan Y , yang besarnya sama dengan $Y = \frac{1}{1-c} (a+I)$.

Maka hasilnya $\Delta Y = \frac{1}{1-c} \Delta I$

Jadi $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$ yaitu $K_1 = \frac{1}{1-c}$

Contoh soal

Diketahui :

Fungsi konsumsi tahunan

$$C = 0,75 + 20 \text{ milyar rp}$$

Pada periode ke-1, besarnya investasi $I = 40$ milyar rp

Pada periode ke-2 besarnya investasi $I = 80$ milyar rp

Ditanyakan :

1. Dengan menggunakan angka pengganda hitung besarnya pendapatan nasional ekuilibrium pada periode ke-2 !
2. Bagaimana proses multiplier berlangsung.
 - a) Secara angka-angka
 - b) Secara grafis

Penyelesaian :

1. Besarnya angka pengganda adalah :

$$K_1 = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

Besarnya perubahan investasi :

$$\Delta I = I_2 - I_1 = 80 - 40 = 40$$

PN keseimbangan pada periode 1 :

$$Y = \frac{1}{1-c} (a + I) = \frac{1}{0,25} (20 + 40) = 240$$

PN keseimbangan pada periode 2 :

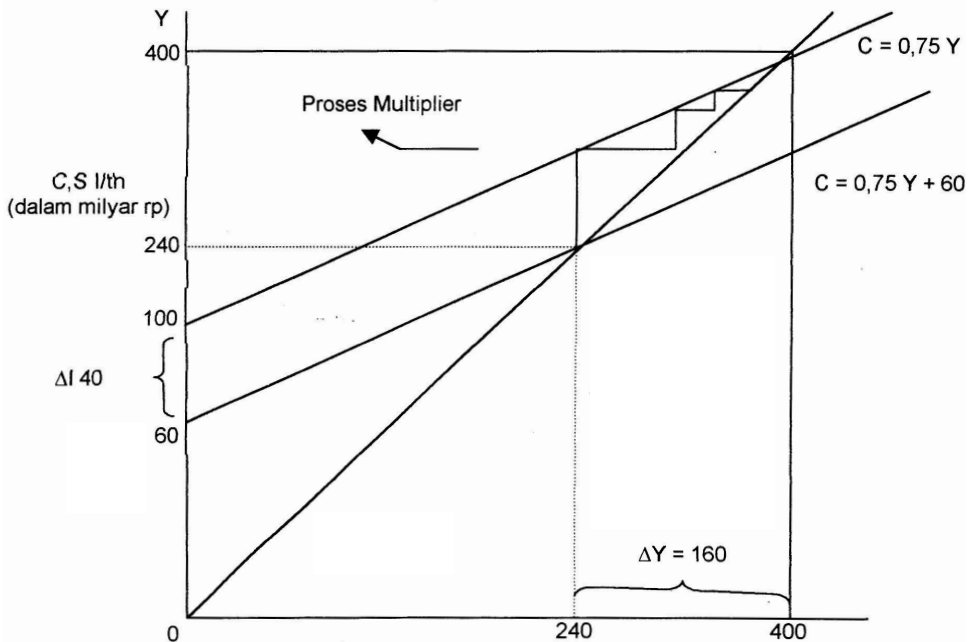
$$Y_2 = Y_1 + \Delta Y = Y_1 + K_1 \cdot \Delta I = 240 + 4 (40) = 400$$

2. a. Proses Multiplier Secara Angka-Angka

Tabel 4.2. Proses Multiplier Secara Angka-Angka

Periode	ΔI	ΔC	ΔY
I	40	-	40
II	-	30	30
III	-	22.50	22.50
IV	-	16.88	16.88
-			
-			
-			
n			
Jumlah	40	120	160

b. Proses Secara Grafis



Gambar 5.4 Proses Multiplier Secara Grafis

INFLATIONARY GAP DAN DEFLATIONARY GAP

Konsep tentang inflationary Gap dan deflationary Gap berkaitan dengan persoalan sejauh mana tingkat employment yang terjadi menyimpang dari kapasitas produksi yang ada. Dalam hal ini apabila semakin besar angka Inflationary Gap akan berarti semakin besar over employmentnya. Dan semakin besar angka deflationary gap-nya berarti semakin jauh tingkat employment berada dibawah tingkat full-employment, yang dengan perkataan lain, semakin besar tingkat pengangguran yang terjadi.

Yang dimaksud dengan infaltionelary Gap adalah besarnya perbedaan antara jumlah investasi yang terjadi dengan besarnya full employment saving (saving pada tingkat full employment saving). Sedangkan yang dimaksud dengan Deflationary Gap adalah angka yang menunjukkan besarnya perbedaan antara investasi yang terjadi dengan full-employment saving, dimana besarnya investasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan full employment savingnya.

Contoh soal tentang inflationary Gap dan Deflationary Gap adalah sebagai berikut :

Diketahui :

Fungsi konsumsi per tahun

$$C = 0,75 Y + 20 \text{ milyar rp}$$

Besarnya investasi per tahun :

$$I = 40 \text{ milyar rp}$$

Ditanyakan :

1. Hitung besarnya IG atau DG, kalau diketahui bahwa perekonomian mempunyai kapasitas produksi masing-masing per tahun.
 - a. 200 milyar rp
 - b. 280 milyar rp
2. Gambarkan bentuk kurvanya !

Penyelesaian :

1. a. Pada perekonomian yang kurang kapasitas produksi sebesar 200 milyar rp besarnya full-employment savingnya adalah :

$$\begin{aligned} S &= Y - C \\ &= Y - (0,75 Y + 20) \\ &= 200 - (0,75 \cdot 200 + 20) \\ &= 30 \text{ milyar} \end{aligned}$$

Oleh karena besarnya investasi $I = 40$ milyar rp, maka akan terjadi Inflationary Gap.

$$\begin{aligned} IG &= \text{investasi} - \text{full-employment saving} \\ &= 40 \text{ milyar rp} - 30 \text{ milyar rp} \\ &= 10 \text{ milyar rp} \end{aligned}$$

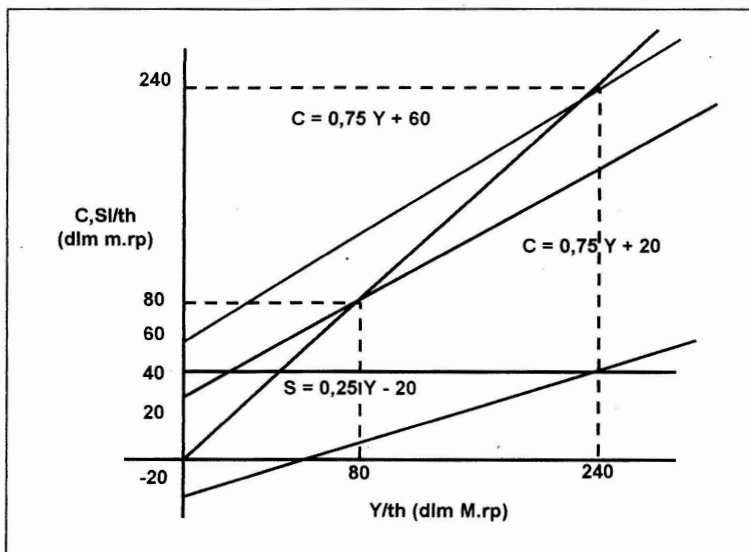
- b. Pada perekonomian yang mempunyai kapasitas produksi sebesar 280 milyar rp. Besarnya full-employment savingnya adalah :

$$\begin{aligned} S &= Y - C \\ &= Y - (0,75 Y + 20) \\ &= 280 - (0,75 \cdot 280 + 20) \\ &= 280 \text{ milyar rp} - 230 \text{ milyar rp} \\ &= 50 \text{ milyar rp} \end{aligned}$$

Oleh karena besarnya investasi $I = 40$ milyar rp. Maka akan terjadi Deflationary Gap.

$$\begin{aligned} DG &= \text{Full-employment saving} - \text{Investasi} \\ &= 50 \text{ milyar rp} - 40 \text{ milyar rp} \\ &= 10 \text{ milyar rp} \end{aligned}$$

2. Gambar adalah sebagai berikut :



Gambar 4.5 Proses Terjadinya IG dan DG

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas agar tidak dapat terjadi IG kapasitas produksi dapat ditingkatkan dari 200 milyar rop menjadi 240 milyar rp. Sedangkan agar tidak terjadi DG kapasitas produksi dapat diturunkan dari 280 milyar rp menjadi 240 milyar rp.

BAB : VI

ANALISA KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan :

- Masalah kebijakan fiskal.
 - Analisis kebijakan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana.
 - Pendapatan nasional ekuilibrium.
 - Macam-macam angka pengganda.
-

MASALAH KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal atau politik adalah segala kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja negara.

Anggaran belanja (budget) negara adalah suatu anggaran yang disusun oleh pemerintah mengenai pendapatan-pendapatan atau penerimaan-penerimaan negara serta pengeluaran-pengeluaran negara yang disusun selama masa tertentu, biasanya satu tahun.

Dalam hubungannya dengan kebijakan anggaran belanja negara, terdapat tiga fungsi pokok, yaitu :

- *Fungsi Alokasi.*

Berdasarkan fungsi ini, kebijakan anggaran belanja diarahkan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam

masyarakat sedemikian rupa, sehingga kebutuhan masyarakat akan apa yang disebut public goods. Tanpa adanya prakarsa dari pemerintah dalam hal ini kecil kemungkinannya masyarakat dapat memenuhi secara cukup kebutuhan-kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan dan lain-lain.

- *Fungsi Distribusi*

Fungsi distribusi ini mempunyai tujuan demi terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang relatif lebih adil. Kenyataan menunjukkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan ini sering kali menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

- *Fungsi Stabilisasi*

Fungsi Stabilisasi ini antara lain bertujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Kenyataan ini menunjukkan, bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun terus mengalami peningkatan. Ini berarti bahwa peranan dari pada tindakan fiskal pemerintah dalam ikut menentukan tingkat pendapatan nasional menjadi besar.

Untuk negara yang sudah maju perekonomiannya, semakin besarnya peranan tindakan fiskal pemerintah dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti banyak pengangguran, inflasi dan sebagainya.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat. Hal ini disebabkan masih sangat rendahnya tingkat

pendapatan masyarakat sehingga upaya untuk menghimpun dana guna investasi juga terbatas. Oleh sebab itulah, maka tanpa campur tangan pemerintah kecil kemungkinan suatu perekonomian yang masih terbelakang dapat melaksanakan investasi neto yang cukup besar, untuk mempertinggi kapasitas produksi nasional demi kemakmuran masyarakatnya. Dari seluruh uraian di atas dapat kita pahami betapa besarnya peranan kebijakan fiskal pemerintah bagi masyarakat yang ingin memajukan perekonomiannya.

Pada dasarnya terdapat dua komponen besar dari pada anggaran belanja yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran.

Komponen Anggaran Belanja Negara

Komponen anggaran belanja terdiri atas komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Sedangkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- Penerimaan, yang dalam buku ini kita asumsikan hanya terdiri dari pada hasil penerimaan pajak.
- Pengeluaran, yang dilakukan pemerintah terdiri atas :
 - Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa disebut *government expenditure*.
 - Pengeluaran pemerintah yang berupa *government transfer*.

Pajak dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah dimana terdapat penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Alasan mengapa kita katakan tidak ada balas jasa yang langsung diterima oleh si pembayar pajak adalah karena bagaimanapun juga bentuk dari pada pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah, masyarakat tentu akan memperoleh jasa-jasa juga hanya saja, balas jasa yang diterima oleh si pembayar pajak sifatnya adalah tidak langsung.

Seorang wajib pajak (pembayaran pajak) pendapatan, misalnya dari pembayaran pajak tersebut si pembayar pajak tidak memperoleh

sesuatu apapun dari pemerintah. Akan tetapi mengingat bahwa hasil pungutan pajak oleh pemerintah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat dimana termasuk wajib pajak.

Agar penerimaan pajak bisa berfungsi optimal, diperlukan kesadaran wajib pajak sebagai suatu warga negara yang baik. sedangkan pada sisi yang lain diperlukan aparat pajak yang bersih dari unsur kolusi dan korupsi.

Apabila dua hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, masyarakat akan dapat menikmati semua kebutuhan hidupnya dengan baik, khususnya berkaitan dengan berbagai prasarana kehidupan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang dimaksudkan adalah semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Contohnya pemerintah membayar gaji PNS yang bersangkutan. Suatu harapan dari masyarakat adalah semua macam-macam pengeluaran pemerintah tersebut, secara langsung atau tidak langsung nantinya akan diperoleh manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan per satuan waktu ditandai dengan symbol G.

Di damping itu terdapat pengeluaran yang kita sebut foverment transfer, yaitu pengeluaran pemerintah tanpa balas jasa langsung. Adapun beberapa contoh dari pada transfer pemerintah adalah :

- Sumbangan pemerintah yang diberikan kepada kaula negara yang menderita sebagai akibat dari pada adanya bencana alam.
- Sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada para penganggur.
- Uang pensiun yang diterima oleh para pegawai negeri yang telah pensiun.
- Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan.
- Bea siswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa dan sebagainya.

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN SEDERHANA

Fungsi Konsumsi dan Saving Dengan Adanya Tindakan Fiskal Pemerintah.

Setelah adanya tindakan fiskal pemerintah pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional sebagai *earning*, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*).

Pendapatan nasional sebagai *earning*, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu, sebagai balas jasa atas faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam membentuk produk nasional.

Apabila Y_D menunjukkan besarnya *disposable income*, Tr menunjukkan besarnya transfer pemerintah dan T_x menunjukkan besarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah, maka secara matematik sebagai berikut :

$$Y_D = Y + Tr + T_x$$

Dengan mendasarkan, bahwa besar kecilnya konsumsi suatu masyarakat dalam analisis sekarang tidak lagi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional sebagai *earning*, melainkan tergantung kepada besar kecilnya *disposable income*, maka fungsi konsumsi yang berlaku untuk perekonomian tanpa adanya tindakan pemerintah tidak lagi dapat dipergunakan.

Untuk perekonomian yang mengenal adanya tindakan fiskal pemerintah fungsi konsumsi mempunyai persamaan :

$$C = a + cY_D$$

Dimana :

$$Y_D = Y + Tr - T_x$$

Sedangkan fungsi saving dapat kita temukan dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} S &= Y_D - C \\ &= Y_D - (a + cY_D) \\ &= Y_D - a - cY_D \\ &= (1 - c) Y_D - a \end{aligned}$$

Dengan demikian persamaan fungsi saving adalah sebagai berikut :

$$S = (1 - c) Y_D - a$$

Mengingat bahwa :

$$Y_D = Y + Tr - Tx$$

Maka :

Persamaan fungsi konsumsi dapat ditulis :

$$C = a + c (Y + Tr - Tx)$$

Atau

$$C = a + c Y + c Tr - c Tx$$

Dan fungsi savingnya dapat ditulis :

$$\begin{aligned} S &= (1 - c) (Y + Tr - Tx) - a \\ &= s Y + s Tr - s Tx - a \end{aligned}$$

Catatan :

S = Marginal Propensity to Save (MPS)

Contoh soal :

Diketahui :

Fungsi Konsumsi $C = 0,75 Y_D + 20 \text{ M.rp}$

Transfer Pemerintah $Tr = 40 \text{ M.rp}$

Pajak $Tx = 20 \text{ M.rp}$

Ditanyakan :

1. Carilah persamaan fungsi konsumsi
2. Carilah fungsi saving sesudah Tr dan Tx
3. Gambarkan pertanyaan no. 1 dan 2 di atas !

Penyelesaian :

1. a. Persamaan fungsi konsumsi sebelum Tr dan Tx

$$\begin{aligned}C &= 0,75 Y_D + 20 \\&= 0,75 (Y + Tr - Tx) + 20 \\&= 0,75 (Y + 0 + 0) + 20 \\C &= 0,75 Y + 20 \text{ M.rp}\end{aligned}$$

- b. Persamaan fungsi konsumsi sesudah Tr sebelum Tx

$$\begin{aligned}C &= 0,75 Y_D + 20 \\&= 0,75 (Y + Tr - Tx) + 20 \\&= 0,75 Y + 50 \text{ M.rp}\end{aligned}$$

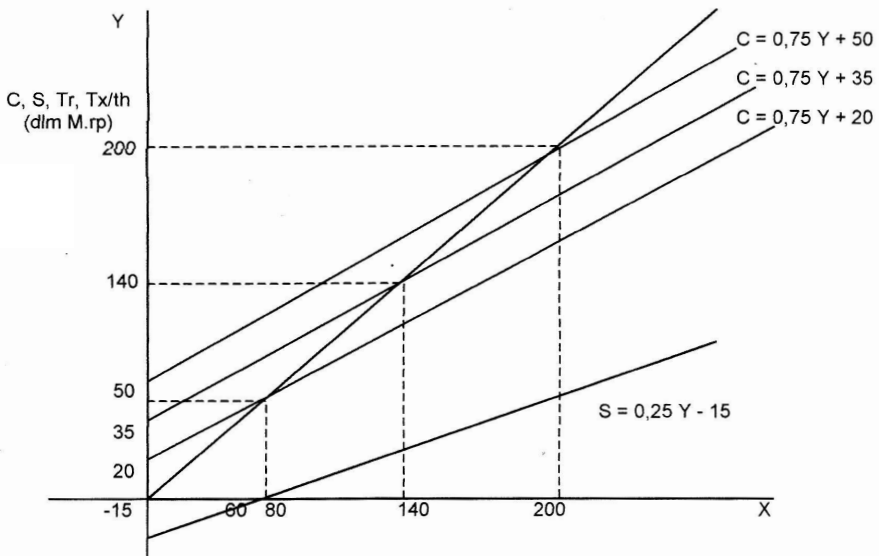
- c. Persamaan fungsi konsumsi sesudah Tr dan Tx

$$\begin{aligned}C &= 0,75 Y_D + 20 \\&= 0,75 (Y + Tr - Tx) + 20 \\&= 0,75 (Y + 40 + 20) + 20 \\C &= 0,75 Y + 35 \text{ M.rp}\end{aligned}$$

2. Persamaan fungsi saving sesudah Tr dan Tx

$$\begin{aligned}S &= (1 - c) (Y + Tr - Tx) - a \\&= (1 - 0,75) (Y + 40 - 20) - 20 \\&= 0,25 Y - 15 \text{ M.rp}\end{aligned}$$

3. Gambar adalah sebagai berikut



Gambar 6.1 Fungsi Konsumsi dan Saving Setelah Kebijakan Fiskal

PENDAPATAN NASIONAL EKUILIBRIUM

Pendapatan nasional dengan adanya tindakan fiskal oleh pemerintah terdiri dari pengeluaran konsumsi (C), pengeluaran investasi (I), pengeluaran konsumsi pemerintah (G). Keterangan di atas kalau diformulasikan adalah sebagai berikut :

$$C = C + I + G$$

Dari pendapatan ini oleh penerima pendapatan sebagian dipergunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Akan tetapi sebaliknya pemerintah memberikan kepada orang-orang atau badan hukum tanpa mengharapkan balas jasa yang berlangsung tanpa ini disebut dengan transfer pemerintah (Tr). Dengan demikian maka besarnya disposable income (Y_D) sama dengan besarnya pendapatan nasional (Y) ditambah transfer pemerintah (Tr) dikurangi besarnya pajak (Tx). Dan secara matematik adalah :

$$Y_D = Y + Tr - Tx$$

Dari persamaan di atas kita dapat menurunkan persamaan ;

$$Y = Y_D - Tr + Tx$$

Mengingat disposable income itulah yang dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya untuk saving, maka dapat ditulis :

$$Y_D = C + S$$

Kalau berbagi analisa di atas kita kumpulkan, maka :

$$C = C + I + G$$

$$Y = Y_D - Tr + Tx$$

$$Y_D = Y + Tr - Tx$$

Maka :

$$C + I + G = Y_D - Tr + Tx$$

Atau

$$C + I + G = C + S - Tr + Tx$$

Dengan demikian, maka :

$$I + G + Tr = S + Tx$$

Formula Menemukan pendapatan Nasional Ekuilibrium

Ada dua cara untuk menurunkan formula yang dapat dipergunakan untuk menemukan besarnya pendapatan nasional ekuilibrium. Kedua cara yang dimaksud adalah :

Cara Ke 1

Dengan mempergunakan perumusan-perumusan dasar :

$$Y = C + I + G$$

$$C = a + cY_D$$

$$Y_D = Y + Tr - Tx$$

Maka :

$$Y = C + I + G$$

$$= a + cY_D + I + G$$

$$\begin{aligned} &= a + c(Y + Tr - Tx) + I + G \\ &= a + cY + cTr - cTx + I + G \\ Y - cY &= a + cTr - cTx + I + G \\ (1 - c)Y &= a + cTr - cTx + I + G \\ Y &= \frac{a + cTr - cTx + I + G}{1 - c} \end{aligned}$$

Cara Ke 2 :

Dengan mempergunakan persamaan :

$S + Tx = G + Tr + I$, maka akan diperoleh rumus yang sama :

$$\begin{aligned} S + Tx &= G + Tr + I \\ Y_D - C + Tx &= G + Tr + I \\ Y_D - (a + cY_D) + Tx &= G + Tr + I \\ (Y + Tr - Tx) - \{a + c(Y + Tr - Tx)\} + Tx &= G + Tr + I \\ Y + Tr - Tx - a - cY - cTr + cTx + Tx &= G + Tr + I \\ Y - cY = -Tr + Tx + a + CTr - cTx - Tx &= G + Tr + I \\ (1 - c)Y &= a + cTr - cTx + G + I \\ Y &= \frac{a + cTr - cTx + I + G}{1 - c} \end{aligned}$$

Contoh soal :

Diketahui :

Fungsi Konsumsi $C = 0,75 Y_D + 20 \text{ M.rp}$

Investasi $I = 40 \text{ M.rp}$

Pajak $T_x = 20 \text{ M.rp}$

Konsumsi pemerintah $G = 60 \text{ M.rp}$

Transfer pemerintah $Tr = 40 \text{ M.rp}$

Ditanyakan :

Berdasarkan data di atas, cari besarnya !

1. Pendapatan nasional keseimbangan !
2. Konsumsi keseimbangan !
3. Saving keseimbangan !

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{1-c} (a - cTx + cTr + G + I) \\ &= \frac{1}{1-0,75} (20 - 0,75.20 + 0,75.40 + 60 + 40) \\ &= 4 \times (20 - 15 + 30 + 60 + 40) \\ Y &= 540 \text{ M.rp} \end{aligned}$$

2. Konsumsi dalam ekuilibrium :

$$\begin{aligned} C &= 0,75 Y_D + 20 \\ &= 0,75 (Y + Tr - Tx) + 20 \\ &= 0,75 (560) + 20 \\ C &= 440 \text{ M.rp} \end{aligned}$$

3. Saving dalam keseimbangan :

$$\begin{aligned} S &= Y_D - C \\ &= (Y + Tr - Tx) - C \\ &= (540 + 40 + 20) - 440 \\ S &= 120 \text{ M.rp} \end{aligned}$$

Pencocokan :

$$\begin{aligned} S + Tx &= IG + Tr \\ 120 + 20 &= 40 + 60 + 40 \\ 140 &= 140 \end{aligned}$$

MACAM-MACAM ANGKA PENGGANDA

Dalam perekonomian tertutup sederhana, kita mengenal satu macam angka pengganda, yaitu angka pengganda investasi yang bisa disebut *investment multiplier*. Akan tetapi dalam perekonomian yang melibatkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, kita mengenal macam-macam angka pengganda, yaitu :

- Angka pengganda investasi

- Angka pengganda konsumsi
- Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah.
- Angka pengganda transfer pemerintah.
- Angka pengganda pajak.
- Angka pengganda anggaran belanja yang seimbang.

Secara garis besar, masing-masing angka pengganda akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Angka Pengganda Investasi

Yang dimaksud dengan angka pengganda investasi adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi.

Adapun formulanya adalah sebagai berikut :

$$K_1 = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{MPS}$$

Cara untuk menurunkan formula angka pengganda investasi adalah sebagai berikut :

Apabila investasi bertambah dari sebesar 1 per tahun menjadi $(I + \Delta I)$ per tahun, dan perubahan ini mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dari semula setinggi Y per tahun berubah menjadi $(Y + \Delta Y)$ pertahun, maka kalau kita lihat secara aljabar sebagai berikut :

Sebelum adanya perubahan investasi :

$$Y = \frac{a + cTr - cTx + I + G}{1 - c}$$

Sesudah adanya perubahan investasi :

$$Y + \Delta Y = \frac{a + cTr - cTx + (I + \Delta I) + G}{1 - c}$$

$$Y + \Delta Y = \frac{a + cTr - cTx + I + G}{1 - c} + \frac{\Delta I}{1 - c}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta I}{1 - c}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-c}$$
$$K_1 = \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-c}$$

Angka Pengganda Konsumsi

Yang dimaksud dengan angka pengganda konsumsi adalah angka perbandingan antara tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan perubahan jumlah pengeluaran konsumsi masyarakat yang mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium tersebut.

Adapun formula angka pengganda konsumsi adalah sebagai berikut :

$$K_c = \frac{\Delta Y}{\Delta a} = \frac{1}{1-c}$$

Cara menurunkan adalah :

Apabila fungsi konsumsi bergeser dengan jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat disposable income sebesar nol berubah dari semula sebesar a menjadi sebesar $(a + \Delta a)$ mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar $(Y + \Delta Y)$, maka ini berarti sebelum adanya pergeseran fungsi konsumsi :

$$Y = \frac{a + cTr - cTx + I + G}{1-c}$$

Sesudah fungsi konsumsi bergeser sejauh Δa :

$$Y + \Delta Y = \frac{a + \Delta a + cTr - cTx + I + G}{1-c}$$

$$Y + \Delta Y = \frac{a + \Delta a + cTr - cTx + I + G}{1-c} + \frac{\Delta a}{1-c}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta a}{1-c}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta a} = \frac{1}{1-c}$$
$$K_0 = \frac{\Delta Y}{\Delta a} = \frac{1}{1-c}$$

Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Yang dimaksud dengan angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah atau government exoenditure multiplier adalah nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat dari pada berubahnya jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengakibatkan pendapatan nasional tersebut.

Adapun formula angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah adalah :

$$K_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-c}$$

Prinsip dasar menurunkan formula ini sama dengan angka pengganda di atas.

Angka Pengganda Transfer Pemerintah

Yang dimaksud dengan angka pengganda transfer pemerintah atau government transfer multiplier adalah nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat dari pada berubahnya jumlah transfer pemerintah dengan berubahnya jumlah transfer pemerintah dengan berubahnya jumlah transfer pemerintah yang mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium tersebut.

Adapun formula angka pengganda pengeluaran transfer pemerintah :

$$K_{Tr} = \frac{\Delta Y}{\Delta Tr} = \frac{c}{1-c}$$

Prinsip dasar menurunkan formula ini sama dengan angka pengganda di atas.

Angka Pengganda Pajak

Yang dimaksud dengan angka pengganda pajak adalah nilai perbandingan antara perubahan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan perubahan jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang menyebabkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium tersebut.

Adapun formula angka pengganda pajak adalah :

$$K_{Tx} = \frac{\Delta Y}{\Delta T_x} = \frac{-c}{1-c}$$

Prinsip dasar menurunkan formula ini sama dengan angka pengganda di atas.

Angka Pengganda Anggaran Belanja Yang Seimbang

Yang dimaksud dengan angka pengganda belanja yang seimbang adalah angka pengganda yang kita gunakan untuk mengalikan perubahan government expenditure yang dibarengi oleh berubahnya pajak dengan jumlah yang sama untuk menemukan perubahan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium yang terjadi.

Adapun formalnya adalah sebagai berikut :

$$K_B = \frac{\Delta Y}{\Delta G = \Delta T_x} = 1$$

Prinsip dasar menurunkan formula ini sama dengan angka pengganda di atas.

Contoh Soal 1

Diketahui :

- Periode sebelum 1982.
 - Besarnya investasi : $I = 40$ M.rp per tahun
 - Konsumsi pemerintah : $G = 60$ M.rp per tahun
 - Transfer pemerintah : $Tr = 40$ M.rp per tahun
 - Pajak : $T_x = 20$ M.rp per tahun

- Periode sesudah tahun 1981.
 - Investasi : $I = 50$ M.rp per tahun.
 - Konsumsi pemerintah : $G = 30$ M.rp per tahun
 - Transfer pemerintah : $Tr = 60$ M.rp per tahun
 - Pajak : $Tx = 40$ M.rp per tahun
- Fungsi Konsumsi :
 $C \text{ per tahun} = 0,75 Y_D = 20$ M.rp

Ditanyakan :

Dengan menggunakan angka-angka pengganda hitunglah besarnya pendapatan nasional ekuilibrium, konsumsi dan saving ekuilibrium untuk periode sesudah tahun 1981.

Penyelesaian :

- Pendapatan nasional ekuilibrium sebelum tahun 1982 (yaitu periode 1) :

$$Y_1 = \frac{1}{1-0,75} (20 - 0,75 \times 20 + 0,75 \times 40 + 60 + 40)$$

- Konsumsi ekuilibrium dan saving ekuilibrium sebelum tahun 1982 (yaitu periode 1) :

$$\begin{aligned} C_1 &= 0,75 Y_D + 20 \text{ M.rp} \\ &= 0,75 (540 + 40 - 20) + 20 \\ &= 0,75 \times 560 + 20 = 440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= Y_D - C \\ &= (540 + 40 - 20) - 440 = 120 \end{aligned}$$

- Besarnya angka-angka pengganda :
 - ❖ Angka pengganda investasi :

$$K_1 = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

- ❖ Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah :

$$K_G = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

- ❖ Angka pengganda transfer pemerintah :

$$K_{Tr} = \frac{1}{1-c} = \frac{0,75}{1-0,75} = 3$$

- ❖ Angka pengganda pajak :

$$K_{Tx} = \frac{-c}{1-c} = \frac{-0,75}{1-0,75} = -3$$

- Besarnya perubahan-perubahan I, G, Tr dan Tx

$$\Delta I = 50 - 40 = +10$$

$$\Delta G = 60 - 60 = 0$$

$$\Delta Tr = 60 - 40 = +20$$

$$\Delta Tx = 40 - 20 = +20$$

- Besarnya pendapatan nasional ekuilibrium sesudah tahun 1981 :

$$Y_2 = Y_1 + \Delta Y$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= Y_1 + (K_I \Delta I + K_G + K_{Tr} + K_{Tx}) \\ &= 540 + (4 \times 10 + 4 \times 0 + 3 \times 20 + (-3 \times 20)) \\ &= 580 \end{aligned}$$

- Besarnya konsumsi ekuilibrium :

$$\begin{aligned} C_2 &= C_1 + MPC \cdot \Delta Y_D \text{ dimana } C_1 = 440 \\ &= 440 + 0,75 (580 + 60 - 40) - 540 + 40 + 20 \\ &= 470 \end{aligned}$$

- Besarnya saving ekuilibrium :

$$S_2 = S_1 + MPS \cdot \Delta Y_D$$

$$\text{Oleh karena } S_1 = 120$$

Maka :

$$\begin{aligned} S_2 &= 120 + 0,25 (580 + 60 - 40) - (540 + 40 - 20) \\ &= 130 \end{aligned}$$

- Besarnya pendapatan nasional ekuilibrium periode sesudah tahun 1981 = 580 M.rp per tahun.
- Besarnya konsumsi ekuilibrium sesudah tahun 1981 = 470 M.rp per tahun.
- Besarnya saving nasional ekuilibrium sesudah tahun 1981 = 130 M.rp per tahun.

Pencocokan :

$$S + Tx = I + G + Tr$$

$$130 + 40 = 50 + 60 + 60$$

$$170 = 170$$

Contoh Soal 2 :

Diketahui :

- Fungsi konsumsi :
 $C \text{ per tahun} = 0,75 Y_D + 3/20 \text{ M. rp}$
- Besarnya investasi
 $I = 40 \text{ M.rp per tahun}$
- Besarnya konsumsi pemerintah
 $G = 60 \text{ M.rp per tahun}$
- Besarnya transfer pemerintah :
 $Tr = 40 \text{ M.rp per tahun}$
- Besarnya pajak :
 $Tx = 20 \text{ M.rp nasional}$
- Kapasitas produksi nasional :
 $Q_m = 600 \text{ M.rp per tahun}$

Ditanyakan :

- Dengan hanya merubah besarnya transfer pemerintah, dengan jumlah berapakah transfer pemerintah harus diperbesar/diperkecil agar

supaya pendapatan nasional mencapai ekuilibrium pada tingkat full employment ?

- Dengan hanya merubah besarnya pajak, dengan berapakah pajak harus dinaikkan/diturunkan agar supaya pendapatan nasional mencapai ekuilibrium pada tingkat full employment ?
- Dengan hanya merubah besarnya "government expenditure" dengan berapakah pengeluaran konsumsi pemerintah perlu ditambah/dikurangi agar supaya pendapatan nasional mencapai ekuilibrium pada tingkat full employment ?
- Dengan merubah besarnya "government expenditure" dan merubah besarnya pajak dengan jumlah yang sama, berapakah "government expenditure" dan pajak masing-masing perlu diperbesar atau diperkecil agar supaya pendapatan nasional mencapai ekuilibrium pada tingkat full employment ?

Penyelesaian :

- Pendapatan nasional ekuilibrium yang terjadi :

$$Y = \frac{20 - 0,75 \times 20 + 0,75 \times 40 + 60 + 40}{1 - 0,75}$$

$$= 540$$

- Untuk tercapainya ekuilibrium pada tingkat full employment, pendapatan nasional perlu mengalami perubahan sebesar :

$$Y_1 + \Delta Y = Q_m$$

$$540 + \Delta Y = 600$$

$$\Delta Y = 600 - 540$$

$$\Delta Y = + 60$$

dimana Q_m = pendapatan nasional pada tingkat full employment

- Untuk menaikkan pendapatan nasional sebesar 60 milyar rupiah, kita dapat memilih salah satu di antara keempat cara tersebut di bawah ini :

- a) Merubah besarnya transfer pemerintah sebesar :

$$K_{Tr} \Delta Tr = 60$$

$$\frac{0,75}{1-0,75} \times \Delta Tr = 60$$

$$3 \Delta Tr = 60$$

$$\underline{\Delta Tr = 20}$$

- b) Merubah besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah dengan :

$$K_G \Delta G = 60$$

$$\frac{0,75}{1-0,75} \times \Delta G = 60$$

$$4 \Delta G = 60$$

$$\underline{\Delta G = 15}$$

- c) Merubah besarnya pajak sebesar :

$$K_{Tx} \Delta Tx = 60$$

$$\frac{0,75}{1-0,75} \times \Delta Tx = 60$$

$$3 \Delta Tx = 60$$

$$\underline{\Delta Tx = 20}$$

- d) Dengan : balanced budget policy "atau kebijakan anggaran seimbang, konsumsi pemerintah dan pajak masing-masing harus diubah besarnya dengan :

$$KD \cdot \Delta G = 60$$

$$1 \times \Delta G = 60$$

$$\Delta G = 60 = \Delta Tx$$

BAB : VII

ANALISA PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan :

- Hubungan ekonomi internasional.
 - Analisa pendapatan nasional dalam perekonomian.
-

HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain meliputi berbagai macam bentuk, yaitu :

- Pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan.
- Pertukaran sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi dan
- Hubungan tentang hutang piutang.

Ketiga macam hubungan ekonomi tersebut di atas mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Misalnya hubungan hutang piutang antara negara dengan negara lain mungkin timbul karena adanya perdagangan atas barang dan jasa.

Walaupun ketiga macam hubungan tersebut saling berkaitan, namun tetap perlu dibedakan, karena kadang-kadang perkembangan ketiga macam hubungan tersebut tidak selalu jalan.

Manfaat Hubungan Internasional

Hubungan ekonomi yang berlangsung antar negara akan memberi manfaat dan keuntungan bagi masing-masing negara yang melakukan

hubungan ekonomi. Beberapa manfaat atau keuntungan yang dapat dinikmati dari adanya hubungan ekonomi internasional antara lain :

- Melalui hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara, negara-negara yang bersangkutan dapat memperoleh barang-barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri.
- Memungkinkan masing-masing negara melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang efisiensinya lebih tinggi dari negara lain, atau karena dapat dihasilkan dengan harga yang relatif lebih rendah dari negara lain. Dengan adanya spesialisasi faktor-faktor produksi dapat dipergunakan lebih efisien, sehingga barang-barang dapat diproduksi dengan lebih murah, dan penduduk dapat menikmati lebih banyak barang.
- Memungkinkan diadakannya perluasan pasar bagi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, tetapi tidak dapat lagi dinaikkan penjualannya. Kebutuhan akan beberapa jenis barang atau hasil industri tertentu yang diproduksi di dalam negeri, mungkin sudah terpenuhi, namun kapasitas penggunaan mesin-mesin belum mencapai optimal. Dengan melakukan ekspor ke luar negeri kapasitas produksi dapat ditingkatkan dan alat-alat produksi yang digunakan makin efisien dan ongkos produksi dapat dikurangi.
- Melalui hubungan ekonomi internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih baik dan cara-cara memimpin perusahaan yang lebih modern. Hal ini akan memungkinkan negara yang bersangkutan menaikkan tingkat produktivitasnya dan mempercepat peningkatan produksi nasionalnya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksport dan Import.

Besr kecilnya ekspor dan import ditentukan oleh tempat, yaitu :

- Harga-harga dalam negeri. Makin tinggi harga-harga dalam negeri, produsen dalam negeri akan makin sulit bersaing dengan produsen

luar negeri. Dengan main tingginya harga-harga dalam negeri, ekspor makin berkurang. Kondisi sebaliknya akan berpengaruh pada import.

- Jika harga-harga diluar negeri makin tinggi, maka produsen dalam negeri akan mengalami kesulitan dalam persaingan dengan produsen dalam negeri. Jadi harga-harga yang semakin tinggi di luar negeri akan mendorong ekspor. Ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat atau ke Jepang akan terdorong bila kenaikan harga-harga di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga di Amerika Serikat atau Jepang. Sebaliknya juga berpengaruh pada import.
- Perubahan nilai kurs valuta asing juga mempengaruhi ekspor. Apabila nilai rupiah terdepresiasi atau di devaluasi atas mata uang dolla Amerika Serikat, maka ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga mengalami kenaikan. Demikian juga kalau mata uang rupiah terapresiasi akan terjadi sebaliknya (berpengaruh pada import).
- Makin tinggi pendapatan penduduk luar negeri, makin besar permintaan terhadap barang-barang ekspor. Kondisi sebaliknya berpengaruh pada import.

Ekspor merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat. Karena makin besar nilai ekspor, maka pendapatan nasional makin tinggi. Tetapi sebaliknya besarnya pendapatan nasional tidak berpengaruh terhadap besarnya ekspor. Walaupun pendapatan nasional meningkat, ekspor belum tentu meningkat. Besarnya import suatu negara akan berpengaruh pada besarnya cadangan devisa suatu negara.

ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA

Pendapatan Nasional Ekuilibrium

Untuk perekonomian terbuka dimana pendapatan investasi pada neraca pembayaran mempunyai saldo nol berlaku persamaan :

$$Y = C + I + X - M$$

Dimana variabel barunya adalah :

X : nilai ekspor

M : nilai import

Oleh karena.

Maka :

$$C + S = C + I + X - M$$

$$S + M = I + M$$

Dalam model ini pengeluaran investasi dan ekspor kedua-duanya diperlakukan sebagai variabel yang eksogen, sedangkan S dan M masing-masing diperlakukan sebagai variabel yang endogen dengan persamaan di bawah ini.

$$S = S_0 + sY$$

$$M = M_0 + mY$$

Dimana :

S_0 = Besarnya saving pada tingkat pendapatan nasional sebesar nol. S_0 di sini menggantikan $-a$ pada persamaan $S = -a + (1 - c) Y$.

$$S = \frac{\Delta S}{\Delta Y} \text{ (Marginal Propensity to Save).}$$

S di sini menggantikan $(1-c)$ pada persamaan

$$S = -a + (1-c) Y$$

M_0 = Besarnya import pada tingkat pendapatan nasional sebesar nol.

$$m = \frac{\Delta M}{\Delta Y} \text{ (Marginal Propensity to Import)}$$

Dengan memasukkan persamaan-persamaan di atas, maka pendapatan nasional ekuilibrium dapat diperoleh :

$$S_0 + sY + M_0 + mY = I + X$$

$$sY + mY = I + X - S_0 - M_0$$

$$(s + m) Y = I + X - S_0 - M_0$$

$$Y = \frac{I + X - S_0 - M_0}{s + m}$$

Contoh Soal :

Diketahui :

Fungsi saving $S : -40 + 0,30 Y$

Fungsi import $M : 20 + 0,20 Y$

Pengeluaran investasi $I : 280$

Eksport $X : 100$

Ditanyakan :

Pendapatan nasional, saving, import, konsumsi dan neraca perdagangan dalam keseimbangan !

Penyelesaian :

- Pendapatan nasional ekuilibrium

$$Y = \frac{I + X - S_o - M_o}{s+m}$$

$$\begin{aligned} Y &= \frac{280+100-40-20}{0,30+0,20} \\ &= 880 \end{aligned}$$

- Saving ekuilibrium :

$$\begin{aligned} S &= -40 + 0,30 Y \\ &= -40 + 0,20.800 \\ &= 200 \end{aligned}$$

- Import ekuilibrium :

$$\begin{aligned} M &= 20 + 0,20 Y \\ &= 20 + 0,20.800 \\ &= 180 \end{aligned}$$

- Konsumsi ekuilibrium :

$$\begin{aligned} Y &= C + I + X - M \\ 800 &= C = 280 + 100 - 180 \\ C &= 600 \end{aligned}$$

- Neraca perdagangan ekuilibrium :

$$X = 100, M = 180$$

Neraca perdagangan dalam keadaan pasif :

$$M - X = 80$$

Pencocokan :

$$S + M = I + X$$

$$200 + 180 = 280 + 100$$

$$380 = 380$$

DAFTAR PUSTAKA

- , 1992. **Orde Baru Dalam Angka Angka**. Jakarta : Sekretariat Jenderal DDP Golkar.
- Boediono. 1995. **Ekonomi makro**. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.
- Dembrug, F. Thomas. 1992. **Makro Ekonomi : Konsep Teori dan Kebijakan**. Jakarta : Erlangga.
- Isnani G. & Nirbito. 1991/1992. **Ekonomi Pembangunan dan Sistem Ekonomi Indonesia**. Malang : PPPG IPS dan PMP Malang.
- Mangkusubroto, G. 1992. **Teori Ekonomi Makro**. Yogyakarta ; bagian Penerbit STIE.
- Reksoprayitno, S. 1995. **Ekonomi Makro : Pengantar Analisa Pendapatan Nasional**. Yogyakarta : Liberty.
- Rosyidi, S. 1984. **Pengantar Teori Ekonomi : Pengantar Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro**. Surabaya : Airlangga University Press.
- Samuelson dan William. 1992. **Ekonomi**. Jakarta : Erlangga
- Simanjutak, P.J. 1985. **Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia**. Jakarta : Lembaga penerbit FE Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. 1994. **Pengantar Teori Ekonomi Makro**. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2000. **Makro Ekonomi Modern**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. 1990. **Pengantar Ekonomika Makro**. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada
- Supriyanto, 1995. **Permasalahan Ekonomi Indonesia**. Malang : Proyek OPF IKIP Malang.

- Supriyanto, 1996. **Ekonomi Indonesia. Malang** : Proyek OPF IKIP Malang.
- Susanti, M. Iksan, Widyanti. 1994. Indikator-Indikator Makro Ekonomi. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Nama Mahasiswa : _____
Nim : _____
Fakultas / Jurusan : _____
Program Studi : _____

Petunjuk Menegrikan Lembar Kerja

1. Sebelum mengerjakan lembar kerja supaya dikonsep terlebih dahulu dalam kertas buram, sehingga jawaban dalam lembar kerja baik, bersih dan betul.
 2. Dalam menggambar kurva diwajibkan memakai tinta/bolpoint berwarna, sehingga gambar mudah dipahami dan baik.
 3. Usahakan untuk selalu mengerjakan lembar kerja ini dengan baik, rajin sehingga akan sangat membantu saudara untuk memahami isi perkuliahan mata kuliah ini.
 4. Lembar kerja yang telah dikerjakan oleh mahasiswa merupakan salah satu tugas wajib yang bersifat individual dan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian.
-
-

Penyusun,

PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

INDIKATOR	1997	1998	1999	2000	2001	2002
• Pertumbuhan PDB Riil ¹ (%)	4,7	-13,1	0,8	4,9	3,3	3,5 ¹
• Inflasi (%)	11,05	77,63	2,01	9,35	12,55	5,31 ²
• Total Nilai Ekspor (rilyar AS)	53,4	48,8	48,7	62,1	56,0	27,4 ³
• Nilai Ekspor Nonmigas (milyar AS)	41,8	41,0	38,9	47,8	43,4	21,7 ³
• Total Nilai Impor (milyar AS)	41,7	27,3	24,0	33,5	30,8	13,8 ³
• Neraca Perdagangan (milyar AS)	11,8	21,5	24,7	28,6	25,2	13,6 ³
• Uang Beredar (trilyun rupiah)	78,3	101,2	124,6	162,2	177,7	174,0 ⁴
• Likuidasi Perkelonoman (trilyun rupiah)	355,6	577,4	646,2	747,0	844,1	838,6 ⁴
• Dana perbankan (trilyun rupiah)	357,6	573,5	625,6	720,4	809,1	796,6 ⁴
• Kredit Perbankan (trilyun rupiah)	378,1	487,4	225,1	269,0	307,6	312,0 ⁴
• Suku Bunga SBI 1 bulan (%) ⁵	20,00	38,44	12,51	14,53	17,02	14,78 ⁶
• Rp/dollar AS (kurs tengah BI)	4.650	8.025	7.100	9.595	10.400	8.865 ⁷
• Indeks Harga Saham Gabungan	401,71	398,04	676,92	416,32	392,04	456,75 ⁷
• Kapitalisasi Pasar (trilyun rupiah)	159,9	175,7	451,8	259,6	239,3	283,8 ⁷

Keterangan: ¹ Perkiraan
² Januari-Juli 2002
³ Januari-Juni 2002
⁴ Posri Juni 2002
⁵ Posisi Desember
⁶ Posisi 14 Agustus 2002
⁷ Posisi 20 Agustus 2002

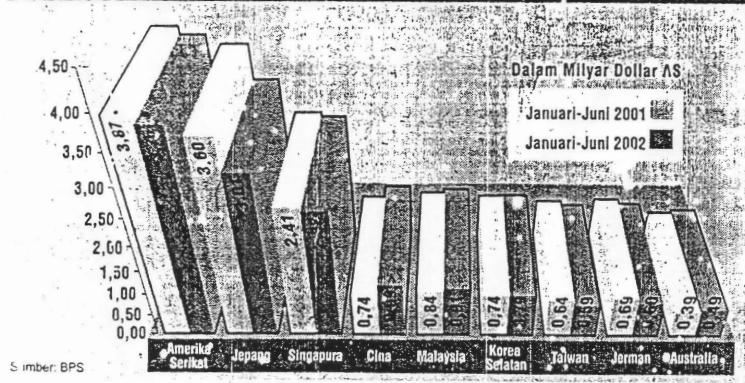
Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta

PERKEMBANGAN EKSPOR NONMIGAS HASIL INDUSTRI, 1999-2002

Jenis Barang	Nilai (juta dollar AS)					Pertumbuhan (%)				
	1999	2000	2001	2001	2002	1999	2000	2001	2002	2002
Total Hasil Industri	33.332,4	42.003,0	37.671,1	6.353,5	5.801,8	-3,6	26,0	-10,3	-8,7	
1. Tekstil dan Produk Tekstil	7.236,0	8.336,6	7.799,1	1.334,1	1.106,7	-2,1	15,2	-6,4	-17,0	
2. Kayu Olahan	3.796,1	3.561,2	3.265,3	505,1	425,3	-14,2	-6,2	-8,3	-15,8	
3. Alat Listrik, Ukur, fotografi, dll	3.419,2	6.757,5	6.192,1	1.131,6	947,3	4,3	97,6	-8,4	-16,3	
4. Karet Alam Olahan	1.236,3	1.319,9	1.207,5	186,2	192,6	-20,1	6,8	-8,5	3,4	
5. Alas Kaki (Kurt, Karet, & Kanvas)	1.601,8	1.672,1	1.505,6	781,8	238,7	32,8	4,4	-10,0	-15,3	
6. Barang dari Logam Tidak Mulia	1.898,9	2.367,0	2.042,9	394,1	281,3	11,4	24,7	-13,7	-28,6	
7. Minyak Nabati	1.695,5	1.669,4	1.364,3	135,2	358,2	45,7	-1,5	-19,3	164,9	
8. Kertas dan Barang dari Kertas	1.965,6	2.291,3	2.034,3	278,6	276,4	37,9	16,6	-11,2	-0,8	
9. Mebel dan bagian-bagiannya	1.230,6	1.508,5	1.414,3	242,0	250,2	247,8	22,6	-6,2	3,4	
10. Makanan Olahan	958,3	955,5	1.042,5	149,4	172,3	26,8	-0,3	9,1	15,3	

Sumber: Badan Pusat Statistik
 Januari-Februari

EKSPOR NONMIGAS INDONESIA MENURUT NEGARA TOJUAN JANUARI-JUNI 2001 DAN 2002



1. Data yang ada pada kliping halaman 108 menunjukkan perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia dalam kurun waktu 1997 sampai dengan 2002. berbagai data indikator ini terlihat adanya hubungan antara indikator satu dengan yang lain.

Misalnya pada tingkat inflasi yang tinggi, PDB rendah (bahkan minus) demikian juga dengan tingkat bunga SBI.

Jelaskan hubungan antara indikator ekonomi tersebut !

J a w a b a n :

Pos, Jumat Kliwon 19 Januari 2001

Mengendalikan Spekulasi Rupiah

agak terlambat, langkah Bank Indonesia (BI) mempersempit ruang transaksi rupiah dengan membatasi transaksi valas patut kita dukung. Langkah ini cukup efektif untuk kembali memperkuat rupiah.

Saat ini masih terpuruk, masih kita tunggu keampuhannya. Tugas bank sentral sebagai penjaga nilai tukar rupiah dan inflasi transisi politik di Indonesia saat ini memang sangat berat. Sebab, variabel yang terkait dengan turun naiknya rupiah demikian kompleks: pendekatan yang multidimensional.

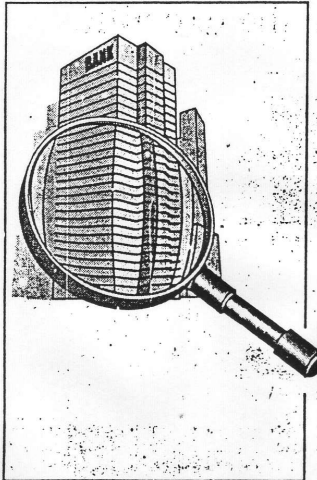
aktivitas Menteri Perekonomian Rizal Ramli, selama ini tidak terjadi antara prestasi yang dicapai di tingkat makroekonomi dan nilai rupiahnya, ketika ekspor naik, cadangan devisa meningkat, ternyata rupiah saja menunjukkan tren menurun. Ada *something wrong* sehingga rupiah terlalu *undervalued*.

masih demikian rapuh, *fragile*, sehingga masih gampang diombang-angingkan oleh spekulasi untuk keuntungan mereka. Di sisi lain, stabilitas politik, dan sosial di Indonesia saat ini juga berada pada level yang rendah sehingga sering menimbulkan sentimen negatif pasar.

tidak ada yang besar yang mengancam akan serta merta meledak ke pasar uang nasional.

sentimen negatif itu memicu oleh perilaku kontraproduktif, korupsi yang marak, kerusuhan yang meluas di kawasan tertentu Aceh, Maluku, dan Papua.

ketidakpastian dan ketidakpastian yang kini melanda yang diperparakan spekulasi valas. Rupiah yang diduga banyak bank asing menundakan dari kondisi yang ingat, dulu ketika apai puncak-puncak bank-bank asing justru prestasi terbagus. Saat ini mereka justru



Peraturan BI nomor 01 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit yang itu, antara lain, dimaksudkan untuk menggebu sikap bank yang "nakal". Sebab, kini pemerintah menurunkan batas transaksi dari USD 5 juta menjadi USD 3 juta, baik transaksi maupun posisi (*outstanding*) transaksi derivatif per bank.

Untuk kegiatan investasi riil, penyertaan secara langsung, pemberian pembelian surat-surat berharga, BI memasang rambu yang makin ketat transaksi derivatif. Selain itu, BI kini menyiapkan sanksi—meski apa pengamat masih dianggap kurang keras—terhadap bank-bank yang melanggar aturan ini.

efektif atau tidaknya aturan ini, terbitnya PBI terbaru ini memang baik yang bisa dilakukan BI untuk mengerem agar rupiah tak bisa jauh. Hanya, sekali lagi, ini bukan obat manjur satu-satunya untuk mengangkat rupiah yang kini masih berada di kisaran Rp 9.500 per AS.

Mengendalikan nilai tukar ini, otoritas moneter tak bisa lagi men-

gunakan instrumen-instrumen yang konvensional. Misalnya, lewat di pasar uang dengan menggerojok dolar atau lewat regulasi pasar yang dilakukan lewat PBI ini. Yang lebih penting adalah memperkuat kepercayaan pasar yang lebih kokoh. Untuk itu, perlu kerja sama dengan komponen lain.

- Jelaskan, perbedaan arti depresiasi dan devaluasi !
- Jelaskan, berbagai kemungkinan strategi untuk mengendalikan nilai rupiah !

Jawab :

- Perbedaan depresiasi dengan devaluasi.

- Berbagai kemungkinan strategi adalah :

Apabila lembar ini tidak cukup dapat dikerjakan dibalikny.

Bersaing di Era Global

Bob Widyahartono

DOSEN FE USAKI

DINAMIKA Asia memperlihatkan beberapa penggerak dasar persaingan yang patut dihadapi. Dalam masyarakat Asia yang cepat berubah, pasti kecepatan dan tekad (*speed and passion*) merupakan aset yang harus menjadi hitungan. Zaman etatisme sudah berlalu. Zaman sistem pasar bebas makin menggejala.

Daya saing atau kemampuan itu, apa sesungguhnya di mata pebisnis? Kemampuan adalah kesanggupan untuk memenangkan pangsa pasar atau minimal mempertahankan pangsa yang sudah dimilikinya. Dari sudut pandang pasar global kemampuan ini adalah daya tarik (*attractiveness*) suatu produk atau jasa yang membuat pelanggan global memilih produk atau jasanya diantara banyak pilihan yang tersedia.

Apa saja unsur-unsur daya tarik yang mempengaruhi pilihan itu dari sudut pandang pelanggan? Ada empat faktor yaitu: Mutu (*Quality*), Harga (*Price*), Penyerahan (*Delivery*), dan Jasa Pelayanan (*Service*).

Dengan keempat faktor itu mutu yang ditawarkan haruslah sepadan dengan ekspektasi pelanggan dalam membayarkan harga, dalam arti adanya nilai tambah dan penyerahan yang tepat waktu sesuai kesepakatan dan jasa pelayanan purna (*after sales service*) yang bermutu tanpa pengorbanan yang mengakibatkan harga menjadi tidak bersaing. Karena itu, efisiensi dalam perhitungan harga pokok merupakan syarat untuk mampu menyajikan harga yang memberi nilai tambah bagi pelanggan.

Dengan kemampuan bersaing, suatu bisnis dapat memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Proses untuk memperoleh keunggulan ini merupakan perjuangan tersendiri. Karena dalam pasar global tidak dikenal proteksi, keunggulan ini dalam situasi nyata adalah membalikkan pilihan yang diketahui (*convverting informed choice*) ke dalam tindakan yang tepat waktu, dengan cara yang lebih menjanjikan dibandingkan yang ditawarkan pesaing. Di pihak lain tentunya setiap bisnis melihat apa yang dikerjakan pesaing agar dapat lebih berkualitas dalam pemasarannya.

Persaingan adalah ibaratnya perang. Para direktur dan manajer pemasaran dalam era globalisasi memasuki suatu era persaingan total. Mereka itu memasuki suatu era dimana memenangkan persaingan akan menjadi makin sulit. Mereka ditantang dan diuji kemampuannya untuk merumuskan strategi bersaing dan memperoleh (*generate*) kapabilitas bersaing secara nyata dan berlangsung lama.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memenangi persaingan di era global itu. *Pertama*, membentuk jaringan (*networking*). Sebelum masa krisis -dari perspektif marketing internasional- bisnis telah berhasil beralih dari kegiatan pemenuhan pasar domestik ke ekspor. Namun, akhir-akhir ini terdapat tanda-tanda labilnya ekspor — terutama komoditi non-migas. Salah satu penyebabnya adalah banyak bisnis nasional tidak memperkuat jaringan bisnis internasional dan kompetensi pemahaman atas pasar internasional, yang dikendalikan perusahaan negara-negara industri maju (Amerika, Jepang, dan Eropa) dan negara industri baru Asia (Singapura, Hongkong, dan Taiwan).

Kedua, penguasaan *market intelligence*. Kemampuan untuk melakukan intelijen pasar global bagi bisnis, baik dalam manufaktur maupun jasa (perbankan, pariwisata, rumah sakit dsb), merupakan salah satu faktor kekuatan untuk meraih peluang pasar. Lagipula, perkembangan ke arah liberalisasi perdagangan — sebagaimana disepakati dalam putaran terakhir GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dengan dibentuknya WTO (World Trade Organization) — memperbesar peluang perdagangan dan pasar.

Ketiga, mengembangkan sumber daya otak (SDO). Bersaing dan berhasil dalam lingkungan global yang dinamis, yang paling menentukan adalah inovasi. Inovasi ini sangat tergantung pada SDO. Inovasi bukan sebagai substitusi kerja keras melainkan kerja dengan cerdas (*work smart not work hard*). SDO yang bagaimana yang patut dibuat kredibel? Memasuki abad 21, SDO yang dibutuhkan adalah mereka yang senantiasa memiliki visi, tidak cepat putus asa, inovatif/kreatif, cekatan memanfaatkan teknologi yang dibutuhkan bisnisnya, dan yang sangat penting bisa bekerjasama dalam tim dengan kredibel.

Kredibilitas itu diukur atas dasar 6 K: Keyakinan (*Conviction*), Karakter (*Character*), Kepedulian (*Care*), Keberanian (*Courage*), Ketenangan bersikap (*Composure*), dan Kompetensi (*Competence*).

Dalam realitasnya, harus diakui bahwa bisnis kita masih jauh dari persaingan global. Internasionalisasi bisnis, baru pada suatu upaya yang seringkali dilakukan secara setengah hati (atau coba-coba). Karena itu, justru dalam situasi krisis ini merupakan saat yang tepat bagi para CEO dan manajer untuk melakukan penataan ulang strategi bisnis, agar mampu memasuki dan bertahan dalam globalisasi.



L. AGON

3. Bersaing dalam era global menjadi suatu tuntutan yang perlu untuk dilakukan demi kemajuan bangsa, dan keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini.

Jawab :

- a. Maknanya adalah :

- b. Maknanya adalah :

- c. Maknanya adalah :

MASIH ADAKAH YANG DIANDALKAN?

Berbagai indikator membuktikan, Indonesia memang layak ditempatkan dalam barisan terbelakang. Semenjak krisis ekonomi berlangsung, ketidakstabilan kerap terjadi. Tidak heran jika bangsa ini tergolong yang paling lambat berlakuk positif.

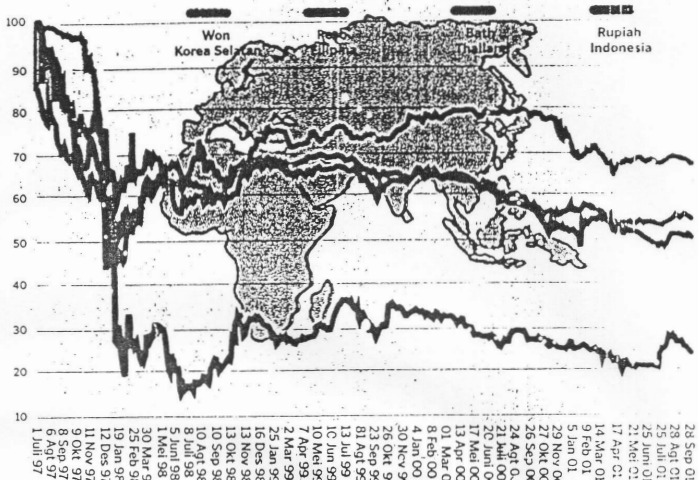
Indeks nilai mata uang membuktikan hal ini. Dibandingkan negara-negara Asia lainnya yang juga tertimpa krisis, rupiah terbukti yang paling parah kejatuhannya. Selain itu, dibandingkan dengan mata uang Won Korea Selatan, peso Filipina, bahkan bath Thailand, rupiah paling parah terpuruk.

Parahnya, indikator lain turut mengesalkan arti negeri ini. *Political and Economic Risk Consultancy, Ltd (PERC)*, menempatkan Indonesia dalam deretan terbawah negeri di Asia dalam posisi daya saing. Lembaga riset yang sejak tahun 1976 mensurvei masalah-masalah yang mempengaruhi iklim dunia usaha itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang terburuk dalam kualitas sumber daya manusia (SDM). Dinilai buruk, berkaitan dengan kualitas pendidikan dan jumlah tenaga kerja terampil (*skilled labor*) yang dimiliki. Bahkan, negara berpenduduk 210 juta jiwa ini selama masa krisis menunjukkan penurunan kualitas yang signifikan.

Selain kualitas SDM, julukan negatif lain seperti negara yang inkonsisten dalam kebijakan pemerintahannya, ketidakmampuan sistem hukum yang dimiliki, hingga negara penuh korupsi juga dicantumkan ke negeri ini. Dengan demikian, masih adakah yang dapat diandalkan dari negeri ini?

INDEKS NILAI MATA UANG ASIA TERHADAP DOLLAR AS

(1 Juli 1997=100)



Sumber: Litbang Kompas (diolah dari AWSI)

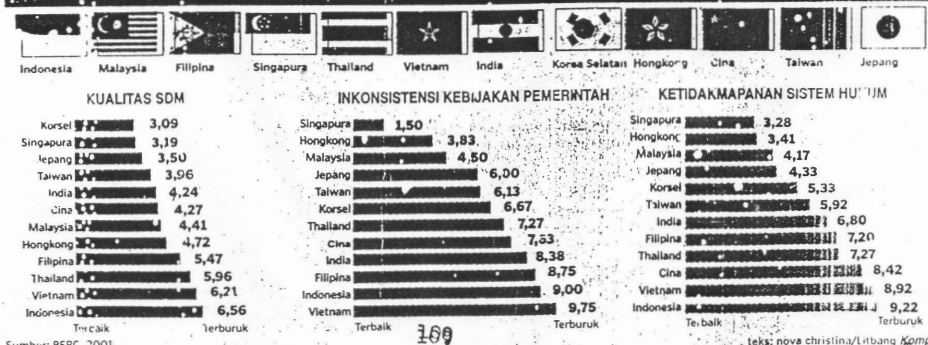
KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO BEBERAPA NEGARA DI ASIA

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Populasi penduduk (juta jiwa)	204,42	209,20	75,15	78,65	46,43	47,31	62,00	62,80
GDP per kapita (dollar)	461	680	905	993	6,229	9,346	1,999	1,961
Inflasi rata-rata per tahun (persen)	-57,70	-9,30	-9,60	4,40	-7,50	2,30	0,20	1,60

*) 2000 (angka perkiraan)

Sumber: Business Monitor International (BMI) dan Bank Indonesia, 2001

SKOR PENILAIAN UNTUK BEBERAPA NEGARA ASIA



Sumber: PERC, 2001

teks: nova christina/litbang Kompas

4. Dalam arti kliping di atas berbagai indikator ekonomi makro, serta indikator lainnya, yaitu kualitas SDM, Inskonsistensi kebijakan pemerintah dan ketidakmapanan sistem hukum di Indonesia sangat memprihatinkan dibanding dengan negara di kawasan Asia lainnya. Jelaskan, secara lebih kongkrit tentang berbagai kondisi Indonesia yang sangat memprihatinkan !

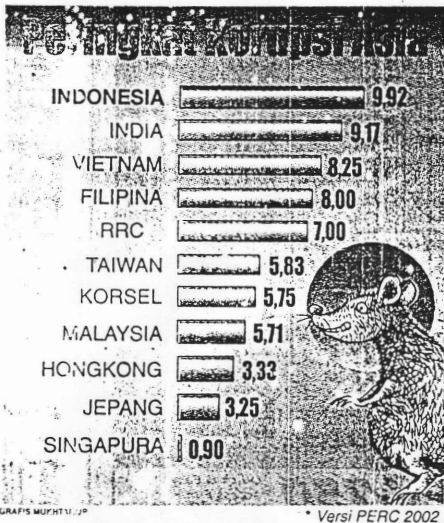
Jawaban :

[illegible]

Jawa Pos, Senin 11 Maret 2002

Korupsi Indonesia Kian Parah

SINGAPURA – Indonesia negara paling korup di Asia. Oh, itu bukan berita baru. Beberapa tahun terakhir negara ini *toh* sudah akrab dengan "prestasi" itu. Tetapi, tahun ini Indonesia kembali tetap terkorup. Bahkan, korupsi di negeri ini kian parah.



Dalam survei yang dilakukan organisasi *rating* Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hongkong, Indonesia sukses mencatatkan skor 9,92. Cukup tinggi, memang. Tapi, asal tahu, rentang penilaian 1–10 yang diambil PERC ini justru kebalikan dari penilaian hasil ulangan siswa di sekolah-sekolah kita.

Rentang penilaian PERC itu bermakna, semakin kecil skor yang diraih suatu negara semakin tidak atau kurang korup negara tersebut. Nah, dengan skor setinggi itu, Indonesia pun berada di posisi buncit alias yang terkorup dari negara-negara Asia yang disurvei.

Bahkan, sejak PERC melakukan penilaian seperti ini untuk yang pertama pada 1995, poin 9,92 yang diraih Indonesia ini adalah yang terparah. "Sulit dipercaya bahwa masalah korupsi di Indonesia justru semakin buruk. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. Sistem hukum nasional negara ini sangat kacau sehingga pengadilan tak bisa memberikan fungsi perlindungan sebagaimana mestinya," lapor PERC.

Untuk survei tahun ini PERC melibatkan 1.000 pengusaha maupun ekspatriat di Asia. Dengan skor 9,92 untuk Indonesia, bagaimanapun, pengelola pemerintahan dan orang-orang yang ikut menjalankan kehidupan di republik ini sepatutnya merasa malu. Mereka tak seharusnya terus-menerus tebal muka kayak tembok dan *semau gue* menggaibakan republik ini untuk kepentingan diri sendiri. Mengapa?

Sebab, menurut survei PERC, secara umum negara-negara Asia justru mengalami perbaikan atau kian kecil tingkat korupsi.

► Baca Korupsi Indonesia Hal 15

Di Bawah Arroyo, Filipina Capai Kemajuan

■ KORUPSI INDONESIA

Sambungan dari hal 1

Tetapi, dengan poin 9,92 itu, Indonesia justru jeblak dan nilai merah di raporinya semakin kentel.

Hasil survei PERC menempatkan Singapura tetap sebagai negara paling bersih alias paling kurang korup. Bersama Jepang dan Hongkong. Singapura memiliki skor di atas rata-rata. Singapura meraih skor 0,90, disusul Jepang (3,25), kemudian Hongkong (3,33).

"Dari negara-negara Asia yang dinilai, hanya Singapura yang layak dibandingkan dan, bahkan, melebihi skor negara-negara Barat, seperti AS, Inggris, dan Australia," papar PERC.

Tempat keempat diduduki Malaysia dengan skor 5,71. Skor itu meningkat dibanding tahun lalu

yang 6,0. PERC menilai masalah korupsi di Malaysia disebabkan misalannya *corporate governance*.

Setelah Malaysia, baru kemudian Korea Selatan (5,75), yang tahun lalu meraih skor 7. Lantas, ada Taiwan (5,83) dan China (7,00) yang tahun lalu memperoleh nilai 7,88. Posisi berikutnya adalah Filipina (8,00). Meski masih tergolong besar, sebenarnya skor Filipina mengalami perbaikan signifikan dari 2001 yang 9,00.

Khusus untuk Filipina, PERC memberikan pujian. Setelah Presiden Gloria Arroyo menjabat sejak tahun lalu, negara itu dianggap mampu membuat perbaikan tajam, meskipun secara keseluruhan skornya masih di bawah rata-rata.

Di bawah Filipina adalah Vietnam (8,25). Skor negara ini turun

tajam dari tahun lalu yang 9,75. Kemudian, India (9,17) mengalami penurunan dari tahun lalu yang 9,25. Nah, setelah India, baru Indonesia di posisi paling akhir!

Dari intisari survei itu, PERC mencatat bahwa korupsi menjadi hal yang sangat menentukan perusahaan. Hal ini bisa dicontohkan dengan kolapsnya perusahaan raksasa energi AS, Enron Corp. Di sisi lain, jatuhnya perusahaan itu justru digunakan AS untuk menekan negara lain agar mempertahankan keterbukaan sehingga tidak mengulang nasib nahas Enron.

"Yang menarik, hampir di semua negara selisihnya sangat kecil. Tampaknya, sudah ada kesadaran bahwa korupsi merupakan masalah buat pengembangan bisnis," lapor PERC. (afp/nul)

5. Di era reformasi ini berdasarkan hasil penelitian lembaga internasional, tingkat korupsi di Indonesia paling parah di Asia dengan nilai 9,92, bandingkan dengan negara terdekat Singapura 0,90.

Jelaskan, faktor penyebabnya !

J a w a b a n :

9 BULAN KINERJA MEGAWATI

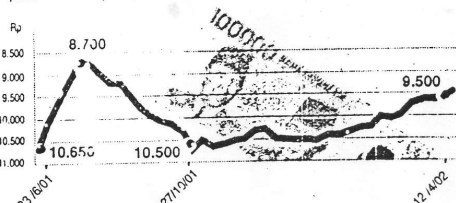
Ekonomi Menggeliat, Beban Meningkat



Dibandingkan tiga bulan sebelumnya, kinerja pemerintah di bidang perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Namun, berbagai kenaikan tarif tampaknya menjadi beban baru bagi masyarakat.

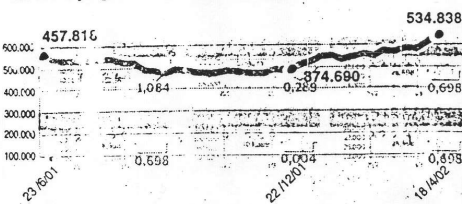
• Nilai Tukar Rupiah

Ketika pertama kali memerintah, 23 Juli 2001, respons pasar uang sangat bersahabat. Nilai tukar rupiah setiap satu dollar AS mencapai Rp 8.700, dibandingkan seminggu sebelumnya yang menyentuh Rp 10.650. Namun, beberapa bulan usia pemerintahan kondisi tidak menjadi baik, malah melorot mencapai Rp 10.500. Di usia sembilan bulan pemerintahan tren membaik mulai tampak kembali, meskipun belum mencapai titik tertinggi yaitu saat minggu pertama usia pemerintahannya. Saat ini nilai tukar setiap dollar terhadap rupiah pada kisaran Rp 9.500.



• Indeks Harga Saham

Mulai membaiknya kinerja ekonomi tercermin pula pada pasar saham Bursa Efek Jakarta. Saat ini indeks harga saham gabungan (IHSG) mencapai kisaran 534.838. Menilik masa sebelumnya angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan masa awal pemerintahannya yaitu sebesar 457.818. Terlihat jika dibandingkan pada akhir tahun 2001 lalu yang mencapai titik terendah, yaitu 374.690.



• Tingkat Inflasi

Menggeliatnya ekonomi tidak diikuti oleh menurunnya tingkat inflasi. Sepanjang tiga bulan tahun 2002 ini tingkat inflasi mencapai 3,47, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga bulan pertama tahun 2001 lalu yang mencapai 2,09 dan tahun 2000 mencapai 0,94. Sepanjang tahun 2001 lalu inflasi sudah mencapai 12,55 persen, lebih besar jika dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 9,35 persen. Tahun ini kekhawatiran inflasi melonjak: mulai dirasakan.

LAJU INFLASI INDONESIA PER BULAN TAHUN 2000-2002

Bulan	2000	2001	2002
Januari	0,32	0,53	1,99
Februari	0,07	0,87	1,50
Maret	0,45	0,89	-0,02
April	0,56	0,46	
Mei	0,84	1,13	
Juni	0,50	1,67	
Juli	1,28	2,12	
Agustus	0,51	-0,21	
September	0,06	0,64	
Oktober	1,16	0,68	
November	1,32	1,71	
Desember	1,94	1,62	
TOTAL	9,35	12,55	

• Harga BBM

Sembilan bulan memerintah, sedikitnya dua kali terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pada 16 Januari 2002 BBM rata-rata dinaikkan 22 persen. Sementara, 1 April 2002 kecuali minyak tanah, bahan bakar kembali dinaikkan. Kebijakan menaikkan harga BBM ini tergolong paling sering, mengingat sebelum memerintah, tanggal 16 Juni 2001 lalu BBM sudah dinaikkan rata-rata 30 persen. Semua kenaikan ini dengan sendirinya menyeret kenaikan harga barang kebutuhan lainnya.

• Tarif Listrik

Semenjak awal Juli 2001 hingga April 2002, setidaknya sudah keempat kalinya pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Di awal Juli 2001 tercatat kenaikan TDL rata-rata 17,47 persen. Bulan Oktober 2001 kenaikan rata-rata 8,19 persen. Semenjak Januari, April, Juli, dan Oktober tahun ini kenaikan ditetapkan sebesar 6 persen.

• Tarif Telepon

Tarif telepon di era pemerintahan saat ini juga mengalami beberapa kali kenaikan. Di minggu minggu awal pemerintahannya, 1 Agustus 2001 lalu tarif dinaikkan sebesar 20,9 persen. Selanjutnya, 1 Februari 2002 dinaikkan kembali pada kisaran 13-17 persen. Kenaikan ini merupakan bagian dari paket kenaikan telepon sebesar 45,49 persen yang disetujui oleh DPR dan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun.

• Tingkat Kepuasan Publik

Berkaitan dengan kinerja pemerintahan di bidang perekonomian, tanda-tanda perbaikan mulai dirasakan sebagian responden ijak pendapat Kompas. Dibandingkan dengan periode enam bulan usia pemerintahan, saat ini tingkat kepuasan publik meningkat. Namun,

masih lebih besar proporsi responden yang merasa tidak puas. Demikian pula, perbaikan saat ini masih belum mampu menembus tingkat kepuasan saat evaluasi tiga bulan pemerintahan.

KEPUASAN RESPONDEN

TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN MEGAWATI (dalam persen)

PERSOALAN	PERIODE 6 BULAN	PERIODE 3 BULAN	PERIODE 1 BULAN
Kebutuhan Pokok	32,5	31,3	21,3
Perbankan	33,9	26,3	28,8
Kurs Rupiah	26,7	5,4	35,8
Lapangan Kerja	21,5	14,5	16,8
Kesehatan	55,4	63,0	48,7
Pendidikan	43,4	41,0	43,4
Perumahan	32,7	28,0	31,4

n tiga bulan = 1.617
n enam bulan = 1.619
n sembilan bulan = 1.760

SUMBER: LITRANG KOMPAS. TEKSI: LITRANG KOMPAS. FOTO: KOMPAS/AGUS SUSANTO. INFOGRAFIK: DEKRA

6. Sembilan bulan pemerintahan Megawati kondisi ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, disamping berbagai beban mengalami peningkatan.

Jelaskan, berbagai perbaikan, disamping beban yang terus meningkat !

Jawaban :

- a. Berbagai perbaikan yang dimaksud adalah :

- b. Berbagai beban yang terus meningkat adalah :

Globalisasi Membutuhkan Pelayanan Prima

KUTA, KOMPAS — Pasar bebas yang mewarnai globalisasi di masa mendatang bukan sekedar bersaing dalam segi produksi atau harga, namun lebih pada pelayanan yang bersifat personal. Tanpa pelayanan dan pendekatan yang baik pasar atau klien akan pergi karena persaingan bebas nanti diwarnai dengan tingkat kompetisi yang amat tinggi.

Demikian diungkapkan pakar komunikasi bisnis dari Kanada Barbara Mowat dalam seminar sehari Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Bali tentang Kepemimpinan di Kuta, Jumat (5/4). Selain Mowat, Ketua Apindo Bali, Panudiana Kuhn juga menyampaikan makalah bertema "Penciptaan Iklim Kondusif untuk Investor".

"Pasar bebas dalam era globalisasi nanti bukan masalah tentang harga yang rendah dan barang yang murah, namun lebih pada pelayanan (service) dan bagaimana menjalin relasi, bagaimana kita memelihara hubungan dengan klien," ujar Mowat.

Sebagai contoh, saat ini dikenal luas bahwa Cina adalah negara dengan tenaga kerja yang murah sehingga bisa memproduksi barang dengan harga yang lebih murah dibanding negara lain. "Bukan itu masalahnya. Yang penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, dan mencoba menyerap apa yang diinginkan konsumen," ujarnya.

Misalnya, tambah Mowat, "Klien sebenarnya meminta kualitas yang konsisten, tepat waktu, kemasan bagus, dan sebagainya. Kita harus memperhatikan keinginan mereka dan melayaninya dengan baik."

Kemampuan yang sering diajarkan oleh produsen atau sebuah perusahaan, menurut Mowat, yaitu *follow up*. "Kalau ingin mendapatkan klien, harus memiliki kemampuan melakukan *follow up*. Melakukan *follow up* menjadi kunci yang penting," tegasnya. Dia menggarisbawahi bahwa globalisasi yang kini berlangsung mengandung unsur-unsur demokrasi, tek-

nologi tinggi, dan menawarkan keuntungan secara ekonomi.

Fokus ke manusia

Dalam uraiannya, Mowat menegaskan bahwa di era sekarang, baik perusahaan maupun pemimpin sebuah perusahaan harus memberikan fokus pada manusia. Karena harus diingat bahwa sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang berharga.

"Kita harus ingat apa akibat dari reaksi kita terhadap apa yang dilakukan karyawan. Karena jika kita salah bersikap, hasilnya malah akan semakin buruk, karena karyawan kehilangan motivasi," ujarnya.

Sementara itu dalam makalahnya, Panudiana Kuhn menegaskan bahwa kondisi yang kondusif akan dapat tercipta jika faktor *law enforcement* dapat dibenahi. "Adanya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu ini akan mampu menciptakan situasi yang kondusif untuk membangun dan untuk para investor," katanya. (sw)

7. Di era globalisasi ini bukan hanya sekedar bersaing dalam segi produksi atau harga, namun lebih pada pelayanan yang bersifat personal.

Jelaskan, alasan yang didasarnya !

Jawaban :

Rintis Bisnis, Jual Bunga Plastik

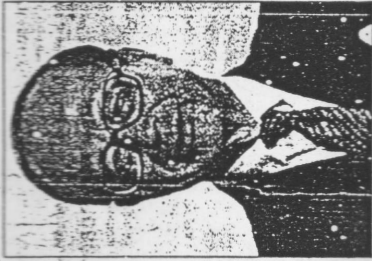
tangan pengusaha Cina. Saat ini saham Li di Hutchison sebesar 51 persen dengan nilai sekitar USD 25 miliar.

Berbagai sukses juga masih mengiringi perjalanan hidup Li di tahun 2000. Di tahun Naga Emas ini, sektor telekomunikasi menjadi ladan dolar bagi dia. Hasil penjualan 49 persen saham di perusahaan telkom Inggris, Orange, menghasilkan keuntungan tak kurang USD 22 miliar. Kemudian dia juga menjual 23 persen saham di perusahaan ponsel AS Voicestream ke Deutsche Telekom menghasilkan uang tak kurang USD 9 miliar.

Kini hasil penjualan itu akan dipakai untuk membeli saham-saham perusahaan telkom namun yang 3G (*third generation*) di Jerman, Swiss, Polandia, dan Prancis.

Tahun 2001 ini, bisnis Li diprediksi juga akan makin menggorita. Segmen 3G yang dia garap akan mampu menjadi ladan dolar baru. Tak kurang dari USD 9 miliar akan ditanamkan untuk menggarap segmen ini di Inggris dan Italia. Belum lagi di bisnis pelabuhan. Hutchison Whampoa kini menguasai pangsa pasar 10-15 persen dari total nilai perdagangan global melalui pelabuhan.

Tahun ini juga Li siap-siap untuk membuat sinergi antara industri pelabuhan dengan internet. Begitulah, sedikit tentang bisnis Li, yang tentunya sudah jauh dari sekadar menjual bunga plastik. (*9fannab-11*)



Li Ka Shing

FORTUNE

Oi jajaran pelaku bisnis Asia terkemuka tahun ini, ternyata talpan asal Hongkong Li Ka Shing mencuduki posisi runner up. Namun siapa yang tidak kenal nama ini? Bagaimana sesungguhnya dia sepakat terjual bisnis dia?

KALAU sekarang Anda bertanya ke masyarakat Hongkong siapa yang paling populer di kalangan bekas koloni Inggris, pasti jawabnya sama, Li Ka Shing, *chairman* Hutchison Whampoa. Lelaki berusia 72 tahun ini bukan saja disegani karena jago mencetak dolar, tetapi dia juga dikenal seseorang yang memiliki hubungan dan lobi politik sangat kuat.

Bisnis Li Ka Shing memang terus menggorita. Mulai dari sektor properti, pelabuhan, supermarket, hingga telekomunikasi. Tak pelak dalam kurun lima dekade terakhir, Li telah membuktikan diri sebagai *master of trader*.

Tak ada strategi bisnis yang terlalu muluk yang diterapkan. Li dalam merintis karir bisnisnya. Filosofi yang dia pakai sangat sederhana, "*buying low and selling high*" (beli di harga yang rendah, jual ketika harganya naik, Red.), katanya. Seperti kisah hidup para orang sukses, kerja keras dan nistib

8. Dalam pandangan Li Ka Shing Pemerintah boleh ganti, tetapi kejayaan bisnisnya harus terus berjalan sehingga pada saat ini ia menjadi pelaku bisnis Asia Terkemuka Tahun 2001 versi Fortune. Hal ini tentu jauh berbeda dengan Konglomerat kita yang berguguran bersamaan dengan jatuhnya rezim Soeharto. Jelaskan, perbedaan prinsip antara 2 kasus di atas!

Jawab :

Perbedaan prinsip adalah sebagai berikut :

Dubes Perancis Herve Ladsous:

UKM Senjata Efektif untuk Mengentaskan Kemiskinan

SURABAYA, KOMPAS — Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu dikemukakan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Herve Ladsous dalam diskusi dengan DPRD Jawa Timur (Jatim), Kamis (14/3), di Surabaya.

Dikemukakan, dalam 20 tahun terakhir sekitar 80 persen tenaga kerja baru di Perancis bekerja di UKM. Pemerintah Perancis memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan bagi pertumbuhan UKM. Upaya itu terdiri dari tiga garis utama, yaitu membantu terbentuknya UKM dan pertumbuhannya, modernisasi UKM, dan menciptakan sistem administrasi yang memudahkan.

Ladsous mengakui, sistem yang sudah berjalan di Perancis — yang merupakan negara maju — mungkin sulit diterapkan di Indonesia, khususnya di Jatim. "Tetapi, mungkin ada beberapa ide yang bisa diambil," kata dia.

"Untuk membuat UKM di Perancis cukup menghadap satu meja," kata Ladsous. Selain itu, Pemerintah Perancis juga memberikan subsidi berupa penggantian selisih bunga kredit. UKM di Perancis juga diberi fasilitas pinjaman dengan

bunga yang lebih kecil dibandingkan usaha lainnya. "Hasilnya, dengan memberikan jaminan kredit sebesar 236 juta dollar AS, jumlah pinjaman ke UKM mencapai empat milyar dollar AS," kata Ladsous.

Namun, kendala utama bukan berasal dari kredit. Dubes Perancis itu mengatakan, masalah yang dihadapi UKM di negeranya lebih pada keengganan bank memberi pinjaman kepada UKM.

Dalam diskusi ini hadir pula Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Jatim Erlangga Satriagung, dan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Erlangga sempat menanyakan bagaimana Perancis menyediakan pasar bagi UKM, karena ini merupakan kendala utama yang dihadapi UKM di Jatim.

Menjawab hal ini, Ladsous mengatakan, awalnya UKM-UKM sejenis membuat strategi pemasaran. Proposal mengenai strategi ini kemudian diajukan ke pemerintah, termasuk biayanya. "Nanti pemerintah akan menanggung 50 persen," kata dia.

Hubungan dagang

Dalam pertemuan itu juga sempat disinggung soal hu-

ubungan dagang antara Perancis dan Indonesia. Menurut Ladsous, selama ini surplus berada pada sisi Indonesia. Ia mengatakan, walau Perancis sebagai bagian dari ekonomi dunia yang sempat terguncang akibat tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat, namun ia mengharapkan perdagangan dengan Indonesia tetap lancar.

Dari catatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sejak tahun 1998, terjadi surplus untuk Jawa Timur dalam perdagangan dengan Perancis. Tahun 2000, impor ke Indonesia mencapai 55,05 juta dollar AS, sementara ekspor 85,27 juta dollar AS. Tahun 1999, impor tercatat 48,46 juta dollar AS, sementara ekspor mencapai 67,12 juta dollar AS. Untuk tahun 2001 (hingga Desember), ekspor mencapai 75,96 juta dollar AS, sedangkan data impor hingga Oktober 2001 sebesar 48,38 juta dollar AS.

Ekspor Jatim ke Perancis didominasi oleh furnitur kayu (26,4 persen), udang segar (13,04 persen), kerajinan kayu (5,54 persen), sepatu olahraga (4,96 persen), dan garmen (4,7 persen). Sementara impor dari Perancis meliputi bahan kimia dasar, besi baja, mesin, dan otomotif. (EDN)

9. Pengalaman pembinaan UKM di Perancis, menunjukkan UKM adalah senjata efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Jelaskan, bagaimana strategi Perancis dalam membina UKM !

Jawaban :

16 Hotel BUMN Merugi

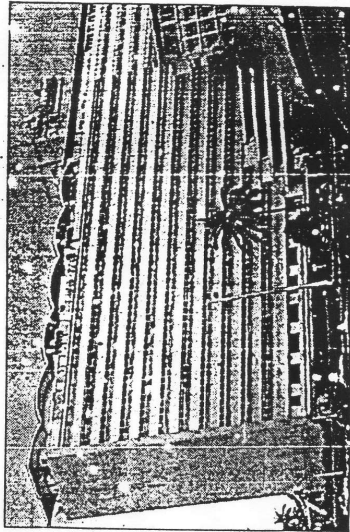
Restrukturisasi Dulu, Kemudian Divestasi

JAKARTA - Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar payah. Hampir di semua sektor, BUMN tidak memberikan hasil maksimal. Kali ini, giliran kebobrokan BUMN di bidang perhotelan yang mulai terkuak.

Sebanyak 16 hotel BUMN, ternyata rata-rata menelan kerugian miliaran rupiah. Sebagai contoh adalah Hotel Indonesia (HI) yang terletak di *prime location* di jantung kota Jakarta, ternyata merugi Rp 4 miliar per tahun.

Kami kecewa dengan HI yang selalu mengalami kerugian Rp 4 miliar per tahun. Karena itu, kita merencanakan restrukturisasi hotel-hotel pemerintah untuk meningkatkan *value-nya*, tutur Deputi Meneg BUMN Bidang Legislatif dan Pa Wisata Ferdinand Nanggola, sesaat rapit dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, kemarin.

Selain Hotel Indonesia, lanjut dia, masih ada belasan hotel lain yang mengalami nasib serupa. Untuk itu, pemerintah merencan-



BAKAL DILEGO: Hotel Indonesia di kawasan strategis M.H. Thamrin.

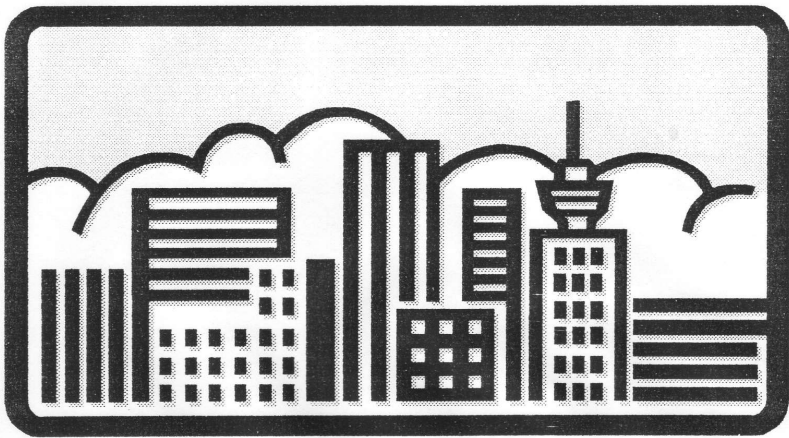
nakan segera melakukan restrukturisasi dan privatisasi terhadap ke-16 hotel yang berstatus BUMN itu. "Masak dari 16 hotel pemerintah ini yang diperoleh pemerintah hanya Rp 8 miliar per tahun. Itu pun sudah termasuk dividen sebesar Rp 2 miliar per tahun," sambung Ferdinand yang masih merangkap dirut Pelindo III Surabaya itu.

Berkaitan dengan itu, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk menjual hotel-hotel itu. Beberapa hotel yang masuk dalam

April mendatang. "Mereka berminat untuk mengelola hotel-hotel tersebut atau membantu secara finansial. Di Bali nanti, pemerintah akan memparkan kondisi 16 hotel tersebut. Kita undang mereka karena restrukturisasi untuk hotel perlu biaya besar, sementara pemerintah tak punya dana cukup," sambungnya.

Lantas dia mencontohkan misalnya renovasi kamar hotel BUMN. Sebagai ilustrasi di Hotel Indonesia, biaya renovasi per kamar bisa mencapai Rp 300 hingga Rp 400 juta. Bila Hotel Indonesia memiliki 400 kamar, maka HI saja membutuhkan dana sebesar Rp 200 miliar. "Ini di luar kemampuan pemerintah. Itu kan jumlah yang cukup besar," tukasnya.

Tentang bagaimana mekanisme restrukturisasi, Ferdinand menandakan hal itu belum diputuskan. Namun yang pasti, pemerintah cenderung untuk memilih menjual hotel yang tak pernah memberikan keuntungan seperti Samudra Beach Hotel. Dalam restrukturisasi, para investor diminta sedapat mungkin tak melakukan pengurangan tenaga kerja. (oki)



Pasal 33 UUD Diharapkan Direvisi

SOLO, KOMPAS — Kata-kata "dikuasai negara" dalam kalimat yang berhubungan dengan pengelolaan cabang-cabang produksi yang menyuguhkan hajat hidup orang banyak, serta menyuguhkan kekayaan alam, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diusulkan diubah. Alasannya, kata-kata itu tidak memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi.

Kata-kata "dikuasai negara" itu kemudian diminta diubah menjadi "direncanakan, diorganisasi, dan dikendalikan" dengan melibatkan rakyat berdasarkan asas yang berkeadilan, efektif, dan efisien.

Hal itu mengemuka dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Perubahan UUD 1945 yang dihadiri Tim Panitia Ad Hoc I (PAH) Badan Pekerja (BP) MPR, yang diadakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Solo, Sabtu (9/3) di Solo. Acara ini diikuti oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, ekonom, pengusaha, petani, pedagang kaki lima, serta tokoh agama.

Kepada Tim PAH BP MPR yang terdiri dari HM Hatta Mustafa, Dr. Haryono, dan Haryanto Taslim, Drs. Rachmad Wahyudi MBA mempresentasikan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. Kata "dikuasai negara" di situ bisa ditafsirkan sebagai tidak ada ruang bagi rakyat. Keberadaan perusahaan-perusahaan negara yang menguasai cabang-cabang produksi yang menyuguhkan hajat hidup orang banyak, terbukti dan pada tingkat tertentu tidak melibatkan masyarakat.

"Keberadaan Pertamina yang menguasai bahan bakar minyak, PLN menguasai listrik, Telkom dengan sambungan telepon, setiap waktu mengalami kenaikan harga (tarif), sehingga pada akhirnya terakumulasi pada ekonomi biaya tinggi. Namun, setiap kali terjadi kenaikan harga (tarif), tak pernah dijelaskan apa sebenarnya penyebab kenaikan harga itu," ujarnya.

Rachmad mengusulkan, hendaknya amandemen UUD 1945 lebih memberi ruang bagi rakyat untuk ikut mengelola perusahaan-perusahaan yang menyuguhkan hajat hidup orang banyak, sehingga segala kebijakan, menyuguhkan perusahaan negara akan lebih melibatkan masyarakat. (ASA)

Kompas, 11-3-2002

10. Monopoli negara dalam sistem ekonomi Indonesia di era referensi saat ini patut dipertanyakan/dipersoalkan. Dua klipings di atas memberikan gambaran kongkrit tentang persoalan tersebut.

Jelaskan, komentar anda !

Jawaban :

[KOMPAS] SABTU, 30 MARET 2002 HALAMAN 9

Nasional

Rakor Kesra Bahas Mutu Pendidikan

Indonesia Terburuk di Asia Tenggara

JAKARTA, KOMPAS — Rakor Kesra (Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat) terbatas yang diikuti empat menteri Kabinet Gotong Royong pada Kamis (28/3) di Jakarta, menyepakati, kondisi mutu pendidikan nasional dewasa ini paling buruk di Asia Tenggara. Untuk itu, diperlukan terobosan sesegera mungkin dengan mengakhiri segala bentuk "kompromi" dan perilaku tak terpuji pada praktik pendidikan. Selain itu, perlu keberanian untuk mengubah kerangka berpikir yang lebih mengedepankan integritas moral.

Demikian keterangan dari Mendiknas Abdul Malik Fadjar, Mendagri Hari Sabarno, dan Menko Kesra Jusuf Kalla yang diterima terpisah, usai rakor di Kantor Depdiknas Senayan, Jakarta, Kamis petang harinya. Rapat terbatas itu juga diikuti Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar dan pejabat yang mewakili Meneg Penertiban Aparatur Negara Feisal Tanjung yang berhalangan hadir.

Jusuf Kalla menyatakan, kondisi mutu SDM Indonesia sangat memprihatinkan dan terendah di Asia. "Dalam persaingan dengan negara lain, ibaratnya kita hanya mampu bersaing pada tingkat kuli dan pembantu rumah tangga (PRT). Ini karena sistem pen-

didikan kita yang keliru dan harus ada pembenahan pada proses belajar mengajar yang tidak benar," jelasnya.

La lantas bertanya yang kemudian dijawabnya sendiri. "Mengapa kita terpuruk? Karena kita tidak mau belajar, sebab selama ini yang belajar atau tidak, prestasinya dianggap sama. Belajar atau tidak, waktu ujian lulus semua..." ujar Kalla.

Oleh sebab itu, mulai tahun ajaran 2002, saat Depdiknas mulai menghapuskan ebtanas yang diganti ujian sekolah, segala bentuk "kompromi"—berupa kontrol nilai oleh guru dengan berbagai alasan—harus diakhiri. "Jangan ada kompromi apa pun dalam dunia pendidikan. Saatnya kita kede-

pankan integritas moral baik guru maupun masyarakat," tambah Malik Fadjar.

Memang, lanjutnya, kontrol nilai dilakukan biasa karena guru takut kepada siswa atau orangtuanya. "Kalau mereka ngamuk, ya harus dijelaskan. Tetapi, memang mental kita lemah. Padahal, pendidikan butuh ketahanan mental dan moral luar biasa. Kalau itu bobol, ambruk ya akan berlarut-larut," jelas Mendiknas.

Bagaimana jika guru tak mau mengajar karena tak boleh lagi berkompromi, Malik menjawab, guru yang begitu akan dikenai sanksi. "Kalau sudah tidak mau mengajar, ya kita berhenti saja. Yang jelas semua praktik kompromi, harus kita habisi," tegasnya.

Sementara, Mendagri Hari Sabarno mengemukakan, keterpurukan sistem pendidikan nasional memperburuk kualitas SDM Indonesia. Itulah sebabnya, pendidikan perlu terobosan untuk melihat kembali tujuan pendidikan nasional, yakni menyalurkan kualitas SDM yang andal baik intelektual, integritas pribadi, maupun kualitas fisik.

"Kalau ketiganya tidak dipacu dengan oagus, bagaimana nantinya. Karena itu, kita per-

lu terobosan. Jangan seperti yang selama ini dilakukan, siswa satu kelas dinaikkan semua, padahal ada yang tidak naik," ujar Hari Sabarno.

Usaha itu harus dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas guru, sebab guru adalah profesi yang sangat menentukan dalam mempersiapkan kualitas SDM Indonesia di masa mendatang. Karena itu, integritas guru harus lebih baik sebelum memperbaiki peserta didik. "Pemerintah juga sedang memikirkan perbaikan kesejahteraan guru agar mereka mampu meningkatkan kualitas anak didiknya," ujarnya.

Menurut Hari, rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menaungkan gerakan peningkatan mutu pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Harapannya, kualitas pendidikan nasional akan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Kita akan mulai penanganan tersebut pada hari pendidikan nasional nanti. Bagaimana memperbaiki dan mengubah sistem pendidikan dalam pengertian peningkatan kualitas mutu anak didik, guru, dan para pendukung lainnya," ujarnya. (TRI/MAM)

[KOMPAS] RABU, 27 MARET 2002

Pendidikan Perlu Dikelola sebagai Industri

JAKARTA, KOMPAS — Kalau mau maju dan menjadi *excellent*, pendidikan di Indonesia sudah waktunya dikelola sebagai industri sehingga dapat terangkat menjadi semacam *noble industry* (industri mulia). Dengan kata lain, cara-cara kerja industri seyogianya diterapkan dalam pengelolaan pendidikan, tetapi tidak dengan cara mencontoh para industriawan mengantungi keuntungan.

"Keuntungan dalam pendidikan sebagai *noble industry* itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, tidak sama dengan dunia industri yang memberikan keuntungan kepada para pengangsa saham," kata Rektor Universitas Pelita Harapan L. Johannes Oentoro PhD ketika ditemui wartawan di Jakarta, Senin (25/3).

Kepada Johannes ditanyakan isu sekitar kecenderungan institusi pendidikan yang hanya mengejar keuntungan, tetapi melupakan kualitas lulusannya, bukannya ada yang tidak peduli dengan produk pendidikan yang dihasilkan.

Johannes melihat, kegagalan pendidikan di Indonesia secara nasional disebabkan karena kegagalan dalam manajemen kepemimpinan dan metodolo-

gi pengajaran. Termasuk di dalam metodologi pengajaran adalah kurikulum dan cara belajar siswa aktif. "Selama manajemen *leadership* dan *methodology of teaching* ini tidak dipahami, maka *noble industry* yang saya maksudkan juga tidak akan dimengerti oleh para pengelola pendidikan di Indonesia," katanya.

Menurut Johannes, jika memang kita memiliki komitmen yang tinggi pada upaya perbaikan dunia pendidikan di Indonesia untuk mencapai mutu pendidikan terbaik, maka harus diambil langkah-langkah terobosan. Dalam kaitan ini, lanjutnya, manajemen kepemimpinan di dalam sistem pendidikan Indonesia sangat perlu ditingkatkan.

"Ibarat dalam dunia industri, kepala sekolah seharusnya se-

orang CEO (*chief executive officer*) yang mengerti masalah produksi, pemasaran, keuangan, dan prediksi-prediksi ke depan. Sayangnya, kepala sekolah dan institusi pendidikan di Indonesia masih banyak yang levelnya baru direktur produksi atau orang yang senior atau hanya administrator saja. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara menghasilkan sesuatu produk saja," katanya.

Digerakkan oleh politik

Mengenal kegagalan dalam metodologi pengajaran, Johannes menilai, hal itu lebih disebabkan oleh kegagalan kepemimpinan. Ia melihat, selama ini sekolah yang berprestasi tinggi masih mengangap siswa sebagai obyek pendidikan dan belum sebagai subyek. Akibatnya, tidak heran kalau banyak produk pendidikan yang katanya berhasil itu banyak membebani siswa dengan tugas, tetapi tidak membuat anak bahagia. Akibatnya lebih jauh, setelah selesai anak jadi tidak menyukai hasil pendidikan yang diraihinya.

Secara makro, demikian Johannes, pendidikan itu digerakkan oleh politik, ekonomi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Akan tetapi, pen-

didikan di Indonesia sayangnya masih lebih banyak hanya digerakkan oleh politik. "Idealnya, ketiga hal itu harus mempengaruhi secara seimbang. Jadi, tidak mengabaikan nilai-nilai yang ada, tetapi juga tidak mengabaikan politik yang memang untuk Indonesia mungkin masih diperlukan," katanya.

Johannes melihat, selama ini banyak pejabat yang bergerak dalam bidang pendidikan—juga sebagian masyarakat yang peduli dengan pendidikan—sadar dan tahu akan keterpurukan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, kata Johannes, anehnya, hingga sejauh ini sepertinya tidak ada upaya yang mereka lakukan untuk mengangkat dunia pendidikan Indonesia dari keterpurukannya itu.

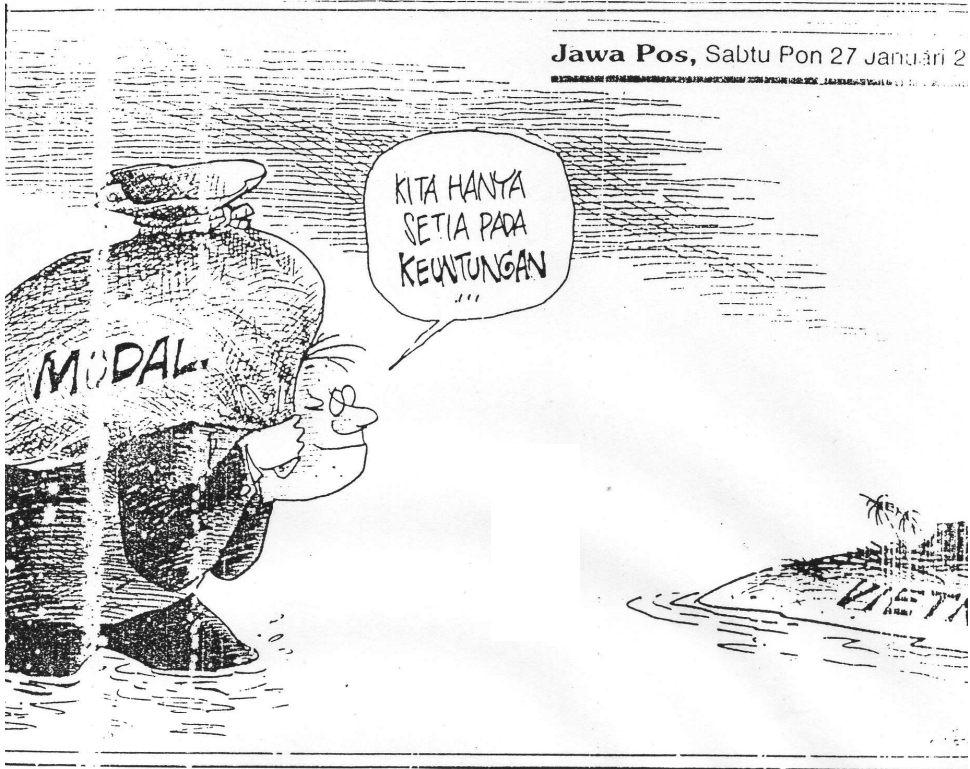
"Saya cukup menghargai komitmen pejabat tinggi pendidikan dan orang-orang muda yang memiliki kepedulian pada pendidikan. Tetapi, memang diperlukan kerja yang lebih keras lagi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Di negeri ini banyak ahli pendidikan sebagai konseptor, tetapi masih sangat sedikit yang implementor," katanya.

(MAM)

11. Dua klipng di atas berbicara tentang pendidikan di Indonesia, satu klipng berbicara tentang terpuruknya mutu pendidikan, sedang klipng kedua berbicara tentang pengelolaan pendidikan.

Bagaimana pendapat anda tentang persoalan di atas !

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page.



12. Pada gambar karikatur di atas mengilustrasikan suatu kondisi ekonomi kita, khususnya menyangkut persoalan investasi.

Jelaskan, makna yang terkandung dalam gambar di atas !

Jawab :

Garis besar makna yang terkandung dalam gambar di atas adalah :

Utang RI Rp 2.100 T

JAKARTA - Utang Indonesia kini benar-benar makin mecekik leher. Total Jenderal, utang luar negeri dan dalam negeri Indonesia tercatat senilai Rp 2.100 triliun. Utang sebesar itu memaksa alokasi APBN 2002 untuk membayar bunga utang membengkak menjadi 26,71 persen.

Dari mana utang sebesar itu? Menurut ekonom senior UGM Revisond Baswir, selain memikul beban utang luar negeri USD 150 miliar (per Desember 1998), Indonesia kini juga memikul beban utang dalam negeri Rp 650 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan Indonesia menanggung beban utang Rp 2.100 triliun. Apa utang sebesar itu tidak mecekik leher, tutur Revisond kepada wartawan di Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin.

Utang luar negeri senilai USD 150 miliar itu, tambahnya, terdiri atas utang pemerintah USD 85 miliar dan utang swasta USD 65 miliar. Dengan beban utang segunung, kini Indonesia terpaksa menjadi negara pengutang nomor lima terbesar di dunia. "Indonesia ranking kelima setelah Brazil, Rusia, Meksiko, dan China," ujar staf pengajar FE UGM itu.

► Baca Utang RI Hal 15

A Jawa Pos

Selasa 20 Agustus 2002

15

Taraf Bahaya Ketergantungan

■ UTANG RI

Sambungan dari hal 1

Sony-panggilan akrabnya-menjelaskan, dari total APBN 2002, Rp 332,5 triliun, yang digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri Rp 271,4 triliun. Jika ditambah bunga utang dalam negeri Rp 59,6 triliun, volume APBN untuk membayar bunga utang meliputi 26,71 persen.

Dibanding pada 2001 lalu, lanjut Sony, dari total APBN Rp 340 triliun, Rp 23,8 triliun digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Jika ditambah bunga utang dalam negeri Rp 61,2 triliun, praktis 26,32 persen APBN 2001 habis untuk membayar bunga utang saja. "Maka, habishlah anggaran kita hanya untuk membayar utang," sahutnya.

Apa konsekuensinya? Pembayaran utang yang lebih dari seperempat volume APBN ini, lanjut dia, berdampak pada membeng-

koknya delisit anggaran negara. Hal itu tampak pada APBN 2001. Defisit anggaran negara yang tercatat Rp 54,3 triliun memaksa pemerintah melakukan program-program yang terkadang membentangi masyarakat. Selain itu, adanya paksaan lembaga dan organisasi internasional ini juga cenderung memaksakan berbagai agendanya ke dunia termasuk Indonesia. "Ini yang kita khawatirkan."

Sectra terpisah, Men PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie juga mengakui tingkat ketergantungan Indonesia pada pihak lain sudah dalam taraf yang sangat membahayakan. "Ini patut disikapi," Sebab, ketidakmandirian dan banknasional (BPN), dan lain-lain menentukan kebijakan strategis sangat memengaruhi, tegas Kwik di Jakarta kemarin. Rakyat Indonesia, sambungannya, dipaksa mengeluarkan dana ri-buan triliun rupiah untuk membayar obligasi rekapitalisasi yang diberikan kepada dunia perbankan yang akan dijual ke swasta bahkan asing (kwoeki).

13. Beban utang RI (Utang Luar negeri dan dalam Negeri) cukup spektakuler dilihat dari sisi jumlahnya. Kliping di atas memberikan data kongkrit tentang persoalan di atas.

Jelaskan, faktor yang melatarbelakangi besarnya beban utang pemerintah RI !.

Jawaban :

14. Pada prinsip analisa *ekonomi mikro* berbeda dengan analisa *ekonomi makro*.

Jelaskan, perbedaan analisa ekonomi mikro dengan analisa ekonomi makro !

Jawaban :

Perbedaan adalah sebagai berikut :

Analisa Ekonomi Mikro

- a. _____

- b. _____

- c. _____

Analisa Ekonomi Makro

- a. _____

- b. _____

- c. _____

15. Dalam sistem ekonomi apapun, permasalahan dasar ekonomi yang perlu dipecahkan oleh tiap-tiap negara selalu mengacu kepada tiga hal yaitu :

Jelaskan, tiga persoalan yang dimaksud !

Jawaban :

Tiga persoalan yang dimaksud adalah :

a. Apa berkaitan dengan :

b. Bagaimana berkaitan dengan :

- c. Untuk siapa berkaitan dengan :

16. Konsep GNP pada prinsipnya berbeda dengan konsep GDP.

- a. Jelaskan, perbedaan antara konsep GDP !
b. Apa yang bisa saudara berikan komentar, apabila GDP dalam suatu negara lebihh besar dari pada GNP-nya !

Jawban :

- a. Perbedaan konsep GNP dan GDP adalah :

GNP

GDP

- b. Komentar dari kami adalah :

17. Dalam analisa Pendapatan Nasional (ekonomi makro), dikenal *perekonomian tertutup sederhana*, *perekonomian tertutup* dan *perekonomian terbuka*.

- Jelaskan, pengertian dan indikator-indikator dalam masing-masing perekonomian tersebut !

- a. *Perekonomian tertutup sederhana dan indikator-indikatornya :*

b. *Perekonomian tertutup dan indikator-indikatornya :*

c. *Perekonomian terbuka dan indikator-indikatornya :*

18. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dikenal *model perekonomian dua sektor, tiga sektor dan empat sektor.*

Jelaskan, ketiga model perekonomian yang dimaksud !

Jawaban :

a. *Model perekonomian dua sektor :*

b. *Model perekonomian tiga sektor :*

c. *Model perekonomian empat sektor :*

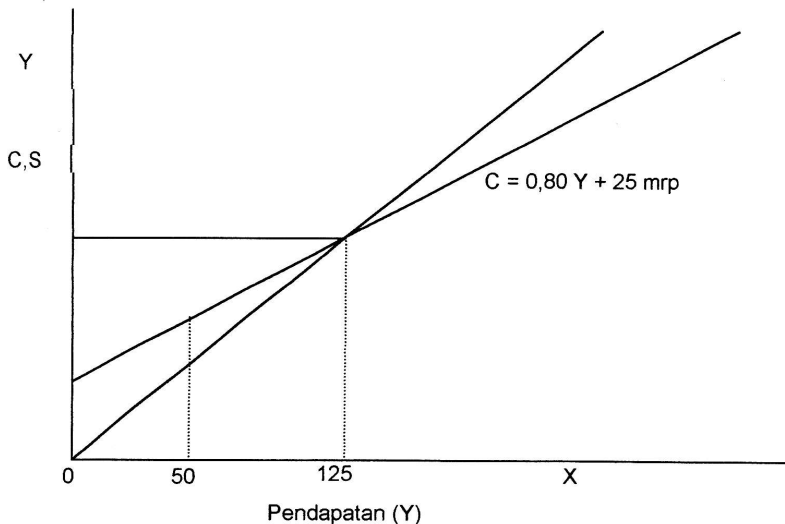
19. *Diketahui* : Persamaan fungsi konsumsi

$$C = 0,80 Y + 25 \text{ milyar rupiah}$$

Ditanyakan : Jelaskan dengan memakai gambar apa yang terjadi dengan APS, APC, MPC dan MPS apabila pendapatan mengalami kenaikan !

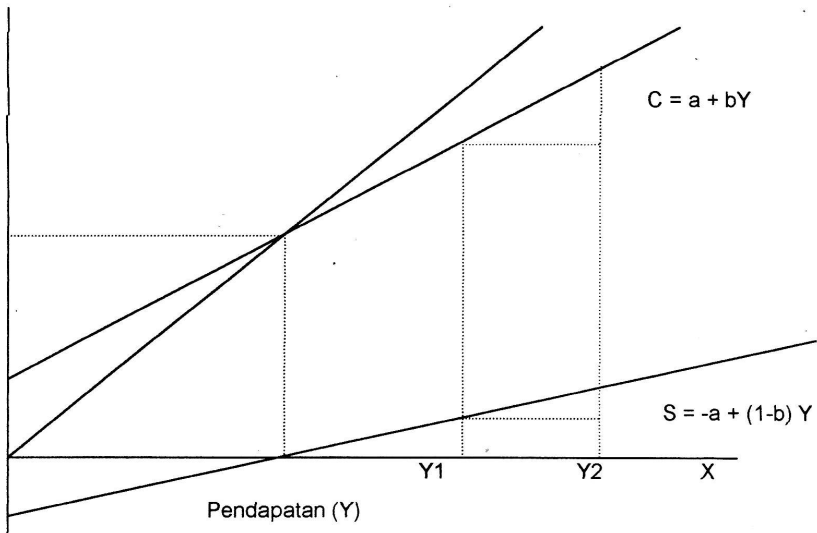
Penyelesaian :

Perhatikan gambar berikut dan lengkapi sesuai dengan permintaan soal :



Penjelasan :

20. Perhatikan gambar fungsi konsumsi berikut ini :



Berdasarkan gambar tersebut :

a. MPC akibat naiknya pendapatan dari Y_1 ke Y_2 adalah :

b. MPS akibat naiknya pendapatan dari Y_1 ke Y_2 adalah :

c. APC pada tingkat pendapatan Y_1 adalah :

d. APS pada tingkat pendapatan Y_1 adalah :

Kesimpulan tentang MPC dan MPS pada gambar di atas adalah :

21. **Diketahui :** Persamaan fungsi konsumsi per tahun adalah

$$C = 0,80 Y + 25 \text{ milyar rupiah}$$

Besarnya investasi per tahun adalah :

$$I = 30 \text{ milyar rupiah}$$

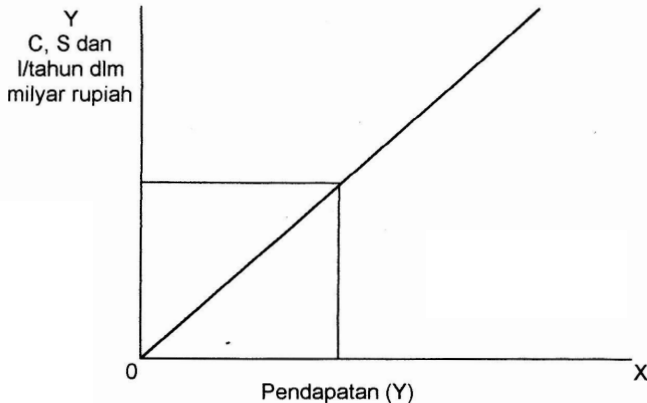
Ditanyakan :

- Hitung besarnya Y , C , dan S dalam keseimbangan baru !
- Gambarkan !

Jawab :

- Besarnya Y , C dan S dalam keseimbangan adalah :

- Gambarnya adalah sebagai berikut :



22. Teori multiplier dapat diibaratkan sebagai *pedang bermata dua*, pada satu amat bermanfaat sedang pada sisi lain merugikan.

Jelaskan, yang dimaksud dengan persoalan di atas !

Jawaban :

23. Diketahui besarnya $MPC = 0,80$

Berapa besarnya tambahan investasi yang diperlukan agar pendapatan naik dari 100 milyar rupiah menjadi 125 milyar rupiah ?

Jawaban :

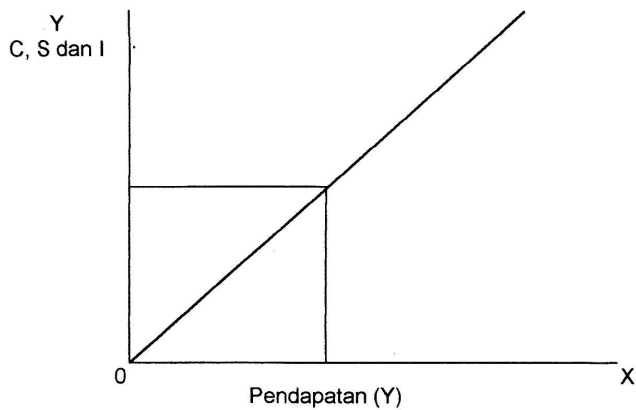
24. Gambar proses multiplier :

- a. Dalam sebuah bagan !
- b. Dalam grafis !

Jawaban :

- a. Proses multiplier dalam bagan adalah :

- b. Proses multiplier dalam grafis adalah :



25. Diketahui : Persamaan fungsi konsumsi per tahun adalah :

$$C = 0,75 Y + 25 \text{ milyar rupiah}$$

Ditanyakan :

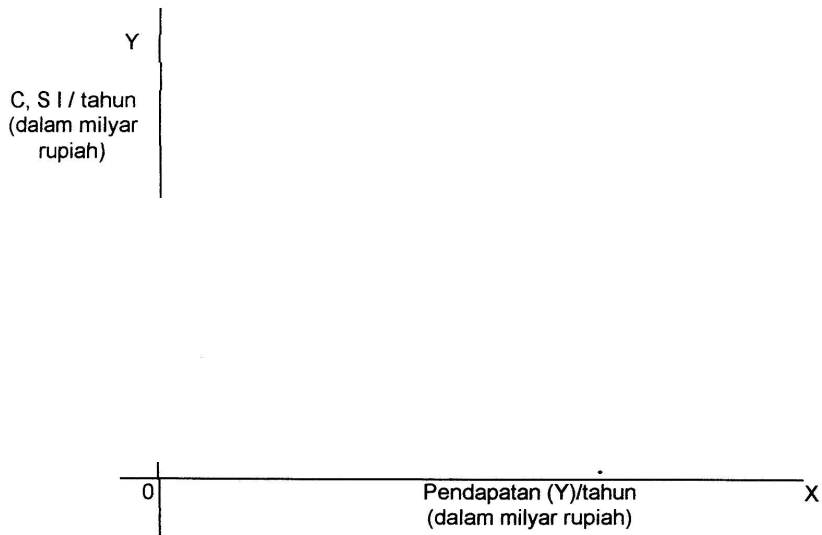
- a. Gambarkan fungsi konsumsi dan savingnya !
- b. Tunjukkan dalam gambar MPC dan MPS-nya !

b. Proses multiplier itu berlangsung :

(a) Proses multiplier secara angka-angka :

Periode	Tambahan I	Tambahan C	Tambahan Y
I			
II			
III			
IV			
V			
.			
n			
Jumlah			

(b) Proses multiplier secara grafis :



27. Untuk memperoleh gambaran tentang sejauh manakah tingkat employment yang terjadi menyimpang dari kapasitas produksi yang ada, maka dapat menggunakan konsep inflationary gap dan deflationary gap.

Jelaskan, yang dimaksud dengan inflationary Gap (IG) dan Deflationary Gap (DG) !

Jawaban :

a. Inflationary Gap adalah :

b. Deflationary Gap adalah :

28. Diketahui : Fungsi konsumsi per tahun :

$$C = 0,80 Y + 25 \text{ milyar rupiah}$$

Besarnya investasi per tahun adalah :

$$I = 45 \text{ milyar rupiah}$$

Ditanyakan :

- Hitung besarnya IG atau DG diketahui masing-masing kapasitas produksi sebesar :
 - 300 milyar rupiah
 - 500 milyar rupiah
- Gambarkan kurva/grafiknya !
- Dengan jumlah berapa investasi ditambah/dikurangi agar tidak terjadi IG atau DG !

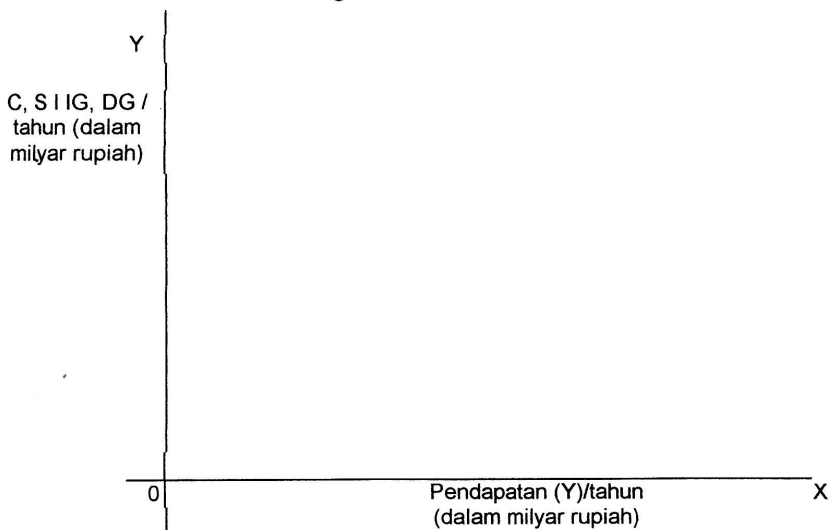
Penyelesaian :

a. Besarnya IG/DG pada kapasitas produksi :

(a) 300 milyar rupiah

(b) 500 milyar rupiah

b. Gambar adalah sebagai berikut :



- c. Investasi ditambah atau dikurangi agar tak terjadi IG/DG :

29. Perhatikan data tabel dibawah ini :

Tabel 1

Pendapatan Perkapita Negara-Negara ASEAN, Tahun 1995

Negara	Jumlah Pendapatan Perkapita
Singapura	+ USD 3000
Brunei	+ USD 3000
Malasya	USD 3000
Thailand	USD 2210
Indonesia	USD 1023
Filiphina	USD 965
Vietnam	USD 180

Sumber : Jawa Pos, Jumat 19 April 1996

Berdasarkan data pendapatan perkapita di atas, Bank Dunia menyarankan kepada pemerintah kita untuk menaikkan harga BBM dan tarif listrik.

- a. *Jelaskan*, alasan yang mendasari Bank Dunia !
b. Bagaimana komentar anda terhadap saran Bank Dunia tersebut !

Jawaban :

a. Alasan yang mendasarinya adalah :

b. Komentar :

30. Pendapatan perkapita yang tinggi belum akan memberikan jaminan terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di dalam suatu negara.

Jelaskan, alasan yang mendasarinya adalah :

Jawaban :

Alasan yang mendasarinya adalah :

31. Bagaimanakah hubungan antara koefisien multiplier dengan MPC ?

Jawaban :

Hubungannya adalah :

32. *Jelaskan*, syarat yang diperlukan agar proses multiplier itu lancar jalannya !

Jawaban :

Syarat-syarat yang dimaksud adalah :

a.

b.

c.

33. *Jelaskan*, perbedaan antara autonomous investment dengan induced investment !

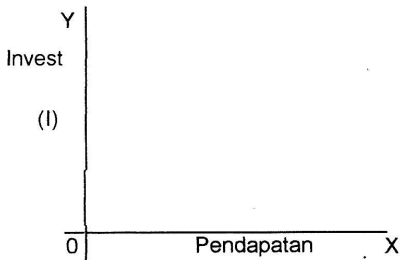
Jawaban :

Autonomous Investment

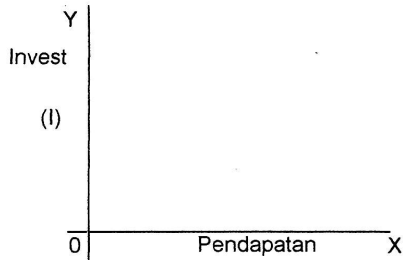
Induced Investment

a.	a.

b. Bentuk kurvanya



b. Bentuk kurvanya



34. Hubungan antara kesempatan kerja (*employment*) dengan *kapasitas produksi nasional*, menghasilkan berbagai kemungkinan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi yang dimaksud antara lain kondisi *full-employment*, dan *over-employment*.

Jelaskan, yang dimaksud dengan ketiga kondisi di atas !

Jawaban :

a. Kondisi *full-employment* maksudnya :

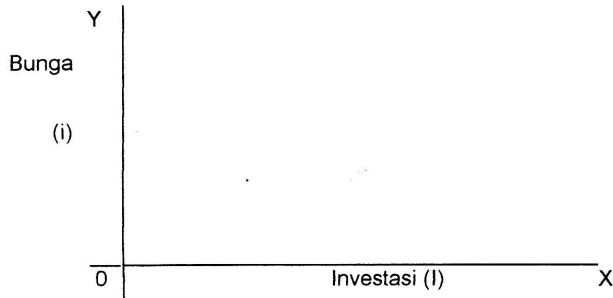
b. Kondisi *under-employment* maksudnya :

c. Kondisi *over-employment* maksudnya :

35. Pada tingkat bunga yang rendah investasi bersifat interest in elastis.

Jelaskan, dengan memakai gambar mengapa begitu ?

Jawaban :



Penjelasan Gambar :

36. Ada diantara pakar ekonomi yang berpendapat, bahwa globalisasi (liberalisasi) ekonomi pada prinsipnya proteksi terselubung dari negara-negara maju (kelompok utara) terhadap negara sedang berkembang (negara kelompok selatan)..

Berikan alasan yang mendasari pandangan tersebut !

Jawaban :

Alasan yang mendasarinya adalah :

38. Kalau kita perhatikan data pada Tabel 2 di atas, upaya untuk lebih memperbaiki distribusi penguasaan ekonomi nasional perlu dilakukan sehingga masyarakat yang miskin akan berangsur-angsur dapat dikurangi.

Jelaskan, beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah kita akhir-akhir ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan !

Jawaban :

Langkah-langkah strategis yang dimaksud :

- a. _____

- b. _____

- c. _____

- d. _____

- e. _____

- f. _____

39. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi makro yang lebih baik dan stabil pemerintah kita telah meluncurkan serangkaian kebijakan, baik di sektor moneter maupun di sektor riil.

Berikan contoh-contoh kebijakan moneter :

Jawaban :

a. Contoh kebijakan di sektor moneter :

b. Contoh kebijakan di sektor riil :

40. Kebijakan di sektor riil umumnya lebih sulit dibanding dengan sektor moneter.

Jelaskan, mengapa begitu ?

Jawaban :

42. Proses accelerator dan investasi yang tidak langsung lebih banyak terjadi di negara-negara yang sudah maju. Dan sebaliknya di negara yang sedang berkembang. Hal tersebut disebabkan di negara-negara maju sangat banyak aparat-aparat produksinya dan tenaga kerja dan tenaga ahli.

Jelaskan, bilamana proses accelerator itu tidak berlaku !

Jawaban :

Proses accelerator tidak berlaku bila :

- a. _____

- b. _____

- c. _____

43. Pada umumnya *public investment* bersifat otonom

Jelaskan, mengapa public investment umumnya bersifat otonom !

Jawaban :

Alasannya adalah :

- a. _____

- b. _____

44. Sejak pemerintah orde baru ada 4 prinsip yang dipegang di dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penyusunan APBN kita !

Jawaban :

Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Prinsip _____

- b. Prinsip _____

- c. Prinsip _____

- d. Prinsip _____

45. Ada tiga fungsi pokok kebijaksanaan anggaran belanja negara, ketiga fungsi tersebut adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Jelaskan, yang dimaksud dengan ketiga fungsi tersebut !

Jawaban :

Ketiga fungsi maksudnya :

- a. Fungsi alokasi

b. Fungsi distribusi

c. Fungsi stabilisasi

46. *Diketahui* : Fungsi Konsumsi

$$C = 0,80 Y + 25 \text{ milyar rupiah}$$

Besarnya transfer pemerintah

$$Tr = 40 \text{ milyar}$$

Besarnya pajak

$$Tx = 20 \text{ milyar rupiah}$$

Ditanyakan :

a. Cari persamaan fungsi konsumsi :

- (a) Sebelum Tr dan Tx
- (b) Sesudah Tr dan Tx
- (c) Sesudah Tx sebelum Tr
- (d) Sesudah Tr dan Tx

b. Cari persamaan fungsi saving sesudah Tr dan Tx

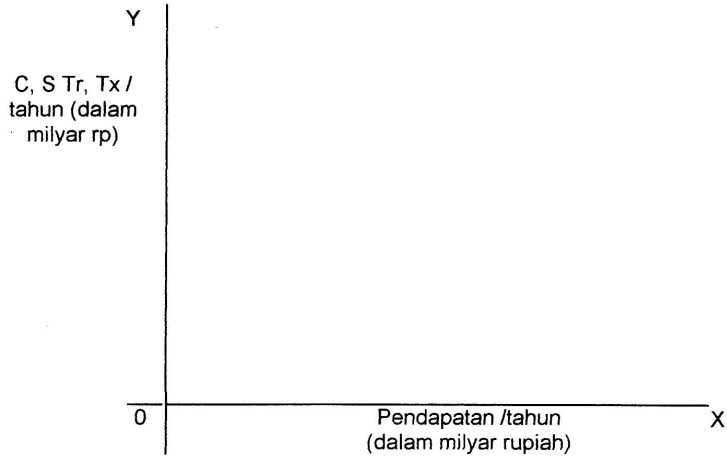
c. Gambarkan seluruhnya !

Jawaban :

a. Persamaan fungsi konsumsi

b. Persamaan fungsi savingnya :

c. Gambarnya adalah sebagai berikut :



Penjelasan gambar :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page.

47. Pajak yang *built-in flexible* sebagai *automatic stabilizer*, yaitu alat penstabil yang secara otomatis.

Jelaskan, jalan pemikiran tersebut !

Jawaban :

48. Ada beberapa masalah yang dianggap sebagai penyebab *timbulnya pengangguran*. Dari penyebab pengangguran tersebut timbul beberapa istilah tentang pengangguran, yaitu pengangguran *friksional, struktural dan musiman*.

Jelaskan, ketiga macam pengangguran di atas !

Jawaban :

a. *Pengangguran friksional adalah :*

b. *Pengangguran Struktural adalah :*

c. *Pengangguran musiman adalah :*

49. *Diketahui* : Fungsi Konsumsi per tahun adalah :

$$C = 0,75 Y + 30 \text{ milyar rupiah}$$

Pada periode ke 1 besarnya investasi per tahun :

$$I = 45 \text{ milyar rupiah}$$

Pada periode ke 2 besarnya investasi 2 kali lebih besar dari periode pertama.

Ditanyakan :

- a. Dengan menggunakan angka pengganda (multiplier) hitung besarnya Y, C dan S keseimbangan pada periode ke 2 !
- b. Gambarkan proses multiplier tersebut :
 - (a) Secara angka-angka !
 - (b) Secara grafis !

Jawaban :

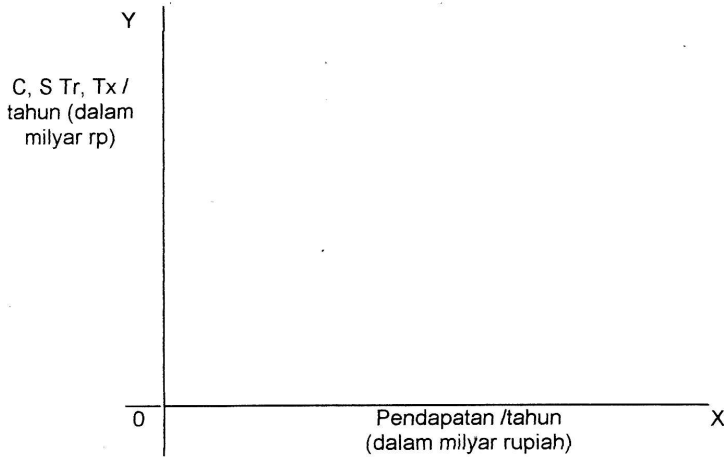
- a. *Besarnya Y, C dan S keseimbangan pada periode ke 2 :*

- b. *Proses multiplier ;*

- (a) *Secara angka-angka :*

Periode	Tambahan I	Tambahan C	Tambahan Y
I			
II			
III			
IV			
V			
Jumlah			

(b) Secara grafis :



50. Dalam era globalisasi ini peran yang dimainkan negar/pemerintah dalam bidang ekonomi secara berangsur-angsur semakin berkurang, selanjutnya kegiatan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh proses mekanisme pasar.

- a. *Jelaskan*, yang dimaksud dengan era globalisasi ekonomi !
- b. *Jelaskan*, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya globalisasi, khususnya dalam bidang ekonomi !

Jawaban :

- a. *Yang dimaksud era globalisasi ekonomi adalah :*

- b. *Faktor yang melatarbelakangi :*

51. Gambarkan hubungan-hubungan fundamental antara sejumlah variabel ekonomi makro.

Variabel-variabel yang dimaksud adalah :

M, I, I, C, Y, E

lawaban :

Gambarnya adalah sebagai berikut :

Keterangan gambar :

Hubungan antara variabel ekonomi

(Sesuai dengan soal no, 51)

52. Pemerintah kita saat ini telah bertekad untuk memerangi terjadinya ekonomi biaya tinggi, dengan jalan memangkas berbagai macam bentuk pungutan yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi.

- a. *Jelaskan*, faktor yang melatarbelakangi tindakan di atas !
- b. Niat baik sering tidak jalan karena tidak didukung oleh keberanian melaksanakan niat baik. mengapa begitu ?

Jawaban :

a. *Latar belakang masalah :*

b. *Sebabnya adalah :*

53. Pemerintah Indonesia memberlakukan jenis pajak, yaitu pertambahan nilai atas barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.

- a. Apa tujuan pemungutan pajak pada umumnya ?
- b. Apa keunggulan penarikan pajak tersebut ?

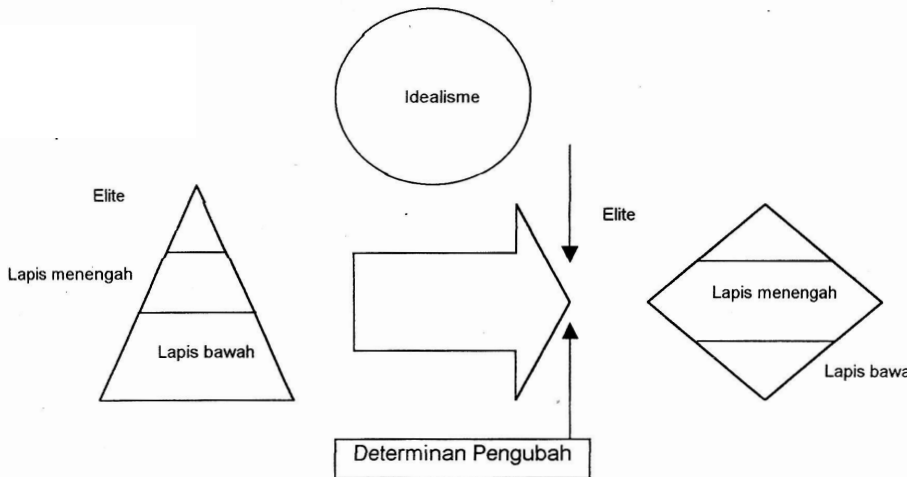
Jawaban :

a. *Tujuan pada umumnya :*

b. *Keunggulan penarikan pajak tersebut adalah :*

54. Perhatikan gambar dibawah ini :

Gambar Transformasi Piramida ke Belah Ketupat



Sumber : Fadel Muhammad, 1992 : 508

Gambar di atas adalah profil pengusaha kita saat ini (model piramida) dan profil pengusaha yang kita harapkan di masa yang akan datang (model belah ketupat).

- Jelaskan, strategi pengubah yang dapat dilakukan guna mencapai model belah ketupat.
- Model pengusaha belah ketupat akan sangat membantu ke arah proses demokratisasi di negara kita. Mengapa begitu ?

Jawaban :

- Strategi yang dimaksud adalah :

- b. Profil pengusaha belah ketupat akan membantu proses demokratisasi :

55. Ciri umum dari sistem Keynesian terdiri atas tiga hal, yaitu bersifat makro ekonomi, ekonomi moneter dan ekonomi arus lingkaran ekonomi (*circular flow of economics*).

Jelaskan, ketiga ciri khusus di atas !

Jawaban :

- a. Bersifat ekonomi makro :

- b. Ekonomi moneter :

c. *Ekonomi tentang arus lingkaran :*

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Catatan dari Dosen Pembina

1. _____

2. _____

Malang, Tgl, _____

Dosen Pembina,

(_____)

QSAR, Puncak Gunung Es

Problema Investasi Bagi Hasil

OLEH ELVYN G. MASASSYA

ADAKAH jenis investasi yang bisa meniadakan dogma *high risk high return*? Ada! Setidaknya, seperti itulah persepsi para investor yang menempatkan dananya dalam perusahaan investasi bagi hasil. Jadi, tidak mengherankan bila kemudian PT Qur'ania Subur Alam Raya (QSAR), yang menjalankan bisnis bagi hasil di sektor agribisnis berhasil menarik hati para pemilik dana. Perusahaan ini, menawarkan *return* yang jauh di atas bunga deposito dan risiko yang nihil.

Induk janji yang dilekemukakan, ketika QSAR memasang iklan di berbagai media cetak beberapa tahun silam.

Namun, persepsi memang berbeda dengan realitas. *High risk high return* adalah suatu aksi yang tidak bisa digugat oleh aksi lain apa pun. Sektor C.003 memberikan *return* bagi hasil yang memberikan mereka risiko yang jauh lebih dahsyat. Konkretnya, dana Rp 500

milijar yang tertanam di QSAR, tidak jelas lagi nasibnya. QSAR yang semula diyakini bisa menjadi "dewa investasi" ternyata hanya memberi mimpi. Tidak jauh beda dengan sinetron di televisi.

Mengapa masyarakat bisa tertarik investasi semacam itu? Boleh jadi, latar persoalannya ada di budaya kita yang cenderung ingin hasil cepat tanpa kerja keras. Lihat saja, fenomena *mining-mining* tabungun berhadiah yang dijalankan banyak bank dewasa ini, ternyata begitu sakti menghimpun dana. Masyarakat lebih suka *mining-mining* hadiah ketimbang rubstansi. Atau, lihat beberapa tahun silam, saat banyak bank jor-joran menawarkan suku bunga. Pemilik dana berlomba-lomba menempatkan dananya di bank seperti itu. Sampai ketika bank-bank itu dilikuidasi, baru penyesalan datang. Boleh jadi, perasaan seperti itu pula yang dialami ribuan investor QSAR, saat ini.

♦♦♦

INVESTASI bagi hasil sebenarnya bukan hal keliru. Prinsip syariah atau *venture capital* juga mengenal bagi hasil. Tetapi, hasil investasi bukan sekadar keuntungan, namun juga risiko kerugian. Inilah prinsip dasar yang umumnya tidak dikemukakan secara jujur oleh penyelenggara investasi bagi hasil.

Investasi juga mengenal logika, bagaimana penyelenggara mengelola risiko yang melekat pada jenis investasi itu. Dalam investasi agribisnis, seperti dilakukan QSAR, sebagai misal, benar

tidak masuk akal. Yang melakukan investasi di sektor agribisnis bukan cuma QSAR. Perusahaan-perusahaan yang nonbagi hasil juga banyak bermain di agribisnis. Jadi, amat mustil bila produk hasil tani QSAR mendominasi pasar, apalagi dijual dengan harga jauh di atas kladiman. Konkretnya, bila QSAR menjangkau keuntungan tinggi kepada investor, itu jelas bukan karena QSAR mampu menjual produknya dengan harga mahal.

Sementara, kemungkinan melakukan efisiensi, rasanya juga agak berlebihan. Untuk melakukan kegiatannya, selain mengalokasikan dana untuk lahan, bibit, pemeliharaan, proses produksi, dan distribusi, QSAR pasti memiliki biaya overhead yang besar. Dengan kantor cabang di mana-mana, muskil bagi QSAR untuk melakukan efisiensi melebihi yang dilakukan perusahaan sejenis.

Kemungkinan ketiga bukannya mengada-ada. Sebab, bisnis apa pun, termasuk agribisnis pasti m.iliki yang namanya masa investasi atau *grace periode*. Bila palawija, paling tidak kurun waktu masa investasi adalah tiga bulan. Kalau hortikultura atau tanaman keras jelas lebih panjang, bisa mencapai tahunan. Akibatnya, dalam masa investasi itu, yang nyata-nyata belum menghasilkan, penyelenggara investasi tetap harus membayar (minimal) bunga atau keuntungan kepada investor. Dari mana sumber dananya?

Sangat mungkin, yang dipakai sebagai sumber pembiayaan adalah dana si investor juga. Konkretnya, menggunakan pola *gali lubang tutup lubang* atau *mem-dakat* pola arisan. Dengan kata lain,

beberapa sepanjangan manusia masih butuh pangan, maka kebutuhan akan produk pertanian akan terus ada. Tetapi, juga ada tingkat kejenuhannya. Itu berarti, tidak seluruh hasil produksi bisa diserap pasar. Dan QSAR yang kabarnya dana investasi, boleh jadi bingung menempatkan dana itu. Sebab, semakin luas lahan yang digarap, tidak, menjamin *output*nya akan diserap pasar. Ada titik optimum dalam penggunaan lahan. Setelah QSAR juga ada lahan yang dikelola perusahaan lain yang juga memproduksi *output* yang sama. Lain hal, kalau QSAR menjadi pemasok tunggal produk pertanian, itu baru dilihat dari sisi teknis pertaniannya.

Kemudian, target keuntungan yang bisa diraih. Setinggi apa pun permintaan terhadap produk pertanian, sulit rasanya untuk bisa menghasilkan keuntungan 50 sampai 85 persen per tahun, sebagaimana dijanjikan QSAR. Menurut para ahli pertanian, dalam keadaan normal, keuntungan dari bisnis pertanian paling banter hanya sekitar 10 persen per tahun. Lalu, bagaimana QSAR berani menjanjikan *return* yang melebihi kelaziman itu? Ada beberapa kemungkinan.

Pertama, harga produk pertanian QSAR dibeli pasar dengan harga jauh di atas pesaingnya. Kedua, QSAR melakukan efisiensi luar biasa dahsyat, sehingga mungkin tidak ada ongkos sama sekali. Ketiga, QSAR sebenarnya menjalankan "metrik bisnis" dalam peng-lan

biusisnya.

Mengenai kemungkinan pertama, jelas

QSAR. Puncak Gunung Es Problema Investasi Bagi Hasil

(Sambungan dari halaman 4)

dana dari investor yang masuk belakangan. dipakai untuk membayar investor yang dulunya menjadi anggota. Itu sebabnya, para investor yang masuk di awal, umumnya masih menikmati keuntungan. Sementara, investor yang datang belakangan, hanya menerima "ge-
tahnya" saja.

◆◆◆

LEPAS kemungkinan mana yang benar, hal yang paling tidak masuk akal dari kegiatan QSAR adalah filosofi pendanaannya. Bisnis apa pun, sukar dimungiri bukan kegiatan sosial. Bisnis adalah derivatif dari ideologi kapitalis. Dalam konsep ini, lazimnya pebisnis

unggul, bertakut keuntungannya. Yang ada adalah terbayu risiko. Nah, bila benar QSAR mampu meraih keuntungan, 50 persen sampai 85 persen, seharusnya ia tidak perlu berbagi. Kalau pun berbagi, tentunya dengan persentase lebih kecil, dan itu bisa dilakukan bila QSAR menggunakan kredit bank. Dengan bunga sekitar 17-20 persen per tahun, maka marjin yang diperoleh pemilik QSAR akan jauh lebih besar ketimbang menggunakan dana milik masyarakat yang biayanya mencapai 50-85 persen per tahun. Lalu mengapa QSAR tidak menggunakan kredit bank yang lebih jelas akuntabilitasnya? Atau, dari sisi lain, bila bisnis QSAR benar-benar sebagai mana: dijanjikannya, tentu

akan banyak bank tegur memberi pendanaan? Nyatanya, tidak ada bank yang berminat? Boleh jadi, bisnis QSAR sebenarnya tidak bank-able. Yang juga mengherankan adalah mekanisme operasional QSAR itu sendiri. Perusahaan ini adalah perseroan terbatas yang tentunya tunduk pada Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki izin sebagai perusahaan yang bergerak di agribisnis. Tetapi, dalam praktiknya, QSAR sudah melakukan kegiatan pengimpunan dana. Kalau perusahaan di sektor riil melakukan pengimpunan dana langsung dari masyarakat, mestinya dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan, seperti surat berharga, apakah itu obligasi

bakukan. Sayang, kita sering kebakaran jenggot bila masalah sudah demikian parah. Dan, QSAR hanyalah salah satu contoh dari problem investasi bagi hasil yang marak belakangan ini.

QSAR bukan ujung dari persoalan investasi bagi hasil. Bukan tidak mungkin, fenomena sejenis akan mencuat kembali dalam waktu tidak terlalu lama, bila pemerintah tidak segera menertibkan bisnis-bisnis seperti itu yang apa boleh buat, lebih cocok diberi istilah "pepesar kosong" ketimbang investasi bagi hasil.

ELVYN G MASASSYA
Praktisi dan pengamat
investasi

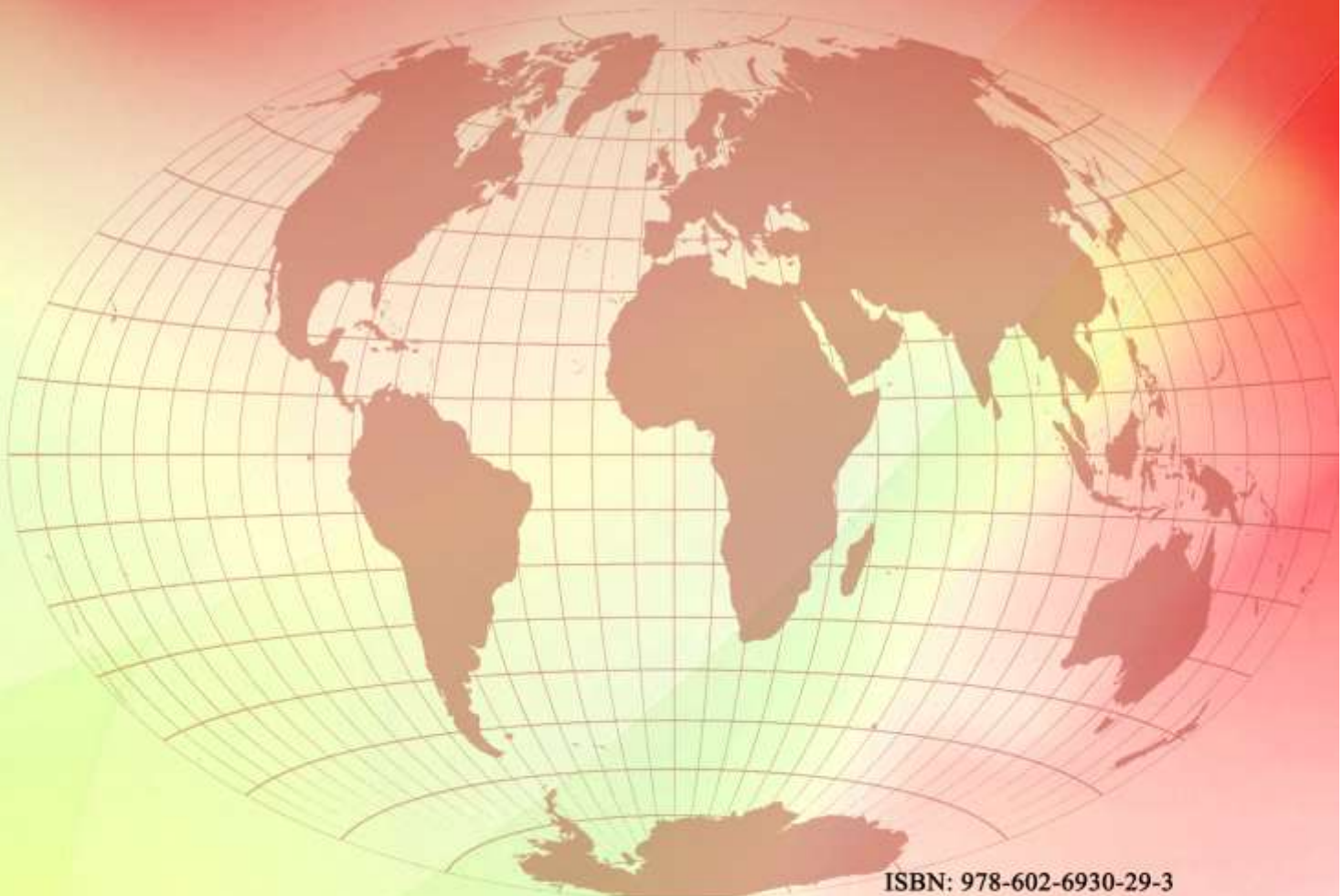
56. Investasi pada PT. QSARI adalah gambaran tentang persepsi berbeda dengan realitas. Sedangkan high risk high return adalah suatu aksioma yang tidak bisa digugat oleh keajaiban apapun.
Jelaskan, prinsip tersebut dengan kegiatan PT. QSARI
Jawaban :

Priyono | Supriyanto

TEORI EKONOMI MAKRO

Buku TEORI EKONOMI MAKRO ini disusun dengan suatu harapan agar mahasiswa dapat mengikuti jalannya kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan baik. Buku ini disusun terdiri atas dua bagian penting, yaitu : bagian pertama terdiri atas konsep dan teori ekonomi makro yang terdiri atas tujuh bab. Sedangkan bagian kedua terdiri atas soal-soal dan tugas yang terangkum dalam Lembar Kerja Mahasiswa (LKM).

Selain itu buku TEORI EKONOMI MAKRO ini juga bermanfaat untuk pengajar maupun masyarakat umum, yang ingin menambah wawasan tentang Teori Ekonomi.



ISBN: 978-602-6930-29-3



Zifatama Publishing
Jl. Taman Pondok Jati J3,
Taman Sidoarjo
Telp : 031-7871090
Email : zifatama@gmail.com

